

**DOMINASI KEPENTINGAN KORPORASI DALAM
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
DI TIMUR TENGAH: STUDI KASUS BISNIS TENTARA
BAYARAN PASCA-PERANG IRAK TAHUN 2003**

TESIS

WIRAWAN SUKARWO
0706192874



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JULI 2009**

**DOMINASI KEPENTINGAN KORPORASI DALAM
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
DI TIMUR TENGAH: STUDI KASUS BISNIS TENTARA
BAYARAN PASCA-PERANG IRAK TAHUN 2003**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Politik dan Hubungan
Internasional pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

WIRAWAN SUKARWO
0706192874



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JULI 2009**

untuk ibu, bapak, ita di rumah
dan untuk "kamu"



LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : WIRAWAN SUKARWO
NPM : 0706192874
Kekhususan : Politik Dan Hubungan Internasional Timur Tengah
Judul Tesis : **DOMINASI KEPENTINGAN KORPORASI
DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH:
STUDI KASUS BISNIS TENTARA BAYARAN
PASCA-PERANG IRAK TAHUN 2003**
Tanggal : 3 Juli 2009

Pembimbing Tesis



Achmad Ramzy Tadjoeidin, BA.MPA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Wirawan Sukarwo
NPM : 0706192874
Program Studi : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah
Judul Tesis : Dominasi Korporasi Dalam Kebijakan Pemerintahan Amerika Serikat di Timur Tengah: Studi Kasus Bisnis Tentara Bayaran Pasca Perang Irak Tahun 2003

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam bidang Politik dan Hubungan Internasional pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : ^RAhmad Ramzy Tadjoedin, MPA.

(*Ramzy*)

Penguji : Dr. Hanief Saha Ghafur, M.Si.

(*Hanief*)

Penguji : Drs. Moh. Hamdan Basyar, M.Si.

(*Hamdan*)

Penguji : Dr. Mohammad Noer

(*Noer*)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2009

ABSTRAKSI

Nama : Wirawan Sukarwo
Program Studi : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah
Judul : Dominasi Korporasi dalam Kebijakan Pemerintahan Amerika Serikat di Timur Tengah: Studi Kasus Bisnis Tentara Bayaran Pascaperang Irak Tahun 2003

Tesis ini membahas dominasi pihak korporasi dalam kebijakan pemerintahan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan studi kasus bisnis tentara bayaran pascaperang Irak tahun 2003. Fokus masalah dalam penelitian ini terangkum dalam tiga pertanyaan inti. Pertama, mengapa pihak korporasi AS dapat menjalankan bisnis tentara bayaran mereka pascaperang Irak tahun 2003? Kedua, bagaimana praktik bisnis tentara bayaran yang dilaksanakan oleh AS pascaperang Irak tahun 2003? Dan, ketiga, bagaimana prospek serta tantangan bisnis tentara bayaran AS di Irak pada masa yang akan datang?

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ekonomi neoliberal serta teori pemerintahan korporatisme. Keduanya adalah teori ekonomi politik. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Pertama, terdapat hubungan yang kuat antara pihak korporasi dengan para politisi dari Partai Republik di AS yang menyebabkan pihak korporasi dapat melaksanakan bisnis tentara bayaran di Irak pascaperang. Kedua, bisnis tentara bayaran tersebut, dilakukan melalui pintu proyek rekonstruksi Irak pascaperang. Ketiga, prospek bisnis tentara bayaran di Irak pada masa yang akan datang sangat bergantung kepada karakter rezim yang berkuasa. Presiden Barrack Obama memang berjanji untuk menarik pasukan militer dari Irak, tetapi di sisi lain, dia cenderung mempertahankan tentara bayaran AS di Irak untuk mengamankan infrastruktur minyak yang sudah mereka kuasai.

Kata kunci: Tentara Bayaran, PMC (Private Military Company), Neoliberalisme

ABSTRACT

Name : Wirawan Sukarwo
Study Program : Politic and International Relation in Middle East
Title : Corporate Domination of The United States Government Policy in
The Middle East: Case Study The Mercenaries Bussiness During
Postwar Iraq in 2003

This thesis speaks about the corporate domination of the United States government policy in the Middle East, in the case study the mercenaries business during postwar Iraq in 2003. This research is focused in three main questions. First, why did the United States corporate mercenaries be able to conduct their business during postwar Iraq on year 2003? Second, how did the United States run their Mercenaries Business during postwar Iraq on year 2003? And the Third, what is the prospect for the US mercenaries business in Iraq and their challenges ahead?

To analyze the subject, this research is using the neo-liberal economic theory and the theory of state corporatism; both are the theory of political economy. By using the qualitative method through study case analysis, this research has finally come into three conclusions. First, there is a strong connection between the corporation and the US Republican politicians that make the corporations were able to conduct their mercenaries business during postwar Iraq. Second, the business was held by the mean of the postwar reconstruction project in Iraq. Third, the prospect of the mercenaries business will be strongly depending on the characteristic of the ruling government. Though President Barrack Obama had promised to withdraw the US Army from Iraq, he tends to maintain the US mercenaries so that they will be able to keep the Iraq Oil secured at their hands.

Keywords: Mercenaries, PMC (Private Military Company), Neoliberalism.

الخلاصة

الاسم : ويرawan سوكاروو
برنامج الدراسة : السياسة والعلاقة الدولية في الشرق الأوسط
الموضوع : السيطرة الشركية في سياسات حكومة الولايات المتحدة
على منطقة الشرق الأوسط:
دراسة حالة في الأعمال التجارية للجنود المستأجرة بعد
حرب العراق سنة ٢٠٠٣ م

هذه الرسالة النظرية تبحث السيطرة الشركية في سياسات حكومة الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط بدراسة حالة في الأعمال التجارية للجنود المستأجرة بعد حرب العراق سنة ٢٠٠٣. أما تركيز القضايا في هذا البحث يتخلص إلى ثلاثة الأسئلة التالية: أولاً، لماذا الشركات الأمريكية تستطيع أن توظف الجنود المستأجرة أعمالاً تجارية بعد حرب العراق سنة ٢٠٠٣ م؟ ثانياً، كيف عملت أعمال الجنود المستأجرة التي تفعلت الحكومة الأمريكية بعد حرب العراق سنة ٢٠٠٣ م؟ ثالثاً، كيف احتمالات أعمال الجنود المستأجرة الأمريكية في العراق وتحدداتها في المستقبل؟ إن النظرية المستعمال لهذا التحليل هي نظرية الحرية الجديدة في الاقتصاد ونظرية الحكومية الشركية. إنهما نظريتا الاقتصاد السياسي. باستعمال الطريقة النوعية أي الدراسة الحالة، يستسلم هذا البحث بعض الخلاصات التالية: أولاً، توجد العلاقة الوثيقة بين الشركات والسياسيين من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يسببون الشركات تستطيع أن توظف الجنود المستأجرة أعمالاً تجارية بعد الحرب. ثانياً، تلك الأعمال التجارية تُنفذ بطريقة مشروع تمييز العراق بعد الحرب. ثالثاً، احتمال تلك الأعمال التجارية في المستقبل يعتمد على مواصفات النظام الحاكم. لقد وعد الرئيس باراك أوباما على ذلك الحال بالانسحاب القوات العسكرية من العراق، ولكنه يميل إلى الحفاظ على الجنود المستأجرة الأمريكية في العراق ليحفظ التركيب الأساسي لحقول النفط المسيطر.

الكلمات الرئيسية : الجنود المستأجرة، شركة عسكرية خاصة، مذهب الحرية الجديد.

KATA PENGANTAR

Seperti sudah menjadi takdir, invasi AS ke Irak tahun 2003 terjadi pada saat saya sedang duduk di bangku kuliah. Masa-masa itu adalah saat dimana saya sedang asik-asiknya menggeluti studi Timur Tengah. Invasi tersebut membuat saya lebih mudah untuk fokus terhadap kompleksitas konflik yang terjadi di kawasan ini. Seperti takdir juga, invasi itu menggiring saya untuk lebih menggeluti studi tentang politik Timur Tengah khususnya yang berkaitan dengan peranan AS terhadap kawasan.

Sejak George W. Bush berpidato di atas sebuah kapal induk dan mengatakan "the war is over" sebenarnya pada saat itulah perang baru saja dimulai. Invasi yang sesungguhnya, benar-benar terjadi beberapa bulan setelah AS mengumumkan kemenangannya dalam invasi. Invasi yang dimaksud adalah penguasaan infrastruktur minyak Irak lewat berbagai macam proyek rekonstruksi pascaperang. Dari proyek besar inilah perusahaan seperti Halliburton dan Chevron menunjukkan wujud aslinya sebagai pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap invasi AS. Tahun-tahun berikutnya, masyarakat dunia mulai ramai menerbitkan buku atau jurnal yang membongkar skandal konspirasi antara pihak korporasi di AS dengan para politisi negara itu.

Kehadiran tentara bayaran adalah bagian dari konteks permasalahan di atas. Mereka (tentara bayaran) menjadi bukti betapa beringasnya ambisi ekonomi AS untuk menguasai minyak Irak. Pemerintah AS menyewa jasa tentara bayaran melalui perusahaan penyedia tentara bayaran untuk mengamankan investasi perusahaan asal AS yang ada di Irak. Selain itu, para tentara bayaran ini juga disewa untuk menjaga aset politik pemerintah AS di Irak.

Tesis ini membahas bagaimana pihak korporasi begitu mendominasi arah kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah. Kepentingan korporatisme ini menemukan bentuknya yang paling sempurna pada era kekuasaan George W. Bush. Pada masa presiden Bush-lah segala macam kebijakan kontroversial yang terkait dengan isu Timur Tengah dikeluarkan, termasuk invasi ke Irak tahun 2003. Dengan kedigdayaan ekonomi yang mereka miliki, Amerika Serikat betul-betul memberikan pengaruh kuatnya ke setiap konflik yang ada di kawasan ini.

Saya bersyukur kepada Allah SWT. yang hanya atas izin-Nyalah saya bisa menyelesaikan tesis ini. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu, dan adik perempuan saya di rumah yang selalu secara bergantian bangun dari tidur mereka untuk membukakan pintu ketika saya pulang terlalu larut.

Para pengajar program studi Timur Tengah dan Islam di UI, Bapak Achmad Ramzy Tadjoedin, Bapak Muhammad Luthfi Zuhdi, Bapak Hamdan Basyar, Bapak Zainudin Dja'far, Bapak Soesiswo Soenarko, Bapak Moehammad Noer, Bapak Hanief Saha Ghafur serta para pengajar lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka inilah generasi yang telah terlebih dahulu peduli terhadap kawasan Timur Tengah.

Gita Romadhona Mawardi, perempuan yang selalu setia menunggu saat-saat saya berbahagia. Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan sentuhannya. Terima kasih untuk semua perhatian yang diberikan dan untuk semua perasaan yang terbalas.

Terima kasih untuk Iwied, teman yang tidak bisa digantikan dengan apapun atau siapapun. Teman yang selalu membukakan pintu kosannya ketika saya ingin beristirahat sejenak dalam perjalanan Bekasi – Depok.

Teman-teman saya di jurusan Politik & Hubungan Internasional UI, Anwar Nuris, Khalifatullah Khawarizmi dan Bapak Aliardo. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan sampai pada titik ini.

Staff dan “kru” PSTTI UI, Mas Ferry, Mas Aras, Mas Erwin, Mba Herin, Mba Tuti, Mas Teng, Mas Khoir dan lain-lain yang sudah mau direpotkan selama saya menjalani perkuliahan.

Rekan-rekan Mampang Studies yang selalu memberi pemahaman baru lewat diskusi-diskusi hebat kita, khususnya Aulia yang selalu menyuplai kebutuhan saya akan buku-buku langka yang sangat saya perlukan dalam penulisan buku ini.

Pusat Studi Timur Tengah dan Islam UI, Pak Luthfi (mantan ketua), Pak Basuni (ketua sekarang) dan Mas Ivan, peneliti yang selalu setia menjaga ruangan PSTTI UI, yang memberikan saya beberapa jurnal dan buku yang berharga. Terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk menggunakan fasilitas komputer dan internet.

Teman-teman seangkatan Sastra Arab UI. Mereka inilah yang selalu memberi nasihat satu sama lain, menginspirasi satu sama lain dan memberikan

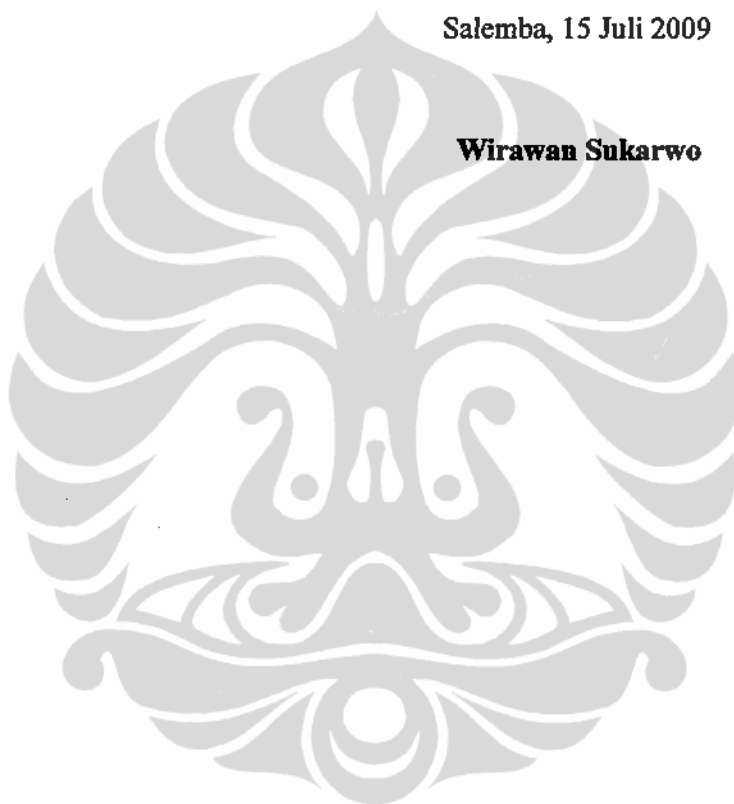
kerinduan untuk selalu berkumpul. Untuk laskar “ta marbutoh”, Azizah, Khodijah, Hanifah, Sittah, Nur Laily Nusrach terima kasih atas doa-doa yang diberikan. Teman-Teman UKM Taekwondo UI yang memberikan saya tempat untuk berlatih dan tetap sehat selama pengerjaan tesis ini. Teman-teman Taekwondo FIB UI yang selalu mendukung saya dan menghibur di saat-saat *deadline*.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya untuk menulis tesis ini.

Wassalam,

Salemba, 15 Juli 2009

Wirawan Sukarwo



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACT	iv
الخلاصة	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Definisi Konsep Kunci	8
1.5 Kerangka Pemikiran	8
1.6 Sistematika Pembahasan	11
BAB 2 TINJAUAN TEORETIS	13
2.1 Pengantar	13
2.2 Teori Neoliberalisme	16
2.2.1 Neoliberalisme Menurut F.A. Hayek	16
2.2.2 Neoliberalisme Menurut Milton Friedman	18
2.2.3 Perkembangan Neoliberalisme Amerika Serikat	22
2.3 Teori Pemerintahan Korporatisme	28
2.3.1 Pemerintahan Korporatisme Menurut Phillip Schmitter.....	31
2.3.2 Korporatisme Menurut Guilermo A. O'Donnell.....	34

BAB 3 METODOLOGI DAN DATA PENELITIAN.....	39
3.1 Pengantar	39
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	42
3.2.1 Batasan Objek Masalah	42
3.2.2 Karakteristik Data	44
3.3 Paradigma Penelitian	45
3.4 Metode Penelitian	47
3.4.1 Metode Pengumpulan Data	48
3.5 Analisis Data Kasus.....	50
BAB 4 BISNIS TENTARA BAYARAN PASCA-PERANG IRAK TAHUN 2003	57
.....	57
4.1 Kebijakan Invasi Irak Tahun 2003.....	57
4.1.1 Pengangkatan Isu Demokratisasi dan Terorisme.....	57
4.2 Dominasi Korporasi pada Kebijakan Perang George W. Bush	65
4.2.1 Dukungan Sejak Kampanye.....	65
4.2.2 Pembentukan Kabinet Korporatis (Pemerintahan Korporatisme)	77
4.2.3 Motif Kepentingan Ekonomi dan Israel di balik Invasi.....	83
4.2.3.1 Motif Ekonomi	84
4.2.3.2 Kepentingan Israel	86
4.3 Proyek Tentara Bayaran AS di Irak.....	92
4.3.1 Proyek Rekonstruksi Irak	92
4.3.2 Perusahaan Penyedia Tentara Bayaran.....	99
4.3.2.1 Halliburton.....	102
4.3.2.2 Blackwater	109
4.3.2.3 DynCorp	118
4.4 Prospek dan Tantangan Bisnis Tentara Bayaran AS di Masa Depan.....	122
4.4.1 Reorientasi War On Terror.....	124

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jika dilihat dari aspek ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi, Timur Tengah adalah sebuah kawasan yang strategis di dunia. Di wilayah inilah, berbagai peradaban lahir dan berkembang. Sejak ditemukannya minyak bumi dan gas alam sekitar tahun 1930an wilayah ini menjadi semakin strategis. Apalagi, wilayah Timur Tengah merupakan tempat bertemunya tiga benua besar di dunia, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika.

Sejak berdirinya Israel di tanah Palestina tahun 1948, konflik di sekitar wilayah Timur Tengah terus terjadi. Dengan segala potensi yang dimiliki wilayah ini, banyak negara-negara besar melibatkan diri dalam konflik-konflik yang terjadi. Salah satu negara besar yang selalu terlibat secara intensif adalah Amerika Serikat. Setiap konflik atau perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah hampir selalu melibatkan Amerika Serikat di dalamnya.

Pada masa perang dingin, terjadi sebuah perlombaan senjata antara Blok Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dengan Blok Timur, yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua negara adidaya ini sering terlibat secara tidak langsung dalam setiap konflik dan perang yang ada di Timur Tengah dalam kerangka

persaingan ideologi dan kepentingan mereka. Salah satu instrumen yang digunakan kedua negara tersebut adalah penjualan senjata.

Setelah Uni Soviet bubar pada awal 1990-an, Amerika Serikat menghadapi sebuah zaman baru. Berakhirnya era perang dingin menandai berakhirnya juga era mempersenjatai wilayah-wilayah yang bertikai dalam kerangka perang dingin. Negara-negara di dunia, termasuk Timur Tengah, yang tadinya bergantung kepada senjata-senjata Amerika Serikat atau Uni Soviet, semakin bebas dalam membangun sistem persenjataannya. Hal ini menimbulkan masalah baru bagi Amerika Serikat karena mereka terlanjur memproduksi senjata dalam jumlah yang banyak (*overproduction*). Mereka dibayang-bayangi kerugian besar karena jumlah senjata yang mereka miliki, beserta prototipe dan proyek jangka panjangnya, terancam tidak terjual. Padahal, anggaran untuk mengembangkan dan memproduksi senjata-senjata tersebut sangat besar. Melihat situasi seperti ini, Amerika Serikat membutuhkan pasar baru untuk menjual produk senjatanya.

Sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia. Dengan segala kekuatan dan potensi yang mereka miliki, wilayah Timur Tengah berada dalam ketiak hegemoni mereka. Proses demokratisasi dan perang terhadap terorisme menjadi alat yang ampuh untuk menancapkan pengaruh mereka di Timur Tengah. Kedua hal tersebut selalu ditampilkan beriringan saat Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan di Timur Tengah. Apabila dianalogikan dengan sebuah parcel isi buah, keranjangnya adalah demokrasi, sedangkan pita hiasannya adalah terorisme. Sementara itu, yang menjadi buah-buahan sebagai isi dari parcel adalah neo-liberalisme (kapitalisme global di bawah Amerika Serikat). Buah-buahan inilah (neo-liberalisme) yang saat ini dikonsumsi oleh kebanyakan negara di Timur Tengah.

Paham neo-liberalisme tidak hanya berimbas pada visi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi juga memiliki pengaruh pada konstelasi politik domestik dalam negeri mereka. Salah satu yang menjadi ciri khas neo-liberalisme

adalah kekuatan sektor swasta yang mengalahkan atau mengecilkan peran negara. Dalam konteks Amerika Serikat di bawah George W. Bush, kepentingan korporasi telah masuk ke dalam lingkaran pemerintahan pusat. Hal itu kemudian memengaruhi banyak kebijakan pemerintah terkait dengan perang di Timur Tengah.

Orang-orang, seperti Wakil Presiden Dick Cheney, adalah mantan pemimpin perusahaan yang kemudian masuk ke dalam lingkaran elite pemerintah. Naluri bisnis dan orientasi keuntungan yang mereka miliki, disalurkan selama masa jabatan mereka di pemerintahan. Mereka menjadi mediator yang meloloskan kepentingan pihak korporasi dalam kerangka kebijakan pemerintah pusat. Koneksitas yang sangat kuat antara pihak korporasi dengan negara (pemerintah) melalui orang-orang seperti Dick Cheney sudah menjadi fenomena dalam rezim pemerintahan George W. Bush.

Penelitian ini tidak membicarakan bagaimana Amerika Serikat menjadikan demokrasi dan terorisme sebagai alat untuk menciptakan tatanan Timur Tengah yang baru. Penelitian ini hanya akan membahas salah satu aspek yang menjadi keuntungan tambahan Amerika Serikat dalam melakukan proses "demokratisasi" di Timur Tengah. Keuntungan tambahan tersebut diperoleh dari bisnis militer mereka dalam perang-perang di Timur Tengah. Bisnis militer tersebut dilaksanakan melalui koneksitas antara korporasi dengan negara dalam pemerintahan AS. Dalam konteks yang lebih luas, pembahasan tersebut berada dalam kerangka derivasi paham neo-liberalisme global.

Salah satu perang yang menjadi lahan bisnis militer AS adalah invasi atas Irak pada 2003. Penulis membedakan aktivitas bisnis militer pada perang Irak menjadi dua jenis, yaitu bisnis militer negara dan bisnis militer korporasi. Bisnis militer negara berarti segala aktivitas militer yang mendatangkan keuntungan bisnis dan dilaksanakan oleh instansi militer resmi pemerintahan sebuah negara. Salah satu contoh aktivitas tersebut adalah uji coba dan demonstrasi produk persenjataan. Pada perang tersebut, senjata-senjata yang sudah terlanjur

diproduksi oleh Amerika Serikat, baik yang sudah masuk dinas resmi atau yang belum, mendapatkan kesempatan secara langsung untuk diuji sekaligus didemonstrasikan kepada dunia internasional.

Perang Irak sendiri pun kemudian dijadikan sebagai media uji coba produk militer. Dari uji lapangan dan demonstrasi tersebut, setiap senjata yang diikutsertakan akan mendapatkan predikat *battle proven* (teruji dalam perang). Predikat ini penting untuk dijadikan alat penawaran pada pemasaran senjata-senjata tersebut. Beberapa waktu lalu, pameran produk pertahanan yang diadakan di Indonesia (*Indo Defence*)¹ menjadi bukti nyata tentang hal ini. Dalam pameran tersebut, terpasang poster-poster produk militer AS dengan latar belakang perang di wilayah gurun. Poster-poster itu jelas menunjukkan bahwa gambar yang menjadi latar belakang adalah perang Irak.

Setiap produk AS yang paling canggih harus diberi predikat *battle proven*. Sebagai contoh, pembuatan pesawat tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle*) yang sudah selesai sejak tahun 1995.² Sejak selesai dibuat, pesawat ini belum teruji sama sekali dalam sebuah pertempuran sungguhan. Oleh karena itu, perang Irak merupakan sarana yang pas untuk menguji ketangguhan pesawat ini sebelum dipasarkan. Hal yang sama juga berlaku pada produk-produk militer AS yang lain.

Bentuk bisnis militer berikutnya adalah yang dilakukan oleh pihak korporasi swasta. Perusahaan-perusahaan swasta asal Amerika Serikat adalah pelaku utama aktivitas bisnis tersebut. Pasca-invasi menjadi kesempatan tersendiri untuk melaksanakan bisnis militer mereka. Dengan memanfaatkan proyek-proyek rekonstruksi Irak, AS melalui korporasi-korporasinya berhasil meraup berbagai keuntungan dalam bisnis militer mereka. Banyaknya perusahaan pengelola tentara bayaran di Irak menjadi suatu fenomena yang tidak bisa disembunyikan.

Hal yang menjadi perbedaan mendasar antara bisnis militer saat perang dengan masa sesudahnya adalah pihak yang melaksanakan bisnis tersebut. Pada

¹ Pameran Pertahanan *Indo Defence*, Bulan November tahun 2007

² *Aviation Week & Space Technology*, 26 Maret 2004

saat invasi, militer AS bertindak sebagai pelaku utama serangan dengan menggunakan peralatan perang yang menjadi andalan mereka. Kemudian, senjata-senjata itu akan mendapatkan predikat yang baik di pasar internasional dan akan menguntungkan pemerintahan AS secara ekonomi.

Sebelum diinvasi oleh Amerika Serikat, Irak adalah sebuah negara yang sudah lemah secara ekonomi dan militer. Dari segi militer, Irak hanya mengandalkan persenjataan lama, yang merupakan sisa peninggalan perang teluk tahun 1991. Bahkan, banyak persenjataan Irak, yang berasal dari Uni Soviet (saat ini Rusia), merupakan senjata sisa perang dunia kedua.³ Hal itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Amerika Serikat ketika menginvasi Irak. Dengan kondisi Irak yang seperti itu, Amerika dapat sekaligus menunjukkan kehebatan senjata mereka dibandingkan dengan senjata Uni Soviet, yang juga masih memproduksi senjata sampai sekarang.

Pada saat invasi dinyatakan berakhir, AS tetap melakukan bisnis militer mereka dalam bentuk yang lain. Mereka menjalankan bisnis militer untuk mengamankan aset ekonomi dan politik di Irak dari gangguan golongan penentang invasi. Untuk menjalankan misi tersebut, AS tidak bisa menggunakan pasukan militer resmi negara mereka disebabkan adanya pasal dalam Konvensi Jenewa yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, AS menyewa perusahaan-perusahaan penyedia tentara bayaran dari negara mereka untuk menjalankan proyek pengamanan.

Tentara bayaran yang dimaksud di sini adalah sekelompok pasukan tempur yang disewakan oleh perusahaan swasta. Mereka sama sekali bukan bagian dari institusi militer Amerika Serikat. Sebutan tentara bayaran tidak menunjukkan mereka adalah bagian dari militer walaupun pada hakikatnya setiap personel tentara dalam dinas militer pasti mendapatkan bayaran. Mereka

³ *Flight International*, 26 November–2 Desember 2002, hlm. 53

mendapatkan bayaran dari perusahaan-perusahaan swasta yang menjalankan manajemen kerja mereka secara profesional.

1.2 Fokus Masalah Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi tema sentral pembahasan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah adanya praktik bisnis tentara bayaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta asal Amerika Serikat pasca-invasi AS ke Irak tahun 2003. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut memperoleh tender proyek rekonstruksi pasca-perang dari pemerintahan AS.

Proyek rekonstruksi pasca-perang yang dimaksud adalah proyek pembangunan kembali Irak setelah dilanda perang. Perang yang dimaksud adalah invasi AS ke Irak yang berlangsung sejak Maret hingga April 2003. Invasi ini telah menguras dana yang sangat besar dari anggaran negara Amerika Serikat.⁵ Untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan tersebut, AS menjalankan praktik bisnis rekonstruksi pasca-perang di Irak. Proyek rekonstruksi ini sekaligus untuk menjamin penguasaan AS terhadap aset-aset ekonomi di Irak seperti tambang minyak dan perusahaan minyak AS.

Pada saat invasi dinyatakan berakhir, dengan ditangkapnya Saddam Hussein beserta segenap elite pemerintahannya, AS memulai proyek rekonstruksi pasca-perang mereka. Proyek rekonstruksi ini melibatkan banyak perusahaan AS yang bergerak di sektor energi, properti, dan militer. Proyek tersebut merupakan proyek dengan dana yang sangat besar dan meliputi berbagai sektor pembangunan. Proyek rekonstruksi Irak itu ditenderkan kepada pihak korporasi swasta. Hal itu

⁵ Menurut Joseph Stiglitz, anggaran yang dikeluarkan pemerintah AS untuk perang Irak mencapai angka tiga triliun dolar. Joseph Stiglitz, *Perang Tiga Triliun Dolar: Bencana Ekonomi di Balik Invasi Amerika ke Irak* (terj: M.Rudi Atmoko), Bandung: Mizan, 2009.

merupakan bentuk kepatuhan AS terhadap aturan PBB yang melarang negara penginvansi memiliki kepentingan jangka panjang di wilayah invasinya. Berdasarkan aturan tersebut, AS membuka tender proyek kepada pihak korporasi di dunia untuk melaksanakan proyek rekonstruksi pasca-perang.

Tender yang dilakukan oleh pemerintah AS ternyata dimenangi oleh banyak perusahaan swasta asal AS. Korporasi-korporasi swasta yang menjalankan proyek rekonstruksi di Irak menjadi perpanjangan tangan kepentingan ekonomi AS. Salah satu proyek besar pada masa rekonstruksi adalah proyek pengamanan aset ekonomi. Proyek tersebut menggunakan para tentara bayaran yang tergabung dalam perusahaan penyedia tentara bayaran (*private military company*). Para tentara bayaran ini, kemudian melakukan misi-misi pengamanan seperti halnya militer resmi negara. Misi pengamanan yang dijalankan meliputi pengamanan terhadap aset ekonomi perusahaan serta aset politik pemerintahan AS di Irak.

Dari proyek rekonstruksi pasca-perang yang mereka dapatkan, perusahaan-perusahaan tersebut melaksanakan praktik bisnis militer mereka di Irak. Mereka membagi keuntungan kepada elite-elite pemerintah yang mendukung aktivitas bisnis mereka. Keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan itu secara tidak langsung merupakan pemasukan bagi kas negara Amerika Serikat.

Dari penjabaran masalah di atas, hal-hal yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini, dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan sebagai berikut.

1. Mengapa pihak korporasi AS bisa menjalankan bisnis tentara bayaran mereka pascaperang Irak tahun 2003?
2. Bagaimana praktik bisnis tentara bayaran yang dilaksanakan oleh AS pascaperang Irak tahun 2003?
3. Bagaimana prospek dan tantangan bisnis tentara bayaran AS di Irak pada masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah implementasi dari perumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan, antara lain sebagai berikut.

1. Memahami bagaimana Amerika Serikat menciptakan peluang bagi pihak korporasi untuk masuk dan melaksanakan bisnis militer mereka di Irak.
2. Memahami bagaimana Amerika Serikat melaksanakan praktik bisnis militer mereka dan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut.
3. Menjelaskan prospek dan tantangan bisnis tentara bayaran AS di Irak pada masa yang akan datang.

1.4 Definisi Konsep Kunci

Dalam bahasa Indonesia, *mercenaries* diartikan sebagai tentara bayaran. Istilah ini belum sepenuhnya tepat, karena masih menciptakan ambiguitas dalam pendefinisian *mercenaries* itu sendiri. Dalam butir ketiga pasal 47, Protokol tambahan Konvensi Genewa, *mercenary* diartikan sebagai orang yang mengambil bagian dalam konflik-konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan yang dijanjikan oleh salah satu pihak dalam konflik tersebut. Keuntungan tersebut melebihi kompensasi material yang diberikan kepada pejuang yang setingkat dari angkatan bersenjata pihak tersebut.

Berdasarkan definisi internasional di atas, yang dimaksud dengan istilah tentara bayaran dalam penelitian ini adalah pasukan tempur yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan swasta (Private Military Company). Mereka bukan bagian dari institusi militer sebuah negara dan mereka sepenuhnya sudah menjadi elemen sipil sekalipun pernah menjadi tentara.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan dititikberatkan pada aspek peran dan strategi pihak korporasi di

Amerika Serikat dalam menjalankan bisnis militer mereka pascaperang Irak. Analisis yang akan dilakukan berada dalam konteks teori besar tentang ekonomi neoliberalisme. Dalam konteks neoliberalisme, penelitian ini akan menjelaskan kaitan mekanisme pasar dengan kebijakan politik sebuah negara.

Saat ini, paham ekonomi neoliberal, yang merupakan bentuk paling kontemporer dari sistem ekonomi kapitalisme global, telah menjadi fenomena di dunia. Paham ini merupakan pengembangan sistem ekonomi kapitalisme pasar yang sudah berkembang lebih dulu. Sistem ekonomi kapitalisme sendiri memang menempatkan para pemilik modal (*capital*) memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Hal itu senada dengan pendapat Peter L. Berger yang mengatakan bahwa kapitalisme merupakan kegiatan produksi yang diorientasikan untuk kepentingan pasar dan dilakukan oleh individu atau bersama-sama dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya.⁶

Jauh sebelumnya, para pemikir sistem kapitalisme klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo telah memulai gagasan ide kapitalisme ini sebagai sistem baru yang menyerahkan aktivitas ekonomi pada mekanisme pasar. Selain itu, Adam Smith juga sudah memulai gagasan tentang pembebasan aktivitas ekonomi dari intervensi pemerintah (negara). Saat itu, ide dan gagasan Adam Smith menjadi rujukan sistem ekonomi Inggris yang kemudian tersebar luas ke seluruh dunia. Paham ini menitikberatkan sistem perekonomian pada mekanisme pasar dan kehilangan peran pemerintah.

Salah satu hal yang membedakan kapitalisme klasik dengan kapitalisme neoliberal adalah semangat pelaku perekonomian. Sistem ekonomi kapitalisme klasik yang digagas oleh Adam Smith berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurutny, kapitalisme akan membuat perekonomian lebih dinamis dan merangsang kreativitas masyarakat yang nantinya akan menciptakan kesejahteraan itu sendiri. Adam Smith tidak menghilangkan sama sekali peran

⁶ Peter L. Berger, *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions About Prosperity, Equality And Liberty*, New York: 1986, hlm.19

pemerintah, tetapi justru menempatkan pemerintah sebagai regulator sekaligus penyelamat dalam kondisi darurat. Artinya, pihak swasta (korporasi) bersama dengan pemerintah memiliki orientasi yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, paham neoliberal telah mengubah drastis wajah sistem kapitalisme yang digagas oleh Adam Smith. Orientasi kesejahteraan yang seharusnya dimiliki oleh pelaku perekonomian berubah menjadi keserakahan yang menomorsatukan keuntungan. Pihak swasta (korporasi) menjadi penguasa baru dalam sebuah negara yang kadang kekuasaannya melebihi negara itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah menjadi pihak yang selalu memprioritaskan kepentingan korporasi besar, bukan berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat. Intervensi pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi justru difokuskan terhadap penyelamatan aset dan kepentingan pihak korporasi tersebut.

Hubungan yang terjalin antara pihak korporasi dengan pemerintahan AS dapat disebut korporatisme negara. Hal itu merujuk kepada penjelasan Martin N. Marger yang berpendapat;

*"The capitalist do not necessarily govern, in the sense of occupying political offices, but that they rule, by controlling political officials and institutions."*⁷

Dalam pengertian tersebut, kelas pemilik modal menguasai negara melalui kontrol terhadap para birokrat yang berada di pos-pos strategis negara. Pengertian itu juga selaras dengan fenomena pemerintahan korporatisme pada era Presiden George W. Bush yang dianggap sangat dipengaruhi kepentingan korporasi.

Fenomena dominasi kepentingan korporasi dalam struktur pemerintah juga terjadi pada negara seperti Amerika Serikat. Struktur pemerintahan AS pada masa George W. Bush, banyak diisi oleh para pimpinan atau mantan pimpinan korporasi besar negara tersebut. Sebagai contoh, Wakil Presiden AS, Dick Cheney adalah mantan CEO Halliburton, sebuah perusahaan besar di bidang konstruksi dan pertambangan. Selain itu, Menteri Luar Negeri, Condoleeza Rice, adalah

⁷Martin N. Marger, *Elites and Masses: An Introduction to political Sociology*, Wadsworth, 1987, hlm. 42

mantan Direktur perusahaan Chevron yang bergerak di pertambangan minyak bumi.⁸

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis bagaimana pihak korporasi bisa meloloskan kepentingan bisnisnya dalam kebijakan politik luar negeri AS di Irak. Dengan merujuk kepada teori pemerintahan korporatisme dan paham neoliberalisme, penelitian ini akan menjelaskan aspek-aspek yang menciptakan fenomena bisnis tentara bayaran pascaperang Irak yang dilakukan oleh pihak korporasi swasta AS. Konsep korporatisme negara akan membantu menjelaskan bagaimana hubungan pihak birokrat pemerintahan AS dengan korporasi dalam konteks sebuah kebijakan luar negeri. Sementara itu, teori neoliberalisme akan membantu menganalisis praktik bisnis tentara bayaran yang dilakukan oleh PMC (*Private Military Company*) di Irak.

1. 6 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan alur-pikir pembahasan tesis ini, maka tesis ini akan dibagi ke dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Pembagian bab dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

- BAB 1 : Pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, definisi konsep kunci, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan tesis.
- BAB 2 : Kerangka teori: teori neoliberalisme dan teori pemerintahan korporatisme.
- BAB 3 : Metodologi dan data penelitian, yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, batasan objek masalah, karakteristik data penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data kasus, dan paradigma penelitian.

⁸Dhuroruddin Mashad dkk, *Saddam Melawan Amerika*, Jakarta: Pensil-324, 2005, hlm.156

BAB 4 : Penjabaran data penelitian serta analisisnya yang terdiri dari perencanaan invasi, tender rekonstruksi, dan bisnis tentara bayaran pascaperang.

BAB 5 : Saran dan kesimpulan



BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Pengantar

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai bisnis tentara bayaran pascaperang Irak tahun 2003, akan dikaitkan dengan teori pemerintahan korporatisme dan neoliberalisme. Pengaitan ini, sekaligus akan menjadikan penelitian ini sebagai bahan diskusi di bidang ekonomi-politik. Teori-teori yang digunakan untuk membantu analisis merupakan teori ekonomi-politik yang sudah banyak dikaji. Fokus penggunaan teorinya terletak pada interaksi antara negara (politik) dan korporasi (ekonomi)

Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, kedua kajian, yaitu ekonomi dan politik memang tidak dapat dipisahkan. Keduanya terkait erat dengan analisis yang akan dibuat. Hubungan antara kedua disiplin ilmu, yaitu ekonomi dan politik telah melahirkan sintesis disiplin ilmu terapan, yaitu ekonomi-politik.

Ada banyak pendekatan yang dapat dipakai untuk menelaah sebuah konsep ekonomi politik di dunia saat ini. Dua pendekatan yang paling populer adalah pendekatan klasik dan pendekatan neoklasik. Kedua pendekatan itu merupakan yang paling relevan dengan konstruksi penelitian ini karena keduanya menekankan pada permasalahan seputar mekanisme pasar. Secara lebih sederhana, pendekatan klasik dekat dengan teori ekonomi klasik yang digagas

oleh Adam Smith, yang kemudian memulai era ekonomi liberal. Di lain pihak, pendekatan neoklasik dekat dengan teori ekonomi baru, yang sering disebut sebagai bentuk paling canggih dari ekonomi klasik liberal yang sering disebut neoliberal.

Pendekatan klasik dalam ekonomi politik menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri dalam arti kuat (*strong sense*). Pandangan seperti itu sering dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan *laissez faire* (dari bahasa Prancis yang berarti 'biarkan bekerja'). Istilah ini kemudian berkembang menjadi perdagangan bebas atau pasar bebas.

Para teoritis klasik adalah golongan yang kali pertama memandang perekonomian sebagai sebuah sistem yang secara prinsip terpisah dari politik rumah tangga/keluarga. Mereka beranggapan bahwa sistem pasar adalah sebuah realita yang *sui generis* (mampu menciptakan dirinya sendiri atau akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia). Mengenai hubungannya dengan negara, pasar dianggap memiliki hubungan dengan negara, tetapi bukan merupakan organ dari negara.

Pandangan para teoritis klasik ini menjadi sebuah inovasi di zamannya dan banyak diadopsi oleh negara-negara besar. Namun, hal yang menjadi catatan adalah, pandangan ini telah membuat definisi istilah ekonomi-politik menjadi kurang jelas. Pokok pikiran yang diajukan oleh para teoritis klasik adalah bahwa ekonomi tidak perlu bersifat politik. Artinya, ekonomi tidak melibatkan diri dalam pertarungan politik sebuah negara. Lebih jelasnya, menurut James A. Caporaso, dengan bangkitnya sistem kapitalisme di dunia, ekonomi menjadi ter-de-politisasi atau kehilangan sifat politiknya.⁹ Dalam perkembangan selanjutnya, dengan munculnya teori klasik, istilah ekonomi menggeser istilah ekonomi politik.

Pendekatan selanjutnya dalam ilmu ekonomi politik adalah pendekatan neoklasik yang muncul pada akhir abad ke-19. Pendekatan ini masih tetap

⁹James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. xi

menggunakan dasar pandangan klasik, yaitu memandang sebuah sistem yang berdiri sendiri. Hal yang membedakannya dengan pandangan klasik adalah tidak lagi menggunakan skema analisis dari pendekatan klasik melainkan menggunakan filsafat utiliterian. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa sifat dasar dan tujuan dari ekonomi pasar.

Pendekatan neoklasik mendefinisikan hubungan antara politik dengan ekonomi berdasarkan ide tentang kegagalan pasar. Kegagalan pasar sendiri didefinisikan dengan menggunakan konsep pilihan pribadi dan penggunaan sumber daya secara efisien. Bagi para pemikir neo-klasik, ekonomi diartikan sebagai transaksi-transaksi swasta yang dilakukan untuk memaksimalkan kegunaan yang didapatkan individu. Sementara itu, politik diartikan sebagai penggunaan kewenangan publik untuk mencapai tujuan yang sama dengan swasta.

Pendekatan neoklasik, seperti yang ditulis oleh James A. Caporaso, memandang substansi proses politik dan keputusan politik sebagai perilaku memaksimalkan keuntungan pribadi serta pilihan rasional yang dilakukan individu. Dengan pendekatan ini, tidak ada pemisahan antara ekonomi dan politik seperti halnya yang diajukan oleh teori klasik. Pendekatan neoklasik tidak lagi memandang bahwa tanggung jawab untuk urusan ekonomi harus diserahkan kepada kewenangan publik. Pendekatan ini memandang politik sebagai sebuah bentuk penerapan dari logika ekonomi. Pendekatan ekonomi terhadap politik ini kemudian mengeksplorasi secara lebih luas berbagai implikasi dari teori neoklasik terhadap cara kita memahami hubungan antara bidang ekonomi dengan bidang politik.

Pendekatan ekonomi politik klasik dan neoklasik mendasarkan pemikiran kepada konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan neoklasik adalah yang paling relevan sebagai konstruksi pendekatan teori ekonomi politik dalam penelitian ini. Alasannya adalah kedekatannya dengan perkembangan ekonomi politik global dewasa ini. Perkembangan kapitalisme global yang memuja kekuatan pasar telah melibatkan

politik sebagai salah satu instrumen utama. Salah satu negara yang tepat untuk dijadikan contoh perkembangan kapitalisme global adalah Amerika Serikat.

2.2 Teori Neoliberalisme

Istilah neoliberalisme merupakan istilah yang belum lama populer di dunia. Istilah ini mulai dikenal ketika masyarakat dunia melihat gejala baru yang belum pernah ada sebelumnya di bidang ekonomi. Gejala yang dimaksud adalah gerakan yang serentak mengarah kepada pemujaan pasar atau fundamentalisme pasar. Gejala ini memunculkan golongan yang begitu yakin bahwa seluruh kehidupan dapat tunduk di bawah "kekuatan pasar". Dalam kajian teori ekonomi-politik, neoliberalisme merupakan salah satu kajian yang paling kontemporer.

Dari berbagai literatur, kita akan menemukan dua jenis aliran dalam sejarah lahirnya neoliberalisme. Aliran pertama adalah aliran Ordo Neoliberalisme yang digagas dan dikembangkan oleh pakar-pakar yang tergabung dalam Mazhab Freiburg di Jerman pada akhir 1920-an. Pemikiran-pemikiran mereka sudah mengakomodasi kritik yang dilancarkan oleh para pengikut sosialisme Marx atau Marxisme. Aliran kedua adalah aliran yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh liberal yang tergabung dalam The Mont Pelerin Society (MPS). Pada intinya, aliran yang kedua ini tidak menyukai adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan menjadikan pasar sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan program-program pembangunan. Konsep neoliberalisme yang dijadikan konstruksi teori dalam penelitian ini adalah jenis aliran yang kedua, yang dikeluarkan oleh Mont Pelerin Society (MPS).

2.2.1 Neoliberalisme Menurut F.A Hayek

Ada cukup banyak tokoh-tokoh yang mengusung paham neoliberalisme di dunia. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah F.A. Hayek. Dia sering disebut sebagai "motor" aliran neoliberalisme. Selanjutnya, golongan pengikut Hayek sering disebut golongan beraliran

"neoliberalisme antinegara". Sebagai catatan tambahan, sebagian besar dari pendukung neoliberalisme "antinegara" ini adalah orang Yahudi yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dari University of Chicago.¹⁰

F.A. Hayek lahir di Vienna (Austria) tahun 1900 dan pada usia 27 tahun berhasil menjadi Direktur Austrian Institute for Economic Research. Selama hidupnya, ia juga sempat menjadi pengajar di London (1931–1950). Setelah itu, dia pindah ke Chicago hingga tahun 1962. Buku-buku yang ditulis oleh Hayek antara lain, *The Road to Serfdom* (1944) dan *The Fatal Conceit: The Errors of Socialism* (1988). Pada 1974, Hayek memperoleh hadiah nobel dalam bidang ekonomi.¹¹

F.A. Hayek sering disebut sebagai motor aliran neoliberal karena sejarah munculnya aliran ini terkait erat dengan perannya semasa hidup. Pada 1947, Hayek mengundang beberapa pakar dari Amerika Utara dan Eropa untuk menghadiri sebuah konferensi di Mont Pelerin, Swiss. Pakar dari berbagai latar belakang keahlian tersebut di antaranya; Milton Friedman, George Stigler, Karl Popper, Lionel Robbins, Wilhelm Ropke, Ludwig Von Mises, dan lain-lain. Dari hasil konferensi tersebut, terbentuk kelompok yang dinamakan Mont Pelerin Society (MPS). Agar dapat mengikuti perkembangan yang terjadi, mereka mengadakan pertemuan rutin setiap dua tahun sekali. Pengaruh pemikiran kelompok MPS ini sangat besar serta makin dirasakan pada masa-masa setelahnya.

Hayek dapat dikatakan sebagai tokoh kedua setelah Adam Smith yang sangat mendukung paham individualisme dan liberalisme. Dalam bukunya yang sangat terkenal, *The Road to Serfdom* (1944), Hayek menyatakan, "Dengan membiarkan jutaan individu melakukan reaksi terhadap pasar yang terbentuk secara bebas, akan terjadi optimalisasi alokasi modal, kreativitas manusia dan tenaga kerja dengan cara yang tak

¹⁰Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, hlm. 164

¹¹www.wikipedia.org

mungkin ditiru oleh perencanaan terpusat, sehebat apa pun perencanaan itu."¹²

Menurut Hayek, pemberian kewenangan yang luas kepada individu untuk mengejar kepentingannya masing-masing tidak berbahaya bagi masyarakat secara umum. Serupa dengan Adam Smith, Hayek berpendapat kebebasan yang diberikan kepada tiap individu justru akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Walau tiap individu melakukan reaksi secara sendiri-sendiri, hasilnya justru akan melahirkan sebuah keseimbangan yang membahagiakan semua pihak. Selain itu Hayek menambahkan:

"The fundamental principle that in the ordering of our affairs we should make as much use as possible of spontaneous forces of society, and resort as little as possible to coercion, is capable of an infinite variety of applications."¹³

Selanjutnya, ia juga mengatakan:

"The sub-sequent elaboration of a consistent argument in favour of economic freedom was the outcome of a free growth of economic activity which had been the undesigned and unforeseen by product of political freedom."¹⁴

2.2.2 Neoliberalisme Menurut Milton Friedman

Tokoh yang juga cukup berpengaruh dalam pemikiran neoliberalisme adalah Milton Friedman. Ia adalah seorang ekonom asal Amerika Serikat yang banyak memengaruhi kebijakan ekonomi negara di masanya. Milton Friedman adalah seorang ekonom yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 dalam menyebarluaskan gagasan pasar bebas. Ia dilahirkan tahun 1912 dari keluarga imigran Yahudi asal Ukraina di kota New York.

¹²F.A. Hayek, *The Road to Serfdom*, Chicago: University of Chicago Press, 1979, hlm. 28

¹³*Ibid*, hlm. 30

¹⁴*Ibid*, hlm. 31

Pada usia 20 tahun, Friedman berhasil menempuh kuliah di Rutgers University dan mendapatkan gelar B.A.. Dia melanjutkan studinya serta mendapatkan gelar M.A. dari Chicago University tahun 1933, serta gelar Ph.D. dari Columbia University tahun 1946. Ia meninggal di San Francisco (California) pada 2006 karena gagal jantung.¹⁵ Bagi para pakar ekonomi, Milton Friedman digolongkan sebagai pendiri aliran monetaris. Namun, bagi para pakar ekonomi-politik, Friedman digolongkan sebagai penganut neoliberalisme.

Dalam *Capitalism and Freedom*, Friedman membebaskan studi mengenai ekonomi pasar dari “menara gadingnya” dan membuatnya kembali ke bumi. Ia mengemukakan beberapa argumentasi, antara lain menyangkut tentara sukarela, nilai tukar yang mengambang bebas, penghapusan lisensi dokter, sisi negatif dari pajak penghasilan, dan *voucher* pendidikan. Friedman adalah salah seorang yang sangat ingin menghapuskan kebijakan draf militer sukarela bagi warga negara. Suatu kali, ia pernah menyatakan bahwa menghapus draf tersebut adalah satu-satunya isu yang ia sendiri secara personal melakukan lobi terhadap anggota Kongres AS. Meskipun penjualan buku karyanya ini tidak terlalu bagus, banyak kaum muda yang membacanya memperoleh semangat untuk mempelajari ekonomi.

Ide-ide Friedman semakin tersebar ke berbagai penjuru dunia melalui karyanya *Free to Choose* yang ditulis bersama istrinya, Rose Friedman. Buku tersebut merupakan sebuah karya *best-seller* non-fiksi tahun 1980, yang ditulis untuk menyertai sebuah program serial TV pada Public Broadcasting System. Buku ini membuat Milton Friedman menjadi nama yang dibicarakan dalam keluarga-keluarga di AS.

¹⁵www.nobelprize.org, diakses pada 10 Desember 2008

Menurut Friedman, insentif individu adalah sebagai pedoman dan motor terbaik untuk menggerakkan perekonomian. Dalam bukunya yang berjudul *Capitalism and Freedom*, Friedman mengatakan; "Ada satu, dan hanya satu, tanggung jawab sosial perusahaan dan bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya".¹⁶

Pandangan Friedman di atas, didukung oleh Theodore Levitt (1958) yang menyatakan:

"The Contemporary school of business morality seems intent on adding its own caveat to that unhappy consequence. The gospel of tranquility is a soporific. Instead of fighting for its survival by means of a series strategic retreats masquarading as industrial statemanship, business must fight as if it were at war. And, like a good war, it should be fought gallantly, daringly, and above all, not morally."

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pandangan Milton Friedman yang kemudian didukung oleh Theodore Levitt memiliki dimensi amoral dalam penerapannya. Pandangan Friedman melenceng dari filosofi liberalisme klasik yang menganggap bahwa pihak swasta memiliki tugas sosial untuk menyejahterakan masyarakat. Sebaliknya, dalam pandangan Neoliberalisme Friedman, kepemilikan swasta menjadi sesuatu yang absolut. Pihak swasta dianggap tidak memiliki peran sosial apa pun, kecuali untuk akumulasi laba privat.

Teori yang digagas oleh Friedman ini sebenarnya adalah varian dari teori liberalisme. Dasar pemikiran keduanya sama, yaitu mewujudkan kebebasan individu (*individual freedom*). Perubahan liberalisme modern dari liberalisme menjadi neoliberalisme, pada dasarnya tidak mengubah dasar pemikiran mereka, yaitu kebebasan individu. Neoliberalisme merupakan pemahaman baru kaum liberal untuk menjawab masalah-

¹⁶ Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago: University of Chicago Press, 1962, hlm. 60

masalah yang muncul pada masa globalisasi ini. Seperti yang dideskripsikan oleh Randall Rothenberg dalam bukunya *The Neoliberals*, sebagai berikut.

*Neoliberalism is an attempt to combine the traditional democratic compassion for the downtrodden and outcast element of society with different vehicles than the categorical aid programs, or quota system or new federal bureaucracies.*¹⁷

Para penganut paham neoliberal menganggap bahwa mekanisme pasar harus dipakai untuk mengatur perekonomian global, tidak hanya perekonomian domestik. Sama halnya dengan investasi yang tidak hanya ditanamkan secara lokal, tetapi harus merambat ke seluruh pelosok bumi mengikuti hukum penawaran dan permintaan (*demand and supply*). Dengan kata lain, fenomena ini meninggalkan wilayah *political economy* biasa dan memasuki wilayah yang saat ini ramai disebut *international political economy*.

Kemerosotan ekonomi pada 1970-an, (terutama krisis energi yang terjadi tahun 1973) membuat pemikiran neoliberal yang dipopulerkan oleh Milton Friedman ini tumbuh subur. Kemerosotan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi Keynesian. Inti teori ekonomi Keynes adalah *full-employment* (keadaan tanpa pengangguran) yang dianggap sesuatu yang paling penting untuk pertumbuhan ekonomi kapital. Keadaan ini hanya akan mungkin dicapai bila negara dan bank sentral turut campur untuk menurunkan tingkat pengangguran. Negara tidak hanya diharapkan untuk menjaga ketertiban umum dan menyediakan prasarana ekonomi dan sosial yang memadai, seperti yang dikatakan Adam Smith, tetapi ikut langsung dalam investasi. Negara harus ikut campur dalam menstabilkan

¹⁷Thomas R Dye dan Harmon Zeigler, *American Politics in The Media Age*. Edisi ke-2, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1986, hlm.36

perekonomian dan mengeliminasi siklus bisnis dengan cara menjaga keseimbangan permintaan dan kapasitas produksi¹⁸.

Kaum neoliberal menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh ekspansi dan profitabilitas dari sektor swasta; dan kebijakan pemerintah yang baru yang mendukung industri nasional. Di sinilah, peran pemerintah dibutuhkan, yaitu ketika harus mendukung pengaktifan peran swasta dan masyarakat dalam perbaikan ekonomi. Neoliberalisme tidak meminimalkan peran pemerintah seperti yang dilakukan oleh liberalisme klasik, tetapi juga tidak memberinya kekuatan seperti yang dilakukan oleh liberalisme modern. Selama ini, pemerintah dianggap sudah terlalu banyak dibebani tugas untuk melakukan banyak hal untuk banyak kepentingan. Sekarang, waktunya untuk menumbuhkan *self-seeking individual, special interest powers, and adversary process of American politics*.¹⁹

Sementara itu, dalam konteks hubungan internasional, kaum neoliberal mempunyai tujuan khusus, yaitu: *restoring the United States to its world leadership position*.²⁰ Oleh sebab itu, kaum neoliberal menganggap penting usaha untuk menjaga stabilitas keamanan internasional yang kemudian dianggap sama pentingnya dengan usaha pembaruan perekonomiannya.

2.2.3 Perkembangan Neoliberalisme Amerika Serikat

Untuk lebih memahami perkembangan neoliberalisme yang terjadi di Amerika Serikat, kita perlu mengulas secara singkat mengenai perkembangan kapitalisme. Jika dilihat dari perjalanan sejarah, semangat kapitalisme dimulai pada abad pencerahan di Eropa, yaitu abad ke-18.

¹⁸Janda, Kenneth, et al, *The Challenge of Democracy: Government in America*. Edisi ke-2. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989 hlm. 550

¹⁹Dolbeare, Kenneth M., Linda J. Medcalf, "The Rising Stars? Neoliberalism and Neocercervatism". *Political Issues in American Today*, Editor John Davies dan Fredric A. Waldstein, Manchester: Manchester University Press, 1987. hlm.96

²⁰*Ibid*, hlm. 96

Abad pencerahan yang sering disebut dengan renaissance tersebut ditandai oleh tumbuh dan berkembangnya masyarakat industri di Eropa. Berkembangnya masyarakat industri tersebut, didorong oleh berbagai penemuan atau inovasi baru, seperti penemuan alat/mesin pemintalan, mesin uap, dan inovasi lainnya. Sebagai dampak dari ditemukannya berbagai macam inovasi tersebut, teknologi produksi semakin maju.

Kemajuan industri pada abad ke-18 di Eropa, terutama di Inggris, ditandai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan intervensi negara pada level minimal. Sesuai dengan pandangan aliran liberal klasik, seperti Adam Smith, kegiatan ekonomi akan lebih berkembang jika diserahkan pada pelaku-pelaku ekonomi sesuai kepentingan masing-masing. Walau tiap orang bertindak atas dorongan mencari yang terbaik bagi dirinya masing-masing, tumbuh pula kompetisi secara sehat dan bekerjanya semua pihak. Kemajuan Revolusi Industri di Inggris ini telah menyebar ke banyak wilayah yang berada dalam pengaruhnya. Salah satu wilayah yang sangat terpengaruh adalah Amerika Serikat.

Sejarah neoliberalisme di Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari fenomena depresi besar-besaran yang terjadi tahun 1930-an pascaperang dunia pertama. Saat itu, banyak pihak yang menginginkan negara mengambil peran lebih banyak dalam perekonomian untuk menyelamatkan perekonomian itu sendiri. Dari masa tersebut, muncullah pemikiran keynesian yang mengarahkan agar pemerintah mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan *aggregate demand* untuk memperluas lapangan pekerjaan. Inti dari ajaran keynes adalah mengembalikan peran negara untuk mengatur perekonomian masyarakat, sekaligus mengecilkan peran swasta dan mekanisme pasar. Ajaran keynes ini kemudian banyak diikuti oleh negara-negara lain di Eropa termasuk Inggris.

Dampak dari menjamurnya ajaran keynesian adalah munculnya istilah *Welfare State* sebagai sebuah gerakan yang ada di mana-mana.

Setiap negara yang menganut paham keynessian mengarahkan kebijakan ekonominya kepada gerakan negara kesejahteraan. Di Inggris, misalnya, proporsi GDP yang dibelanjakan untuk pelayanan kesejahteraan meningkat dari 5% di tahun 1945 menjadi 20% di tahun 1970-an. Pengeluaran untuk *National Health Service* naik lebih dari 10 kali lipat dari 500 juta pounds tahun 1951 menjadi 5.596 juta pounds tahun 1975.²¹ *Welfare State* identik dengan program-program jaminan pengaman sosial yang dikelola oleh negara.

Di Amerika Serikat, perhatian terhadap program-program kesejahteraan justru berjalan lebih lambat. Perhatian tersebut baru muncul pada pemerintahan Presiden Kennedy dan Johnson (1961—1968). Pada era tersebut, negara menyediakan pelayanan kesejahteraan secara substansial. Bahkan, tahun 1964, Presiden Johnson menyatakan perang terhadap kemiskinan.

Perkembangan selanjutnya, yang memengaruhi kemunculan aliran neoliberalisme, adalah fenomena krisis tahun 1970–1980. Krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu dipicu oleh embargo minyak yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Amerika Serikat karena mendukung Israel dalam perang Ramadhan melawan Mesir dan Suriah tahun 1973.²²

Akibat dari embargo minyak tersebut, muncul tekanan dari masyarakat untuk mereposisi peran negara dalam bidang perekonomian. Negara tidak dapat lagi bertindak sebagai sinterklas seperti pada masa sebelumnya. Kondisi tersebut dikuatkan dengan pernyataan PM Inggris

²¹Rosalina Tobing, *Neoliberalisme Dalam Kebijakan Ekonomi Politik Luar Negeri Amerika Serikat*, Tesis Master: Pusat Studi Kajian Wilayah Amerika UI, 2000, hlm. 40

²²Perang Ramadhan tahun 1973 disebut oleh pihak Israel sebagai perang Yom Kippur. Perang ini melibatkan Israel di satu pihak serta Mesir dan Suriah di pihak lain. Mesir menuntut pengembalian semenanjung Sinai yang direbut Israel pada perang tahun 1967. Sementara, Suriah menuntut pengembalian Dataran Tinggi Golan yang juga direbut Israel pada perang tahun 1967.

James Callahan dalam sebuah pidato yang dibacakan dalam konferensi Partai Buruh. Saat itu, James mengatakan;

"Selama ini, kita berpikiran bahwa Anda dapat mengatasi krisis dan meningkatkan kesempatan kerja dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Sekarang saya beri tahu pada anda bahwa hal tersebut tidak berlaku lagi."²³

Kemudian, pemikiran neoliberal ini tumbuh subur di Amerika Serikat karena kemerosotan ekonomi pada 1970-an, (terutama krisis energi yang terjadi pada 1973). Kemerosotan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi keynessian yang inti ajarannya adalah *full-employment* (keadaan tanpa pengangguran). Bagi Keynes, keadaan tanpa pengangguran adalah hal yang paling penting untuk pertumbuhan ekonomi kapital. Keadaan ini hanya akan mungkin dicapai bila negara dan bank sentral turut campur untuk menurunkan tingkat pengangguran. Negara tidak hanya diharapkan untuk menjaga ketertiban umum dan menyediakan prasarana ekonomi dan sosial yang memadai seperti yang dikatakan Smith, melainkan ikut langsung dalam investasi. Negara harus ikut campur dalam menstabilkan perekonomian dan mengeliminasi siklus bisnis dengan cara menjaga keseimbangan permintaan dan kapasitas produksi.²⁴

Pandangan kaum liberal mengharuskan pemerintah untuk lebih aktif mendukung pertumbuhan industri nasional. Mereka mengusulkan dibuat kebijakan-kebijakan yang mendukung industri nasional. Pemerintah diharapkan dapat mempromosikan investasi langsung dalam rangka menempatkan posisi Amerika agar lebih kompetitif di pasar internasional, daripada hanya mempertentangkan kepentingan pemerintah dan usahawan seperti yang selama ini sering dilakukan kaum liberal. Pemerintah harus meningkatkan hubungan langsung dalam arti menghilangkan birokrasi

²³ www.wikipedia.org

²⁴ Janda, Kenneth, et al. *The Challenge of Democracy: Government in America*. Edisi ke-2. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989 hlm. 550

yang berbelit-belit dengan para pengusaha demi menaikkan produktivitas, menarik investasi, memperbanyak inovasi, dan memperbesar perdagangan internasional.²⁵

Di Amerika Serikat, semangat kapitalisme yang mengejewantah menjadi neoliberalisme mencapai puncaknya pada era Presiden Ronald Reagan. Pada era tersebut, peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian banyak dikurangi. Kebijakan kesejahteraan untuk rakyat yang dilakukan pada masa sebelumnya banyak dikecam. Singkatnya, negara dijadikan kambing hitam atas kegagalan ekonomi yang terjadi tahun 1980-an.

Presiden Ronald Reagan terkenal dengan program ekonominya yang disebut "New Federalism". Program tersebut merupakan pembenahan dari program New Deal yang diprakarsai di era Presiden Roosevelt pascaperang dunia kedua. Pada masa selanjutnya, kebijakan ekonomi Reagan dalam New Federalism dikenal dengan sebutan "Reaganomics".²⁶

Model kebijakan ekonomi pada masa presiden Ronald Reagan merupakan benih dari neoliberalisme AS saat ini. Di antara kebijakan-kebijakan besar dalam "Reaganomics" adalah sebagai berikut.

1. Memberikan potongan pajak bagi kalangan pebisnis sebesar 30% selama tiga tahun.
2. Penghapusan berbagai macam hambatan perdagangan dan subsidi.

²⁵ Thomas R Dye dan Harmon Zeigler, *op.cit.*, hlm. 36

²⁶ Hal yang serupa juga dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, yaitu Margaret Thatcher. Inggris di bawah pemerintahan Thatcher melakukan kebijakan ekonomi yang sangat liberal dengan melakukan privatisasi di sektor pelayanan publik yang jauh lebih radikal dari yang dilakukan Ronald Reagan. Noreena Heertz, *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*, dalam *Neoliberalisme* (I Wibowo dan Francis Wahono, editor), Yogyakarta: Cenderelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003, hlm. 79. Kebijakan ekonomi Thatcher kemudian dikenal dengan sebutan "Thatcherisme".

3. Mengurangi pengurangan federal sehingga negara mulai melepaskan diri dari tanggung jawab membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk publik, kecuali sektor pertahanan.²⁷

Pada masa awal pemerintahannya, Reagan menganggap kehancuran ekonomi Amerika disebabkan oleh pemerintah. Dia pernah mengatakan;

*"The people have not created this disaster in our own economy—the federal government has. Its has out spent, overestimated and over regulated"*²⁸

Reaganomics yang keluar dari ide-ide Reagan memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut.

1. Pengeluaran pemerintah federal dan pajak harus dipotong secara tajam.
2. Pemerintah akan memusatkan perhatiannya pada penyehatan ekonomi Amerika jangka panjang dan tidak sekadar hanya mencoba memperlancar kegiatan di lingkungan bisnis.
3. Upah dan harga akan ditentukan oleh kekuatan pasar; artinya kontrol atas upah dan harga semata-mata hanya untuk upaya-upaya pengendalian inflasi.
4. Deregulasi.²⁹

Reagan percaya bahwa industri layanan publik akan lebih efisien jika dialihkan ke sektor swasta. Berdasarkan pemahaman itulah, Reagan memperlonggar pembatasan pada bidang transportasi dan minyak bumi. Selain itu, Reagan melakukan pemangkasan pajak yang disebut dengan program "Tax Revolt". Dengan pemangkasan tersebut, tarif marginal pajak tertinggi di AS diturunkan dari 70% menjadi 28%. Tindakan lainnya adalah menghapuskan segala macam kebijakan pemerintah yang dianggap

²⁷Ian Derbyshire, *Politics in the United States: From Carter to Bush*, Edinburgh: W&R Chambers Ltd, 1990, hlm.61

²⁸Bambang Suroso, *Kepemimpinan Reagan, Reaganomics, dan Mekanisme Pasar Amerika Serikat (1981–1988)*, Tesis Master: Program pascasarjana Universitas Indonesia, 1995, hlm. 27

²⁹*Ibid*, hlm. 52

tidak efisien seperti pengawasan harga, dividen, dan kontrol kurs mata uang asing.

Atas nama efisiensi, Reagan rela menyerahkan pengelolaan program-program sosial pelayanan publik kepada pihak swasta. Berbagai pengeluaran negara di bidang sosial dipotong di era pemerintahannya. Dalam pandangan Reagan, pengeluaran di bidang sosial hanya akan menciptakan ketergantungan dan "mengikis insentif ekonomi" yang pada gilirannya akan menyebabkan mandeknya pertumbuhan ekonomi. Presiden Reagan mengganti era ketergantungan menjadi era kemandirian. Bahkan, semangat egalitarian ditolak pada tataran ideologi. Inti kebijakan Reagan adalah mengganti fungsi pemerintah. Di bawah rezimnya, pemerintah tidak lagi diberikan peran dalam melakukan redistribusi kekayaan. Oleh karena berbagai macam tindakannya tersebut, era Reagan sering diidentikkan dengan istilah "deregulasi" dan "debirokratisasi".

Selama pemerintahan Reagan, banyak perusahaan besar di Amerika Serikat yang diuntungkan karena sikap lunaknya. Mereka juga sudah dekat dengan Reagan pada masa sebelumnya. Banyak proyek-proyek besar pemerintah federal, terutama pada industri militer, membelanjakan dolarnya. Praktik-praktik oligopoli tampak sangat nyata di era Reagan. Hal itu karena privatisasi perusahaan cenderung terkonsentrasi pada sahabat-sahabat dekat Reagan.

2.3 Teori Pemerintahan Korporatisme

Korporatisme adalah suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara negara dan kepentingan kelompok dalam masyarakat. Negara mempunyai hak kuasa terhadap masyarakat, seperti dalam bidang bisnis, finansial, organisasi buruh, yang mencakup individu atau kelompok yang dikooptasi atau dikuasai. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah korporatisme sering digabung dengan

kata negara untuk menunjukkan fokus kajian istilah ini dalam teori ekonomi-politik.

Dalam buku yang ditulis oleh Nur Imam Subono yang berjudul *Taktik Negara Menguasai Rakyat*, dituliskan beberapa definisi yang terkait dengan korporatisme dalam perspektif sistem pemerintahan. Menurut Nur Imam Subono, korporatisme merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan jenis baru yang ditandai dengan kekuatan negara dan pengaturan kelompok-kelompok perwakilan kepentingan dalam masyarakat berdasarkan relasinya dengan negara.³⁰

Bentuk pemerintahan seperti ini, merupakan suatu fenomena modern, dalam arti kehadirannya didasarkan atas suatu prinsip legal formal. Dengan kata lain, ada semacam alasan-alasan rasional yang memastikan terbentuknya relasi tersebut. Relasi yang terbentuk berdasarkan saling kepentingan yang dimiliki kedua sektor tersebut (pemerintah dan pemilik modal).

Pembentukan dan juga pengakuan atas kelompok-kelompok kepentingan yang ada, tidak semata-mata didasari oleh kepentingan negara seperti yang tampak pada model pemerintahan militer. Sebaliknya, juga tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan otonom dari kelompok-kelompok perwakilan kepentingan itu sendiri. Akan tetapi, korporatisme didasarkan kepada kepentingan rasional dari kekuatan negara di satu pihak yang ingin memonopoli penyelenggaraan kekuasaan politik. Di pihak lain, negara juga mengakui keterbatasannya dalam hal memobilisasi sumber-sumber ekonomi dan dukungan politik.³¹

Secara lebih tegas, menurut Nur Iman Subono, formalitas dalam hubungan antara kekuatan negara dan kelompok-kelompok perwakilan kepentingan dalam masyarakat itu sekaligus menunjukkan kekhawatiran akan eskalasi dan polarisasi konflik di antara keduanya. Menurut Imam, negara tidak sanggup mengkooptasi

³⁰Nur Iman Subono, *Taktik Negara Menguasai Rakyat: Sebuah Studi Teori Bentuk Pemerintahan Korporatisme*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003, hlm. 174

³¹*Ibid*, hlm.175

dan memenuhi kepentingan kelompok-kelompok perwakilan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh negara yang memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan konsumsi serta terbatasnya keleluasan partisipasi politik.³²

Apabila dilihat dari perspektif negara dan masyarakat, bentuk pemerintahan korporatisme jelas menunjukkan adanya ketegangan antara sektor negara dengan sektor masyarakat. Ketegangan tersebut pada gilirannya akan memunculkan semacam negosiasi semi-permanen di antara kedua sektor. Negosiasi semi-permanen tersebut dapat berupa pemberian hak monopoli oleh negara kepada sektor privat yang juga dibarengi dengan kontrol negara atas aktivitas sektor tersebut.

Hal yang menjadi sifat khas dari bentuk pemerintahan korporatisme adalah terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Lebih khusus lagi, para teoretisi pemerintahan korporatisme mengambil contoh negara-negara Amerika Latin. Negara-negara Amerika Latin sering dianggap melakukan pembangunan kapitalis yang terlambat dan bergantung. Dengan kata lain, negosiasi semi-permanen antara negara dan sektor privat akan sangat terpengaruh oleh faktor-faktor internasional seperti konjungtur ekonomi dunia maupun pola patronasi ideologi dan politik yang ada antara negara-negara korporatisme dengan negara adi kuasa seperti Amerika Serikat.

Terbatasnya kajian pemerintahan korporatisme yang difokuskan terhadap pola hubungan negara dan sektor privat pada negara maju tidak menjadikan teori ini tidak konstruktif terhadap penelitian. Teori mengenai pemerintahan korporatisme sangat relevan digunakan apabila kita kembali menekankan bentuk hubungan antara kekuatan negara dengan kelompok perwakilan kepentingan yang diberi hak monopoli. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan tersebut bersifat legal formal yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memperkuat posisi masing-masing. Menurut Nur Iman

³²*Ibid*, hlm.175

Subono, teori model pemerintahan korporatisme hendak menunjukkan realitas sosial politik pada konfrontasi atau tawar menawar yang bisa dicapai antara kekuatan negara dengan kelompok-kelompok perwakilan kepentingan dalam masyarakat.³³

2.3.1 Pemerintahan Korporatisme Menurut Phillip Schmitter

Phillip Schmitter adalah seorang profesor dalam bidang ilmu politik di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Hal yang menjadi keunggulan dalam penelitian Schmitter mengenai pemerintahan korporatisme adalah metodologi kuantitatif yang digunakannya. Sementara itu, yang menjadi kekurangannya adalah studi kasus yang diambil di negara-negara Amerika Latin sebagai objek penelitian. Studi kasus pada negara Amerika Latin dianggap kurang akurat dengan penelitian ini karena objek penelitian ini adalah Amerika Serikat. Negara-negara Amerika Latin yang dijadikan objek penelitian Schmitter merupakan negara berkembang yang jelas berbeda dengan Amerika Serikat yang merupakan negara maju.

Secara sederhana, Schmitter mendefinisikan pemerintahan korporatisme sebagai:

"Suatu sistem perwakilan sikap dan atau kepentingan suatu bentuk khusus atau pengaturan kelembagaan secara tipikal ideal untuk menghubungkan kepentingan-kepentingan assosional yang terorganisasi dengan masyarakat sipil dengan struktur-struktur negara yang bersifat menentukan."³⁴

Salah satu tulisannya yang terkenal dan banyak dirujuk dalam diskusi mengenai korporatisme, berjudul "Still The Century of Corporatism?". Dalam tulisan tersebut, Schmitter membedakan korporatisme menjadi dua jenis, yaitu korporatisme negara (*state corporatism*) dan korporatisme masyarakat (*societal corporatism*).

³³ *Ibid*, hlm. 177

³⁴Phillipe C. Schmitter, *Interest Conflict and Political Change in Brazil*, Stanford: Stanford University Press, 1971, hlm. 80

Korporatisme masyarakat dicirikan dengan adanya suatu sistem perwakilan dan asosiasi kepentingan yang otonom. Dalam model tersebut, aktivitas-aktivitas dan dukungan terhadap pemerintah merupakan sumber legitimasi politik yang utama. Sementara itu, korporatisme negara dicirikan dengan penetrasi dan pengawasan negara terhadap perwakilan dan asosiasi-asosiasi kepentingan.

Pengklasifikasian jenis korporatisme Schmitter didasarkan pada seberapa besar kontrol negara terhadap kelompok kepentingan. Korporatisme masyarakat menekankan diri pada aspek loyalitas dukungan terhadap legitimasi politik negara. Sementara itu, korporatisme negara cenderung menekankan diri pada otoritas rezim yang kemudian memiliki kekuasaan untuk mengontrol kelompok kepentingan yang ada. Negara memberikan monopoli kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok elite.

Walaupun Phillip Schmitter mengambil kasus pada negara-negara Amerika Latin, hasil penelitiannya masih memiliki kesinambungan dengan konstruksi penelitian ini. Kesinambungan tersebut ada pada sifat operasional definisi yang dia buat setelah terlebih dahulu mengkaji variasi-variasi pemakaian konsep tersebut.

Salah satu keunggulan dalam teori Phillip Schmitter mengenai korporatisme adalah pengaitan antara korporatisme dengan perkembangan kapitalisme. Menurut Schmitter, munculnya pemerintahan korporatisme merupakan jawaban sekaligus respons terhadap kebutuhan kapitalisme untuk menciptakan suatu rencana atau aransemenn politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.³⁵ Kebutuhan ideologi kapitalisme ini berbeda-beda menurut tahap perkembangan dan konteks internasional.

³⁵Phillipe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?", dalam Frederick B. Pike dan Thomas Strich, ed, *The New Corporatism: Social Potical Structures in the Iberian World*, Notre Dome: University of Notre Dome Press, 1974, hlm. 93

Pada negara-negara kapitalis yang sangat maju, kebutuhan utamanya adalah rezim (sistem politik) yang stabil dan dominasi kelas-kelas borjuis. Dengan kelas-kelas borjuis yang kuat dan mapan dalam menghadapi kompetisi dalam ekonomi internasional, kebutuhan tersebut dapat dicapai. Cara yang dilakukan adalah melalui asosiasi (*associating*) dan menggabungkan (*intercorporating*) kepentingan-kepentingan anggota masyarakat kelas bawah ke dalam proses yang lebih jauh. Dengan meletakkan kelas pekerja ke dalam sistem politik, kelas kapitalis dapat menjamin berlangsungnya efisiensi dalam pola produksi ekonomi mereka. Hal itu juga sekaligus akan memberikan kelas pekerja berbagai keuntungan material.³⁶ Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut akan melahirkan apa yang disebut korporatisme masyarakat (*societal corporatism*).

Sementara itu, pada negara-negara kapitalis kurang maju atau berkembang, posisi kelas borjuis sangat lemah. Hal itu ditunjukkan antara lain dengan ketergantungan mereka terhadap faktor-faktor eksternal. Di samping itu, kemampuan ekonomi negara sangat terbatas untuk menggerakkan roda-roda pembangunan ekonomi. Kondisi seperti ini pada gilirannya akan membatasi kemampuan negara untuk menjawab secara memadai tuntutan-tuntutan masyarakat kelas bawah.

Menurut Schmitter, kondisi keterbatasan negara dalam menjawab tuntutan masyarakat kelas bawah akan membuat negara berlaku represif dan meniadakan otonomi artikulasi tuntutan masyarakat kelas bawah. Kebijakan negara ini dianggap sebagai sebuah kebutuhan perdamaian sosial (*social peace*) yang tidak melalui pencaplokan (kooptasi) atau penggabungan (*incorporating*) kelas bawah dalam sistem politik. Proses represif dan peniadaan kelas bawah yang dilakukan negara akan

³⁶Christopher Ham dan Michel Hill, *The Process in the Modern Capitalist State*, London: Harvester Press, 1995, hlm. 36 – 42

menghasilkan apa yang disebut dengan korporatisme negara (*state corporatism*).³⁷

Korporatisme negara menurut Phillip Schmitter diartikan sebagai keberadaan unit-unit kepentingan dalam suatu negara yang diatur oleh lembaga yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal. Keanggotaannya tidak saling bersaing dan berlaku secara hierarkis. Negara juga memberi hak monopoli tertentu.³⁸

2.3.2 Korporatisme Menurut Guilermo A. O'Donnel

Guillermo O'Donnel adalah seorang direktur Akademi dari Kellogg Institute dan Hellen Kellog Professor of International Studies di University of Notre Dame, Amerika Serikat. Selain itu, O'Donnel juga merupakan seorang peneliti senior di CEBRAP (The Centro Brasileiro Anelise e Planejamento) di Sao Paulo, Brazil.³⁹

Pandangan Guillermo O'Donnel mengenai korporatisme diterangkan secara lebih spesifik sebagai suatu perangkat struktur yang menghubungkan antara negara dengan masyarakat. Penjelasan itulah yang membedakannya dengan para peneliti korporatisme lainnya. Menurut pandangan O'Donnel, kemunculan pemerintahan korporatisme berdampingan secara erat dengan proses urbanisasi dan industrialisasi yang mulai bergerak hingga krisis ekonomi dunia pada 1930-an. Dalam pandangan O'Donnel, semua itu merupakan fenomena yang relatif baru.⁴⁰

Apabila kita mengamati karya O'Donnel mengenai korporatisme, akan terlihat hubungan antara kekuatan-kekuatan politik yang ada dengan

³⁷ Phillipe C. Schmitter, *op.cit*, hlm. 107

³⁸ Robert R. Alford dan Roger Friendland, *Power of Theory, Capitalism, The State, and Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, hlm.235

³⁹ www.wikipedia.org

⁴⁰ Guillermo A. O'Donnel, "Corporation and The Question of The State" dalam James M. Malloy, ed, *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*, University of Pittsburgh Press, 1979, hlm. 47

kemunculan korporatisme. Menurut O'Donnel, korporatisme yang berkembang di negara-negara maju sangat berbeda dengan yang ada di Amerika Latin. Penelitian O'Donnel memang mengambil studi kasus pada negara Brazil dan Argentina dengan periodisasi pasca-tahun 1964.

O'Donnel menggunakan istilah yang sama dengan Schmitter, yaitu korporatisme negara untuk bentuk pemerintahan yang muncul di negara-negara berkembang. Menurutnya, ada dua proses yang melahirkan bentuk pemerintahan korporatisme, yaitu *bifrontal* dan *segmentary*. *Bifrontal* adalah adanya dua proses dalam pembentukan korporatisme negara, yaitu stasisasi dan privatisasi. Stasisasi adalah kebijakan negara untuk menundukkan dan mensubordinasikan seluruh organisasi masyarakat sipil. Sebaliknya, privatisasi adalah kebijakan negara untuk membuka beberapa institusinya terhadap kepentingan-kepentingan perwakilan yang terorganisasi dari masyarakat sipil.⁴¹

Dari penjelasan sebelumnya, tampak jelas apa latar belakang institusional saat bentuk pemerintahan korporatisme muncul. Jika yang pertama terjadi melalui cara-cara stasisasi organisasi-organisasi masyarakat sipil, maka yang berikutnya melalui privatisasi institusi negara. Yang menjadi catatan O'Donnel adalah proses *bifrontal* dalam praktiknya dapat muncul bersamaan dan cenderung hadir dalam situasi dominasi otoriterisme.

Proses besar lainnya yang membentuk pemerintahan korporatisme menurut O'Donnel adalah *segmentary*. Pengertian yang pertama mengenai *segmentary* adalah negara memusatkan stasisasi pada organisasi-organisasi kelas bawah seperti serikat buruh. Penjelasan berikutnya adalah proses privatisasi institusi yang hanya ditujukan untuk kepentingan kelas atas

⁴¹*Ibid*, hlm. 48

yang dominan.⁴² Secara sederhana, proses *bifrontal* dan *segmentary* ala O'Donnel merupakan suatu hubungan saling penetratif yang kompleks antara masyarakat dengan negara.

Hal yang menjadi ciri khas penelitian O'Donnel adalah munculnya model pemerintahan birokratik otoritarianisme dalam proses kemunculan pemerintahan korporatisme. Model pemerintahan ini menurut O'Donnel menekankan diri pada efisiensi dan kekuatan birokrasi sebagai faktor dominan pemicu kemunculan korporatisme.⁴³ Secara lebih terinci, O'Donnel menyebutkan ciri-ciri negara dengan model birokrasi otoritarianisme sebagai berikut.

1. Posisi pemerintah tertinggi biasanya diperoleh setelah melalui jenjang karier yang berhasil dalam organisasi-organisasi yang terbirokratis secara ketat dan kompleks. Organisasi yang dimaksud seperti angkatan bersenjata, pemerintahan, dan perusahaan swasta besar.
2. Peniadaan politik (*political exclusion*), yang mempunyai tujuan untuk menutup jalur-jalur akses politik dari sektor populer dan aliansi-aliansinya. Hal tersebut mengakibatkan sektor-sektor tadi terdeaktivikasi secara politik. Hal ini dilakukan tidak hanya melalui cara-cara represif, tetapi juga melalui imposisi vertikal (korporatif) yang dikontrol oleh negara dengan membentuk serikat-serikat buruh.
3. Peniadaan ekonomi (*economy exclusion*) yang bertujuan untuk mengurangi atau menunda dalam jangka waktu yang tidak terbatas aspirasi ekonomi dari sektor populer.
4. Depolitisasi yang berguna untuk mengurangi isu-isu sosial politik untuk kemudian dijadikan masalah-masalah teknis yang hanya dapat dipecahkan melalui cara-cara interaksi di antara eselon tingkat tinggi.

⁴²*Ibid*, hlm. 49

⁴³ Guillermo A. O'Donnel, *Op.Cit*, hlm. 54-56

5. Sangat berkaitan dengan suatu tahap transformasi penting di dalam mekanisme akumulasi kapital masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari proses pendalaman dari kapitalisme pinggiran dan bergantung yang dicirikan dengan industrialisasi yang ekstensif.⁴⁴

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan O'Donnel, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa bentuk pemerintahan korporatisme merupakan fungsi dari tipe negara dan struktur sosial ekonomi. Sementara itu, korporatisme merupakan salah satu dari struktur yang menghubungkan keduanya.

Dalam politik birokrasi, kita dapat melihat teori dari Mills's sebagai perbandingan. Menurut C. Wright Mills's, kelompok elite dalam suatu negara mencakup: korporasi, militer, dan eksekutif. Kelompok ini merupakan organisasi yang *powerfull*. Dengan sentralisasi birokrasi, kelompok ini menyebabkan adanya klusi. Kekuasaan politik ekonomi akan menduduki peringkat pertama, sedangkan demokrasi berada di peringkat kedua.⁴⁵

Penelitian O'Donnel mengenai pemerintahan korporatisme dapat dikaitkan dengan perkembangan kapitalisme seperti yang terdapat pada penelitian Phillipe Schmitter. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam penelitiannya, kita dapat menganalisis pandangan O'Donnel. Berdasarkan penelitiannya, dapat dikatakan bahwa munculnya pemerintahan korporatisme mengacu pada awal perkembangan kapitalisme saat negara sangat dominan, Peran negara yang otonom dalam mendistribusikan kekuasaan kepada masyarakat dan arah pembangunan ekonomi. Korporatisme negara di negara-negara dunia ketiga seperti kekuasaan oligarki dan otoriter.⁴⁶ Akibatnya, masyarakat menjadi statis dan munculnya birokrasi yang otoriter.

⁴⁴Guillermo A. O'Donnel, "Reflections on The Patern of Change in The Beureucratic Authoritarian State" dalam *Latin America Research*, vol 1, 1978, hlm. 6-7

⁴⁵ Robert R. Alford dan Roger Friendland, *Op.Cit*, hlm. 182

⁴⁶ Martin Staniland, *What is Political Economy? Study of Social Theory and Underdevelopment*. New Haven: Yale University Press, 1985, hlm. 74-75

Menurut Guillermo O'Donnel, beberapa ciri rezim birokrasi otoriter atau otoritarianisme birokrasi, antara lain sebagai berikut.

1. Penyelenggara negara didominasi oleh koalisi militer, teknokrat sipil, dan perusahaan swasta besar.
2. Menerapkan stabilitas dengan pendekatan kekerasan dalam mengamankan program ekonomi.
3. Peniadaan politik dengan melakukan kontrol yang ketat untuk mengeliminasi aktivitas politik dan menghapus lembaga demokrasi politik.
4. Sistem ekonominya bertolak pada akumulasi modal yang cenderung oligopolistik dari kepentingan modal pribadi atau lembaga-lembaga negara.
5. Depolitisasi dan mengurangi isu politik yang kemudian menjadi masalah teknis dan hanya dapat dipecahkan antara para pejabat.⁴⁷

Korporatisme negara berbentuk hubungan antara kekuasaan negara dengan kelompok bisnis yang lebih kuat. Kelompok bisnis ini memengaruhi negara dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Sampai di titik ini, penelitian O'Donnel konstruktif terhadap penelitian ini. Perspektif O'Donnel yang terlalu fokus terhadap negara-negara Amerika Latin merupakan hal yang menjadi kelemahan penelitiannya. Baik penelitian Schmitter ataupun O'Donnel memerlukan pemilahan secara teliti untuk mencari penjelasan mengenai pemerintahan korporatisme pada negara maju seperti Amerika Serikat.

⁴⁷Guillermo O'Donnel, "Tension in The Bureaucratic-Authoritarian State and The Question of Democracy", dalam David Collier (ed.), *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton: University Press, 1979, hlm. 290-- 294

BAB 3

METODOLOGI DAN DATA PENELITIAN

3.1 Pengantar

Dalam penelitian mengenai dominasi kepentingan korporasi pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara garis besar, perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif dapat dilihat dari aspek maksud dan tujuan serta pendekatan dari penelitian tersebut.

Metode penelitian kualitatif lebih banyak menitik-beratkan pada upaya pengembangan maksud dari pengertian tentang individu dan kejadian. Hal itu dilakukan dengan memperhitungkan konteks yang relevan sebagai tujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dengan memperbanyak pemahaman mendalam. Hal tersebut berdasarkan pendekatan asumsi bahwa subyek masalah suatu ilmu sosial berbeda dengan subyek masalah dari ilmu fisik/alamiah dan mensyaratkan tujuan yang berbeda untuk inkuiri dan seperangkat metode penyelidikan yang berbeda. Induktif, berisi nilai (subjektif) holistik dan berorientasi proses. Sementara itu, kuantitatif bermaksud membuat deskripsi objektif tentang fenomena terbatas dan menentukan apakah fenomena tersebut dapat dikontrol melalui beberapa intervensi.

Alasan lain digunakannya metode penelitian kualitatif adalah kecenderungan peneliti untuk mengetahui persoalan "mengapa" dan "bagaimana", tidak hanya sebatas "apa". Menurut R.B.Burns, penelitian kualitatif berguna jika seseorang ingin mengetahui apa yang ada di balik realitas versi publik dan resmi dalam rangka penelitian pemahaman yang tersembunyi dan tidak diungkapkan.⁴⁸

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui proses pengumpulan data. Data itu terfokus dari data numerik, dengan pendekatan penelitian untuk menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis numerik.

Metodologi adalah bagian dari filsafat ilmu pengetahuan yang membahas persoalan, "Apa yang diketahui?" (yang disimpan dalam bentuk teori); "Bagaimana untuk tahu itu?" (yakni pembahasan tentang metodologi itu sendiri); dan "dengan cara apa untuk tahu?" (yakni teknik atau metode).⁴⁹ Dengan demikian, upaya untuk memahami suatu gejala atau fakta secara epistemologis harus melibatkan teori-teori, metodologi, dan teknik serta metode penelitian secara bersamaan.

Bagi McGraw dan Watson, ilmu pengetahuan (*science*) adalah metode analisis yang objektif, logis, dan sistematis untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan gejala (*phenomenon*) yang dapat diamati.⁵⁰ Dalam rumusan yang lebih singkat sebagaimana disebutkan oleh Pelto, "*Science is an objective, logical, and systematic analysis of phenomena, devised to permit the accumulation of reliable knowledge*". Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya terdapat empat unsur pokok dalam metodologi yang ingin peneliti kemukakan dalam bab ini. Hal

⁴⁸ R.B.Burns dalam Lisa Harison, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.101

⁴⁹ David Apter, *The Politics of Modernization*, Chicago: Chicago University Press, 1965, hlm.

16

⁵⁰ David Apter, *op.cit*, hlm.34

tersebut adalah paradigma, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Dalam setiap penelitian ilmiah, sangat diperlukan adanya metodologi agar dapat mengarahkan peneliti atau penulis kepada tujuan dan target penelitian itu sendiri. Sebagai kelaziman dalam kajian dan studi tentang masalah-masalah sosial dan politik, maka pendekatan kualitatif yang menjadi pilihan. Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam setiap masalah yang dilakukan dengan mengetahui dan memverifikasi berbagai teori atau konsep terdahulu agar dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵¹

Pada setiap penelitian kualitatif, diperlukan penentuan terhadap skala prioritas terhadap responden atau variabel yang ditentukan secara selektif, bukan didasarkan pada banyaknya jumlah yang akan diteliti. Dalam penelitian sosial, diperlukan salah satu pendekatan, yaitu dengan mendapatkan data primer, sekunder, dan tertier-nya. Mengingat fokus utama dari penelitian ini adalah praktik bisnis tentara bayaran di Irak, maka berbagai data dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditentukan akan ditelaah secara mendasar dan mendetail.⁵²

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan metode kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik). Jadi, dalam penelitian kualitatif tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel hipotesis, tetapi perlu memandang sebagian dari sesuatu keutuhan.

Sementara itu, menurut Krik dan Miller (1986: 9), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasan maupun dalam peristilahannya.

⁵¹ Muhammad Hisyam, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: LIPI Press, 1999), hlm. 25

⁵² Anas, Saidi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: LIPI Press, 2001), hlm. 19

Penelitian kualitatif menurut Williams (1995), adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Lebih jelasnya, definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif menurut Jane Rice adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Dari pengertian penelitian kualitatif di atas, dapatlah disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena itu, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan hal yang lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks tertentu yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1 Batasan Objek Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang melebar dan tidak terfokus, penulis membuat sebuah bingkai yang membatasi objek penelitian. Bingkai itu akan memberikan arah paradigma pembahasan dalam penelitian menjadi lebih tajam dan tepat sasaran. Hal tersebut bertujuan agar hasil penelitian ini lebih bernilai objektif dan tajam. Untuk itu, ruang lingkup (bingkai) permasalahan yang akan dibahas sebagai objek penelitian ini adalah praktik bisnis tentara bayaran yang dilakukan korporasi Amerika Serikat pascaperang Irak tahun 2003.

Untuk lebih membatasi objek penelitian dalam tesis ini, penulis juga memberikan satu bingkai lagi yang berdimensi kala (periodisasi waktu peristiwa). Periodisasi penelitian ini dimulai sejak rencana serangan AS ke Irak sampai dengan satu tahun pascaserangan tersebut. Bingkai periodisasi waktu kejadian yang dibuat, disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah mengapa pihak korporasi dapat menjalankan bisnis militer mereka pascaperang Irak? Terkait dengan pertanyaan tersebut, maka periodisasi sejarah yang membatasi penelitian adalah saat pihak-pihak korporasi berusaha memenangi kepentingannya dalam kebijakan pemerintah. Saat-saat tersebut berkisar antara tahun 2000 hingga tahun 2003. Tahun 2000 menandai dimulainya lobi-lobi korporasi pada politik internal Amerika Serikat. Tahun 2000 juga menandai keterlibatan pihak korporasi pada proses pemilu yang kemudian memenangkan George W. Bush.

Untuk periodisasi berikutnya adalah rentang waktu tahun 2003–2004. Tahun 2003 menandai keputusan untuk menginvasi Irak beserta dinamika tender rekonstruksi pascaperang. Sementara, tahun 2004 menandai setahun praktik bisnis tentara bayaran yang dilakukan di Irak, sekaligus mengakhiri periodisasi penelitian. Dari keseluruhan periodisasi yang dibuat, maka dapat dikatakan periodisasi selengkapny dari penelitian ini, yaitu antara tahun 2000–2004.

Sementara itu, pemilihan tahun 2003 pada judul penelitian didasarkan pada pertimbangan signifikansi perang Irak tahun 2003 dibandingkan dengan perang Irak lainnya. Hal ini untuk membedakan perang tersebut dengan perang-perang Irak sebelumnya seperti perang tahun 1980 – 1988, atau perang tahun 1991.

3.2.2 Karakteristik Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵³ Sementara itu, Robert K. Yin, menegaskan bahwa ada enam sumber bukti atau sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian studi kasus. Keenam sumber bukti itu adalah dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik.⁵⁴

Karakteristik yang ada dalam penelitian ini meliputi data kasus. Peneliti berusaha semaksimal mungkin mendapatkan data kasus terkait dengan praktik bisnis tentara bayaran pascaperang Irak tahun 2003. Data kasus mayoritas, penulis dapat melalui data dokumen dari berbagai sumber akan menjadi salah satu bahasan pada penelitian ini.

Data dokumen dalam penelitian ini lebih kepada dokumen eksternal, dokumen eksternal yang dimaksud berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, buletin, jurnal, dan berita yang disiarkan oleh media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.⁵⁵

Data perilaku juga akan menjadi bagian dari beberapa bahasan. Hal ini mengingat kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu bangsa berangkat dari perilaku bangsa itu sendiri dan perilaku bangsa yang memengaruhinya. Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana Amerika Serikat mempraktikkan bisnis tentara bayaran di Irak.

⁵³John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Analyzing Sosial Setting*, dikutip dari Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 157

⁵⁴Robert K Yin, *Studi Kasus & Desain Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.103

⁵⁵Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006 hlm. 219

3.3 Paradigma Penelitian

Istilah paradigma yang digunakan dalam penelitian ini berdefinisi sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntut seseorang, baik dalam tindakan keseharian maupun dalam penelitian ilmiah.⁵⁶ Dengan demikian, paradigma setidaknya harus berisikan asumsi-asumsi dasar yang dianggap benar dan dapat diterima secara nalar.

Selanjutnya, paradigma dalam dunia penelitian (*research*) secara garis besar dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu Paradigma Klasik (*Classical Paradigm*), Paradigma Konstruktifisme (*Constructive Paradigm*), dan Paradigma Kritik (*Critical Paradigm*). Perbedaan mendasar di antara ketiga jenis paradigma tersebut pada hakikatnya terdapat pada "cara pandang" (*world view*) dan cara pembahasan sebuah pengamatan atas gejala atau objek penelitian.⁵⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian tentang praktik bisnis tentara bayaran di Irak ini, peneliti cenderung untuk menggunakan Paradigma Klasik (*Classical Paradigm*). Paradigma ini memandang realitas (objek penelitian) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran (*theoretical framework*) menurut interpretasi peneliti.

Objek yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah bisnis tentara bayaran pascaperang di Irak. Paradigma atau asumsi dasar penelitian ini adalah bahwa peran pihak korporasi dalam penentuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat dominan. Kepentingan-kepentingan korporasi yang berorientasi kepada akumulasi keuntungan ekonomi banyak diakusisi oleh pemerintah. Akusisi kepentingan ini didasarkan kepada hubungan yang erat antara pihak pemerintah dengan korporasi sejak awal masa pemerintahan. Hubungan yang erat tersebut, terjalin sejak masa kampanye George W. Bush. Pihak korporasi besar

⁵⁶ Myron Weiner, *Political Participation: Crisis of the Political Process*, dalam Leonard Binder, et.all, eds., *Crises and Sequences in Political Development*, New York: Princeton University Press, 1971, hlm. 54

⁵⁷ Charles F, Andrian, *Political Change in The Third World*, London: Unwin Hyman Press, 1988, hlm. 22

memberi dukungan yang kuat kepada George W. Bush untuk memenangi pemilu. Dukungan yang diberikan oleh pihak korporasi kepada Bush berupa dana yang besar selama kampanye. Sebagai konsekuensi dari dukungan tersebut, tidak hanya akusisi kepentingan korporasi yang dilakukan rezim pemerintahan Bush, melainkan juga menempatkan para tokoh korporasi besar dalam kabinet inti pemerintahannya.

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan invasi Amerika Serikat ke Irak, pihak korporasi memiliki kepentingan yang kuat dalam rangka meraup keuntungan besar dalam proyek rekonstruksi pascaperang. Proyek rekonstruksi yang ditenderkan pascaperang meliputi banyak aspek, dari properti sampai pertambangan. Hampir seluruh proyek rekonstruksi yang ditenderkan, diraih oleh korporasi yang berasal dari Amerika Serikat. Selanjutnya, keberhasilan pihak korporasi AS mendapat tantangan besar berupa kondisi yang tidak stabil di Irak. Pascaperang, Irak justru berubah menjadi wilayah yang sangat tidak aman bagi aktivitas bisnis apa pun di wilayah itu. Untuk mengamankan aktivitas bisnis pihak korporasi besar di Irak, AS menggunakan jasa tentara bayaran dari perusahaan penyewa tentara bayaran. Tentara bayaran dipilih karena profesionalitas kerja mereka dan minimnya risiko tekanan politik bagi pemerintah jika dibandingkan dengan tentara resmi. Kemudian, praktik bisnis tentara bayaran ini menjadi sebuah fakta yang terjadi pasca-invasi AS tahun 2003. Berbagai aktivitas pengamanan seperti pengamanan aset ekonomi sampai aset politik dilakukan di Irak pascaperang. Para pelaku bisnis tentara bayaran tersebut adalah perusahaan tentara bayaran yang berasal dari Amerika Serikat. Teori yang dijadikan alat analisis untuk asumsi dasar ini adalah teori pemerintahan korporatisme yang ditulis oleh tokoh seperti Phillipe Schmitter dan Guilermo O'Donnel. Selain itu, teori ekonomi neoliberal juga dimanfaatkan sebagai alat bantu analisis fenomena.

3.4 Metode Penelitian

Secara garis besar, metode penelitian dapat dibedakan ke dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing jenis penelitian ini memiliki metode pengumpulan data dan metode analisis data yang berbeda.⁵⁸ Dalam dunia penelitian, metode kuantitatif lebih dikenal dengan metode penelitian survei dan eksperimen. Sementara dalam metode kualitatif, setidaknya terdapat delapan jenis metode penelitian, salah satu di antaranya adalah studi kasus (*case study*). Dalam konteks topik penelitian ini, lebih tepat menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Umumnya, metode studi kasus dilakukan oleh para ilmuwan, khususnya mereka yang sering kali menggunakan etnografi dalam meneliti sejumlah etnis dan kultur dari masyarakat tertentu. Studi kasus dalam pengertian ini lebih tepat untuk dimaknai sebagai suatu metode atau pendekatan untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Inti dari pendekatan studi kasus adalah berusaha untuk memahami suatu keputusan atau seperangkat keputusan: mengapa keputusan itu dibuat, bagaimana diimplementasikan, dan apakah hasilnya. Metode penelitian studi kasus mempunyai manfaat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam hubungan nyata, menggambarkan sebuah konteks kehidupan, evaluasi, dan eksplorasi.

Inti studi kasus, yaitu kecenderungan utama di antara semua ragam studi kasus adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apa yang dihasilkannya. Metode studi kasus pada dasarnya terfokus pada dua alasan:

⁵⁸ David Easton, *A Framework to Political Analysis*, Englewood Cliffs: N.J Prentice-Hall, 1965 hlm. 77

- a. studi kasus merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasan penelitian kualitatif yang sifatnya spesifik, khusus, dan berskala lokal;
- b. studi kasus banyak digunakan dalam penelitian pendidikan yang mendapat perhatian dari para pemerhati, praktisi, dan peneliti pendidikan. Pembahasan metode studi kasus diarahkan pada konsep dasar, metodologi, dan proses studi, kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga halnya jika diterapkan dalam bidang sosial politik dalam suatu negara.

Jika berhubungan dengan fokus penelitiannya, metode studi kasus dapat digunakan apabila memenuhi unsur sebagai berikut.

- a. Peneliti memiliki informasi yang tidak sedikit tentang hal yang akan diteliti.
- b. Fokus penelitiannya adalah fenomena yang sedang berlangsung.
- c. Ada banyak sumber data.⁵⁹

Masalah praktik bisnis tentara bayaran di Irak telah memenuhi ketiga unsur di atas. Informasi mengenai praktik bisnis tentara bayaran di Irak dapat diperoleh dari berbagai media cetak dan elektronik serta internet. Buku-buku dan majalah yang bertema seputar perang Irak juga banyak memiliki informasi mengenai bisnis tentara bayaran yang dilakukan AS di negara tersebut. Yang tidak kalah kaya informasinya adalah buku dan majalah yang bertema tentara bayaran di dunia.

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Pada umumnya, riset kualitatif menjadikan data hasil observasi dan wawancara sebagai data primer. Data selanjutnya yang dijadikan sebagai pelengkap adalah data yang bersifat dokumen yang sudah tertulis atau

⁵⁹ Robert K Yin., *Case Study Research*, Newbury Park: CA Sage, 1984, hlm. 15

terekam meskipun data-data ini juga bisa menjadi data primer. Data-data dokumen ini kemudian memerlukan teknik khusus dalam pengumpulan dan analisisnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah studi dokumen. R.K Yin menyinggung terdapat beberapa jenis dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian yaitu sebagai berikut.⁶⁰

- a. Surat, memorandum, dan pengumuman resmi.
- b. Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dan laporan-laporan peristiwa tertulis lainnya.
- c. Dokumen-dokumen administratif-proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen intern lainnya.
- d. Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada "situs" yang sama.
- e. Kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain yang muncul di media massa.

Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen membantu proses verifikasi ejaan dan judul atau nama yang benar dan organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. Kedua, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain; jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan. Ketiga, inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen sebagai contoh, dengan mengobservasi pola tembusan karbon dari dokumen tertentu.⁶¹

Oleh karena nilainya secara keseluruhan, dokumen memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data studi kasus. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang relevan begitu

⁶⁰ Robert K. Yin, *Op cit*, hlm. 103

⁶¹ *Ibid*, hlm. 104

penting bagi proses pengumpulan data. Untuk mempertahankan objektivitas bahasan dari data yang didapat dalam penulisan ini, penulis sangat berhati-hati dalam pengambilan dokumen, terutama terkait dengan tidak terlepasnya pengaruh intervensi orang atau organisasi atau aktor lainnya yang dengan sengaja mengubah dokumen demi kepentingannya sehingga validitas dokumen tidak lagi dapat dipertahankan.

Akses terhadap dokumen dan data yang bersifat primer sangatlah sulit dilakukan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh objek penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini berarti surat-surat kontrak beserta dokumen proyek rekonstruksi Irak yang dikeluarkan pemerintah AS dan korporasi-korporasi yang terlibat. Data sekunder adalah data yang tidak berasal langsung dari objek penelitian. Data-data yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, majalah serta internet adalah beberapa contoh data sekunder.

Untuk menguji keabsahan data sekunder tadi, maka peneliti akan menggunakan metode keumuman dan frekuensi informasi yang diperoleh dari data sekunder. Semakin sering suatu data ditemukan melalui media yang berbeda-beda maka semakin kuatlah keabsahan data tersebut.

3.5 Analisis Data Kasus

Dari data sekunder yang terkumpul, selanjutnya dilakukan klasifikasi analisis berdasarkan kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian, data itu diinterpretasikan dalam bentuk narasi dan deskripsi (*narrative descriptive*) yang dalam metodologi penelitian lebih sering dikenal dengan metode *hermeneutic interpretative*. Dalam konteks ini, terdapat dua kategori data dasar, yaitu sebagai berikut.

- a. Data-data dalam bentuk dokumen yang menggambarkan aturan-aturan dan kebiasaan (konvensi) yang kemudian diformalkan dalam naskah peraturan pemerintah atau negara.
- b. Data-data dalam bentuk pernyataan para elite korporasi dan pemerintah yang menggambarkan pandangan mereka tentang kebijakan invasi Irak dan penggunaan tentara bayaran.

Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang baik. Proses analisis data dalam studi kualitatif digambarkan oleh Strauss & Corbin sebagai berikut.⁶⁵

.....data are broken down into discrete parts, closely examined, compared for similarities and differences, and questions are asked about the phenomena as reflected in the data. Through this process, one's own and others' assumptions about phenomena are questioned or explored, leading to new discoveries.

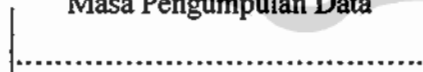
Senada dengan pernyataan di atas, Jorgensen mendefinisikan analisis sebagai:⁶⁶

.... a breaking up, separating or disassembling of research materials into places, parts, elements, or units. With the facts broken down into manageable places, the researcher sorts and shifts them, searching for types, classes, sequences, patterns, or wholes.

Lebih lanjut Matthew B Miles & A Michael Huberman mendeskripsikan model analisis data ini dengan istilah Komponen Analisis Data Model Alir (*Flow Model*) sebagai berikut.⁶⁷

Tabel. 1

Masa Pengumpulan Data



⁶⁵ Agus Salim, *op.cit*, hlm 21

⁶⁶ Kristi E.Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, Jakarta: LPSP3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1994, hlm. 26

⁶⁷ Matthew B Miles & Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 18

Reduksi Data			A N A L I S A
Atisipasi	Selama	Pasca	
Penyajian Data			
Atisipasi	Selama	Pasca	
Penarikan Kesimpulan / Verifikasi			
Atisipasi	Selama	Pasca	

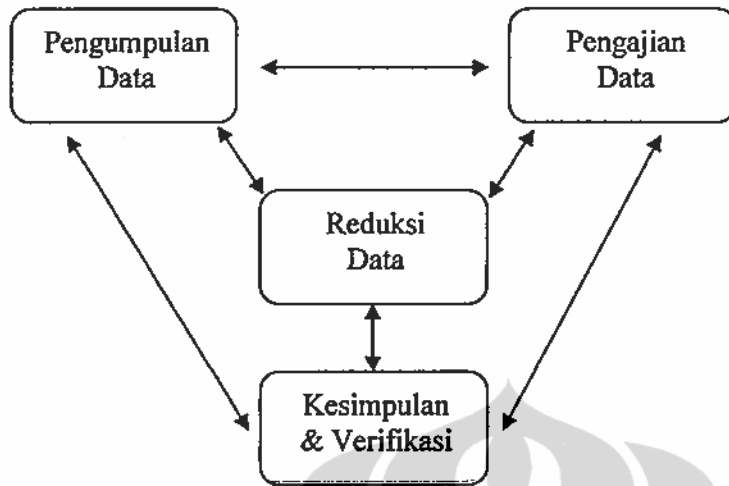
[Komponen Analisis Data Model Alir (Flow Model)]

Berbeda dari analisis data pada studi kuantitatif yang dilakukan sesuai aktivitas pengumpulan data, proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca-pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan oleh Miles & Huberman, analisis data kualitatif dikatakan sebagai model alir (*Flow Model*).

Meski demikian, proses analisis tidak menjadi kaku oleh batasan-batasan kronologis tersebut. Komponen-komponen analisis data yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Karakter yang demikian menjadikan analisis data kualitatif disebut pula sebagai model interaktif, seperti tabel berikut ini.⁶⁸

⁶⁸ Matthew B. Miles, *Ibid*, hlm. 20

Tabel. 2



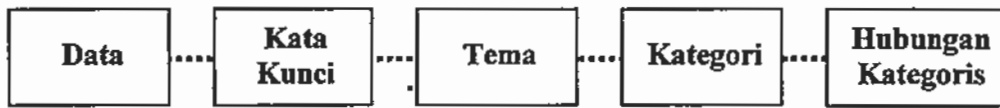
[Komponen Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model*)]

Proses-proses analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut.

- a. Reduksi data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- b. Penyajian data (*Data Display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*), Dari permulaan pengumpulan data periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dilapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi.

Dengan memerhatikan dua model alur analisis di atas, secara teknis, proses analisis dalam metode penelitian kualitatif dapat diilustrasikan dalam bentuk skema berikut.⁶⁹

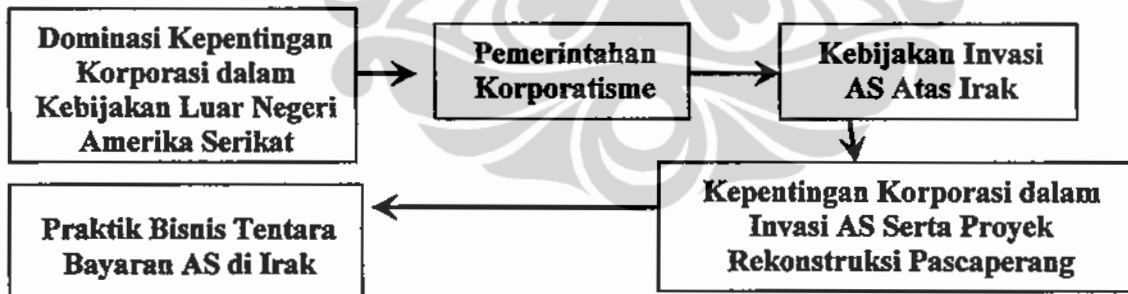
Tabel 3



[Alur Teknis Analisis]

Dengan alur tersebut, periset kualitatif mula-mula akan membaca hasil catatan lapangan, mendengarkan rekaman wawancara, membaca transkrip wawancara untuk mendapatkan pemahaman tentang kasus yang dikaji. Kemudian, periset dapat melanjutkan aktivitas analisis dengan membuat daftar seluruh tema yang muncul dan mulai memikirkan hubungan yang mungkin ada di antara tema-tema yang muncul. Terakhir, berdasarkan catatan yang telah dimiliki, periset dapat membuat master pola yang ditemukan dan siap untuk dikemukakan sebagai laporan akhir hasil studi.

Terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini berdasar data-data yang peneliti miliki, maka tujuan dari analisis data kasus mampu menjawab bahasan yang terkonsep dalam "master pola", sebagai berikut.



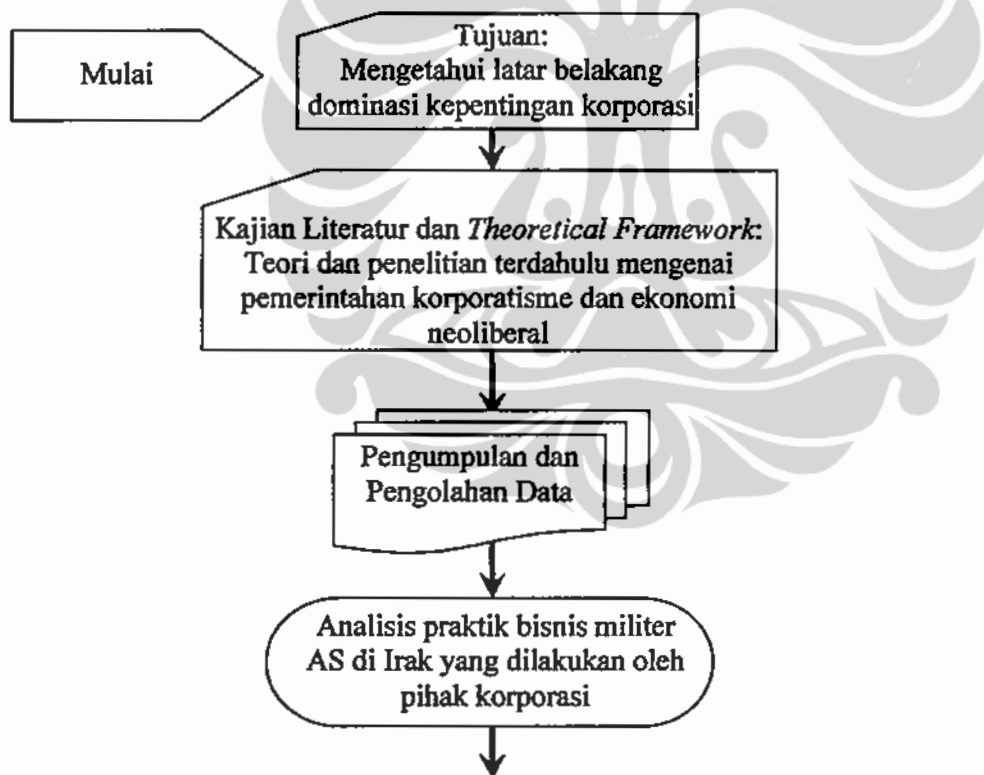
⁶⁹ *Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1994, hlm 95

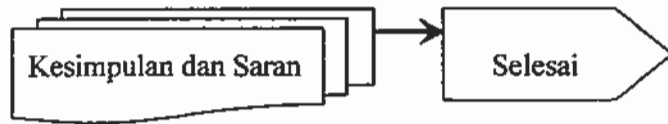
⁷² Pada 2006, Palestina berhasil melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, yang memunculkan partai Hamas sebagai pemenang. Kemenangan Hamas ini tidak diakui oleh AS. AS menganggap Hamas sebagai teroris yang mengancam Israel.

Alur penelitian ini secara bertahap dapat digambarkan dalam beberapa langkah berikut.

- a. Pengumpulan data: membeli dan membuat fotokopi buku-buku dan media, mengkliping berita-berita dan laporan jurnalistik, serta mem-*print-out* data-data yang didapat dari situs internet.
- b. Penyeleksian dan pengorganisasian data: dari hasil pengumpulan data, penulis melakukan penyeleksian dan pengelompokan berdasarkan pokok masalah tiap bab, lalu diolah secara sistematis, kemudian dirumuskan dengan menggunakan pola pemantapan isi setiap data dan informasi yang telah diolah.
- c. Analisis dan penyajian data: analisis dan penyajian data dalam penulisan penelitian ini diatur secara sistematis.

Gambar 3-1





[Flowchart Metodologi Penelitian]



BAB 4
BISNIS TENTARA BAYARAN PASCA-PERANG IRAK
TAHUN 2003

4.1 Kebijakan Invasi Irak Tahun 2003

Pada 21 Maret tahun 2003, Amerika Serikat secara resmi memulai serangannya terhadap Irak. Invasi ini tidak mendapatkan mandat dari PBB, tetapi didukung oleh negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Tiga belas tahun sebelumnya, Amerika Serikat juga pernah berperang dengan Irak dalam Perang Teluk tahun 1991.

Kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menginvasi Irak bukanlah sebuah kebijakan yang bersifat instan dan reaksioner, melainkan sebuah kebijakan yang telah dipersiapkan sejak lama. Peristiwa-peristiwa yang mengawali lahirnya kebijakan AS dalam konteks opini global telah dimulai sejak peristiwa pengeboman gedung WTC di New York tanggal 11 September 2001. Sejak saat itulah, pemerintahan George W. Bush gencar mengarahkan opini masyarakat dunia untuk mendukung kebijakan-kebijakannya di Timur Tengah.

4.1.1 Pengangkatan Isu Demokratisasi dan Terorisme

Sejak berakhirnya era Perang Dingin yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet dan Eropa Timur, Francis Fukuyama menyebut

abad 21 sebagai kemenangan gemilang demokrasi dan liberalisme. Rezim-rezim yang berkuasa di Amerika selalu menggunakan isu demokratisasi sebagai alat untuk mengubah tatanan regional di Timur Tengah sesuai keinginan mereka. Rezim-rezim yang cenderung memusuhi AS lebih sering mendapatkan tekanan dalam konteks demokratisasi ala Amerika Serikat.

Nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat ini pada kenyataannya menghadapi sebuah paradoks. Hal ini bisa dilihat dari kedekatan Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah yang tidak demokratis seperti Arab Saudi dan Kuwait. Kedua negara tersebut menerapkan sistem monarki dalam pemerintahannya, tetapi tidak mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat.

Sikap Amerika terhadap sebuah rezim pemerintahan dalam konteks demokratisasi sangat ditentukan oleh karakter rezim negara itu sendiri. Apabila rezim sebuah pemerintahan itu bersikap kooperatif dengan AS (bersahabat), maka rezim tersebut tidak akan mendapatkan tekanan. Meskipun sistem pemerintahannya tidak demokratis, rezim seperti itu akan tetap didukung AS. Sebaliknya, apabila sebuah negara yang sudah melaksanakan demokrasi dengan baik, tetapi kemudian memunculkan pemerintahan yang anti-AS, maka negara tersebut akan mendapatkan tekanan yang keras. Hal ini bisa dilihat pada kasus pemilu Palestina tahun 2006.⁷²

Demokrasi yang diperjuangkan AS di wilayah Timur Tengah memang mendapatkan sambutan yang cukup luas. Beberapa negara tengah dan telah memulai proses demokrasi di negaranya. Namun, demokratisasi yang dilaksanakan ini memunculkan suatu kemungkinan baru akan lahirnya sebuah rezim yang justru anti-AS dan Barat. Melihat kenyataan tersebut, Amerika Serikat membutuhkan satu instrumen lagi untuk menciptakan sebuah rezim pemerintahan yang bersahabat dengannya.

Konstruksi motif ini sangat selaras dengan ambisi para korporat di belakang kampanye Bush yang juga ingin ikut terlibat secara aktif dalam investasi minyak di Timur Tengah. Para pengusaha minyak inilah yang kemudian menjadi penyumbang terbesar kabinet Bush di kemudian hari.

3. Bush adalah seorang penganut Kristen yang konservatif. Bahkan, beberapa kalangan menyebutnya sebagai orang yang sangat taat. Gaya konservatifnya itu menjadikannya sebagai orang yang fobia terhadap Islam. Bush adalah seorang presiden Amerika yang dengan sangat jelas mengobarkan perang salib dalam dadanya. Hal itu terlihat dari pernyataan-pernyataannya terhadap Islam pasca-peledakan WTC 9/11 2001. Sifat anti-Islam atau Islam-fobia Bush ini kemudian mudah terjewantahkan dalam kebijakan perang terhadap rezim Islam yang anti-Barat. Di lain pihak, Saddam Hussein juga menyatakan bahwa perlawanannya terhadap AS adalah sebuah perang suci (Jihad) yang direstui oleh Tuhan. Jadilah mereka berdua membuat perang salib ala baru di wilayah Teluk. Para korporat yang melihat situasi ini tentu saja menganggap bahwa Bush memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menyerang Irak daripada kandidat presiden lainnya.

Dengan tiga faktor di atas, golongan Yahudi menganggap George W. Bush adalah tokoh yang memiliki kemungkinan besar untuk menyerang Irak.

Jika ketiga hal di atas merupakan motif dukungan golongan Yahudi pada kampanye Bush dan Partai Republik, maka yang berikut ini adalah beberapa motif khusus golongan Yahudi terkait dukungan mereka kepada Israel. Dukungan yang diberikan kepada Israel didasarkan kepada kesamaan etnis dan agama. Mereka sama-sama berdarah Yahudi sekaligus beragama Yahudi.

Motif dukungan kepada Israel berorientasi kepada keamanan negara Yahudi tersebut. Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah

yang memiliki banyak musuh. Sejak kedatangan mereka di tanah Palestina, negara ini selalu mendapat ancaman dari negara tetangganya. Berikut beberapa motif utama itu.

1. Irak adalah negara yang sangat teguh memusuhi Israel sebagai penjajah di tanah Arab. Irak, di bawah pemerintahan Saddam Hussein, juga sangat mendukung perjuangan Hamas. Hamas adalah faksi bersenjata di Palestina yang selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Dukungan Saddam terhadap Hamas sangat mengganggu kenyamanan Israel yang kerap bersitegang dengan Hamas. Selain itu, Irak adalah negara Timur Tengah yang memiliki kekuatan militer yang sanggup menggempur Israel. Ancaman-ancaman AS untuk menjatuhkan Saddam Hussein sering dibalas pula dengan ancaman Irak untuk menghabisi Israel. Hal itu karena jarak antara AS dengan Irak sangat jauh sehingga tidak memungkinkan Irak untuk mengirimkan rudalnya. Sebaliknya, jarak antara Israel dengan Irak adalah jarak yang relevan dan sangat efektif untuk serangan rudal.
2. Irak adalah negara yang memiliki hubungan kuat dengan Suriah. Suriah sendiri adalah musuh besar Israel. Suriah memiliki kepentingan terhadap Israel sebagai peninggalan perang tahun 1967. Suriah menginginkan Israel mengembalikan wilayah dataran tinggi Golan yang direbut Israel pada perang tahun 1967. Walaupun hubungan Irak dengan Suriah kerap dilanda konflik horizontal, keduanya cenderung bersatu dalam memusuhi Israel. Menetralisasi kekuatan Irak sama artinya dengan mengeliminasi kemungkinan bersatunya kedua negara ini dalam melawan Israel.
3. Irak di bawah Saddam Hussein adalah sebuah negara yang ingin menjadi penguasa minyak di wilayah Teluk. Ambisi Saddam Hussein untuk menguasai minyak Teluk dibuktikan dengan perang yang dilakukannya dengan Iran, juga dengan Kuwait. Perang dengan Iran adalah sebuah upaya Saddam untuk menguasai jalur Selat Hormuz yang sangat strategis

dalam distribusi minyak dari dan ke wilayah Teluk. Perang Saddam dengan Kuwait lebih jelas lagi. Saddam berusaha menguasai Kuwait yang diklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Klaim ini berlatar belakang keinginan Saddam untuk menguasai kandungan minyak di negara tersebut. Keberadaan Irak sangat mengganggu distribusi energi bagi Israel yang didapatkan dari wilayah Teluk.

Penelitian ini tidak akan membahas latar belakang ideologi dari kedua partai besar Amerika Serikat, karena pada dasarnya, pemilu presiden adalah hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan ideologi kedua partai. Dukungan para pengusaha dan korporasi terhadap kampanye Bush lebih disebabkan orientasi kebijakan Bush yang tampak lebih agresif terhadap Irak. Tentu saja, hal ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan organisasi lobi Yahudi seperti PNAC dan CLI. Gaya Bill Clinton dan partai demokratnya yang terlihat lebih menyenangkan jalur diplomasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai bagi doktrin PNAC.

Ada sekelompok orang Yahudi yang berniat untuk menegakkan hegemoni AS di dunia. Kemudian, mereka bergabung dalam organisasi yang dinamakan Project for the New American Century (PNAC). Organisasi ini didirikan pada 1997 sebagai sebuah organisasi nonprofit berisi proyek-proyek pendidikan untuk meningkatkan kepemimpinan global AS. Para pengurus proyek ini adalah William Kristol yang menjabat sebagai ketua serta para direktur seperti Robert Keagan, Devon Gaffney Cross, Bruce P Jackson serta John R Bolton. Untuk lebih memahami maksud dari proyek ini, ada baiknya kita membaca *statement of principles* milik mereka.

"Ketika abad ke-20 akan berakhir, Amerika Serikat muncul sebagai suatu kekuatan unggul di dunia. Setelah memimpin Barat meraih kemenangan dalam perang dingin, Amerika mendapatkan suatu kesempatan dan tantangan: Apakah Amerika Serikat memiliki visi untuk membangun

berdasarkan apa yang telah dicapai dalam dekade-dekade sebelumnya? Apakah Amerika Serikat telah memutuskan untuk membentuk abad baru yang menguntungkan bagi kepentingan-kepentingan dan prinsip Amerika?

Yang kita butuhkan adalah militer yang kuat dan siap menghadapi baik tantangan masa kini maupun masa depan; sebuah kebijakan luar negeri yang tegas dan dengan tujuan tertentu untuk memperjuangkan prinsip-prinsip Amerika di luar negeri; dan kepemimpinan nasional yang menerima tanggung jawab global Amerika Serikat.

Tentu saja, Amerika Serikat harus bijaksana dalam menggunakan kekuatannya. Tetapi, kita tidak dapat dengan aman menghindari tanggung jawab kepemimpinan global. Amerika Serikat memiliki peranan besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Jika kita melalaikan tanggung jawab, kita menghadapi tantangan pada kepentingan-kepentingan fundamental. Sejarah abad ke-20 semestinya telah mengajari kita bahwa adalah penting menciptakan sebuah lingkungan sebelum muncul krisis; dan mengatasi ancaman-ancaman sebelum ancaman itu berubah menjadi mengerikan."

Gagasan untuk membentuk PNAC di Amerika Serikat sudah ada sejak 1992. Para penandatangan awal dokumen pendirian adalah orang-orang yang berasal dari kalangan akademisi dan politikus. Beberapa orang di antaranya bahkan memegang jabatan penting dalam rezim presiden Bush. Para penandatangan itu adalah sebagai berikut.

1. Elliot Abrams
2. Gary Baeur
3. William J. Bennett
4. Jeb Bush
5. Dick Cheney
6. Elliot A. Cohen
7. Midge Decter
8. Paula Dobriansky
9. Steve Forbes

10. Aaron Friedberg
11. Francis Fukuyama
12. Frank Gaffney
13. Fred C. Ikle
14. Donald Kagan
15. Zalmay Khalilzad
16. I Lewis Libby
17. Norman Phodoretz
18. Dan Quayle
19. Peter W. Rodman
20. Stephen P. Rosen
21. Henry S. Rowen
22. Donald Rumsfeld
23. Vin Weber
24. George Wiegel
25. Paul Wolfowitz

PNAC adalah organisasi yang sangat aktif melobi pemerintah AS untuk menyerang Irak dan menyingkirkan kekuasaan Saddam Hussein. Sebagai catatan khusus, banyak dari anggota PNAC itu yang merupakan warga Amerika yang berdarah Yahudi. Kekuatan lobi Yahudi yang ada pada organisasi lainnya, seperti AIPAC lebih berorientasi kepada kepentingan Israel baik politik ataupun ekonomi. Namun, PNAC lebih menitikberatkan orientasi kepada hegemoni Amerika Serikat dalam bidang ekonomi yang notabene dikuasai oleh kelompok Yahudi. Hegemoni ekonomi ini kemudian ditegakkan dengan cara perang dan agresi. Terdapat irisan yang jelas antara lobi Yahudi di parlemen seperti AIPAC dengan lobi Yahudi non-parlemen seperti PNAC.

Terkait dengan konteks gagasan neoliberalisme ekonomi Amerika Serikat, para pencetus teori ekonomi tersebut juga merupakan orang-orang yang berdarah Yahudi. Tokoh ekonomi seperti Milton Friedman dan F.A.Hayek adalah orang-orang Yahudi keturunan yang tinggal di Amerika Serikat. Mereka berdua inilah yang kemudian menjadi bapak teori ekonomi neoliberal di dunia.

Dalam konteks rencana menyerang Irak, PNAC membentuk sebuah kelompok yang disebut Komite untuk Pembebasan Irak (*Committee for The Liberation Iraq/CLI*). Komite yang beranggotakan orang-orang PNAC ini terus menerus menyebarkan gagasan kepada masyarakat AS tentang perlunya menyerang Irak. Masyarakat AS banyak dipengaruhi oleh opini media yang memberitakan pembentukan mereka. Saat itu, mayoritas media memberitakan CLI sebagai organisasi yang ingin memajukan perdamaian regional. Selain itu, diberitakan juga bahwa lembaga ini akan menciptakan kebebasan politik dan meningkatkan keamanan internasional. Kemasan yang begitu indah terdengar itu membungkus niat sesungguhnya untuk menghabisi rezim Saddam Hussein di Irak.

Nama "Liberation Iraq" dimaknai sebagai usaha membebaskan Irak dari rezim diktator Saddam Hussein yang dianggap sangat menyengsarakan rakyat Irak. Komite ini adalah lembaga non-pemerintah yang menginginkan Irak bebas dari Saddam Hussein untuk selamanya. Lebih tepatnya, menyingkirkan Saddam Hussein untuk selamanya. Mereka juga melakukan pendekatan kepada pemerintah AS. Salah satu usaha nyata mereka dalam melobi pemerintah AS adalah menemui Condoleeza Rice yang saat itu masih menjabat sebagai penasihat keamanan AS.

Dukungan para pengusaha terhadap Partai Republik yang menyenangi perang sudah ada sejak lama dalam dinamika politik AS.

Wall Street Journal tanggal 17 Maret 2003 melaporkan bahwa korporasi-korporasi yang mendapatkan proyek rekonstruksi di Irak memiliki koneksi yang kuat dengan Partai Republik. Dikatakan dalam jurnal tersebut bahwa 2/3 dari sekitar 2,8 juta US\$ dana kontribusi korporasi-korporasi tersebut mengalir ke Partai Republik sejak tahun 1999—2002.

4.2.2 Pembentukan Kabinet Korporatis (Pemerintahan Korporatisme)

Perang Irak yang digelar tanpa adanya mandat PBB telah memunculkan banyak sekali kajian terhadap latar belakang kepentingan Amerika Serikat. Negara yang seolah begitu bernafsu untuk menguasai Irak. Bagaimanapun, kebijakan invasi itu tidak dapat dilepaskan dari sosok-sosok yang ada dalam pemerintahan George W. Bush. Sosok-sosok itulah yang kemudian terkenal dengan sebutan golongan neo-konservatif—yang menggilai perang sebagai cara untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah keuntungan ekonomi. Dalam istilah lain, mereka juga sering disebut sebagai kaum *Hawkish*.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kabinet Bush yang korporatis, kita perlu mengetahui dulu istilah neokonservatif yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Paul Robinson, neokonservatisme adalah sebuah filosofi politik yang dianut oleh pemerintahan Amerika Serikat yang mendukung penggunaan kekuatan ekonomi dan militer untuk menyebarkan faham liberalisme, demokrasi dan hak asasi manusia.⁹⁶ Secara sepintas, ideologi ini tidak jauh berbeda dengan konservatisme. Hal yang membedakan di antara keduanya terdapat pada sisi peran negara dalam sistem perekonomian. Orang-orang neokonservatif meminimalkan peran negara dalam sektor ekonomi. Paham

⁹⁶ Paul Robinson, *Dictionary of International Security, Polity*, 2008, hal.135, dari www.wikipedia.org

ini sangat mendukung terciptanya pasar bebas yang dianggap akan memajukan kehidupan sosial masyarakat.⁹⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka istilah neokonservatif sangat dekat dengan istilah neoliberalisme. Keduanya terkait erat dalam satu pembahasan mengenai fenomena kebijakan ekonomi-politik Amerika Serikat dewasa ini. Neokonservatif dekat dengan ranah politik, sedangkan neoliberalisme digunakan dalam ranah ekonomi.

Istilah neokonservatif mulai dikenal ketika seorang tokoh sosial-demokrat⁹⁸ di AS yang bernama Michael Harrington menulis artikel dalam sebuah majalah yang membicarakan kebijakan kesejahteraan. Dalam artikel tersebut, Harrington menggunakan istilah neokonservatif untuk mengklasifikasi golongan yang kritis terhadap liberalisme. Istilah ini semakin terkenal di era pemerintahan George W. Bush saat hampir setiap media pernah menggunakannya untuk mengulas kebijakan-kebijakan Presiden Bush.⁹⁹

Istilah ini semakin jelas dan sering digunakan di era pemerintahan George W. Bush saat dia mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dikenal dengan nama "Doktrin Bush". Doktrin tersebut adalah sebuah kebijakan presiden Bush yang terkenal dengan nama "pre-emptive strike" atau serangan pencegahan. Secara formal, doktrin ini tertuang dalam naskah yang diterbitkan Dewan Keamanan Nasional pada 20 September 2002 yang berjudul "National Security Strategy of The United States". Dengan doktrin tersebut, Amerika Serikat dapat menyerang pihak-pihak yang

⁹⁷ Andrew Fiala, *The Just War Myth*, Rowman & Littlefield, 2008, hal.133, dari www.wikipedia.org

⁹⁸ Sosial demokrat dapat diartikan sebagai ideologi politik sosialis yang baru yang tidak lagi menggunakan cara-cara anarkis dan revolusi untuk mencapai tujuan politik. Kaum sosial demokrat tidak membuat sebuah perlawanan terhadap sistem demokrasi yang berlaku, tapi justru ikut masuk ke dalam sistem tersebut dan mendirikan organisasi politik atau partai politik. Biasanya, mereka menamakan partai mereka dengan kata buruh atau sosial democrat. www.wikipedia.org

⁹⁹ J.M. Marshall, "Remaking the World: Bush and the Neoconservatives", *Foreign Affairs*, November/Desember 2003. Diterbitkan ulang pada bulan Desember, 2008.

dianggap sebagai ancaman bagi keamanan AS sekalipun belum ada bukti otentik terhadap tuduhan tersebut. Jika disederhanakan, kita dapat mengartikan doktrin ini dengan kalimat "menyerang sebelum diserang". Banyak dari para pengamat kebijakan politik di Amerika Serikat menganggap doktrin ini merupakan perwujudan dari ide yang pernah digagas oleh Paul Wolfowitz pada 1992 mengenai rencana sistem pertahanan nasional yang saat itu dianggap sebagai ide yang kontroversial.¹⁰⁰

Menurut Trias Kuncahyono dalam bukunya *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*, yang dimaksud dengan kaum *hawkish* adalah mereka yang menyenangi perang sebagai bentuk penyelesaian masalah. Kata "*hawkish*" berasal dari kata "*hawk*" yang artinya 'burung elang'. Sesuai dengan karakter yang dimiliki burung elang, kaum *hawkish* dianggap memiliki sifat yang ganas dan garang. Istilah ini berlawanan dengan istilah *dovish* (*dove*: merpati) yang berarti cinta damai.

Dalam istilah lainnya, George Soros menyebut kaum Hawkish ini dengan sebutan kelompok ekstremis.¹⁰¹ Menurut Soros, AS sebagai sebuah pemerintahan negara terkuat di dunia telah jatuh ke tangan kelompok ekstremis yang menjalankan konsep mentah darwinisme sosial. Konsep Darwinisme sosial adalah perjuangan untuk bertahan hidup dengan menggunakan kekuatan. Pandangan ini juga bisa disebut *survival of the fittest*, "yang paling kuat, dia yang bertahan".

Jika Trias Kuncahyono cenderung menyebut rezim Bush sebagai kelompok Hawkish yang menggilai perang, saya lebih senang menyebut mereka sebagai rezim korporasi. Alasannya jelas, mereka adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan ekonomi sangat kuat

¹⁰⁰ Francis Fukuyama, "After Neoconservatism", *New York Times Magazine*, 19 Februari, 2006

¹⁰¹ George Soros, *The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power*, New York, Public Affair, 2004.

terhadap Timur Tengah. Dalam konteks ini, saya sedikit mengabaikan ideologi politik yang mereka anut ataupun berbagai stempel religi yang kadang kental dengan mereka. Isu demokrasi, HAM, ataupun benturan Islam dan Barat adalah sebuah pengalihan isu sebenarnya.

Di dalam negeri AS sendiri, masyarakatnya sudah sangat mengenal karakter pemerintahan yang senantiasa didikte oleh pihak perusahaan. Selama perang dingin, kepentingan-kepentingan pihak korporasi tersebut dibungkus dengan kepentingan militer. Pihak korporasi dengan sangat mudah menggunakan alibi militer untuk membantu pemerintah dalam konteks persaingan dengan Uni Soviet. Militer dijadikan pintu masuk bagi korporasi-korporasi besar untuk meraup keuntungan dari proyek yang diberikan negara. Setelah perang dingin berakhir, kepentingan militer sudah tidak lagi relevan. Untuk sebuah negara sebesar Amerika Serikat, hal yang dijadikan isu pengganti adalah hak asasi manusia. Hal inilah yang kemudian dijadikan pintu masuk untuk menggarap lahan investasi yang disediakan oleh negara ketika melakukan ekspansi ke negara lain, dalam konteks ini Irak.

Seperti sebuah transaksi perdagangan, dukungan para korporat dalam kampanye Bush menuntut sebuah kompensasi. Kompensasi itu adalah duduknya para korporat tersebut dalam kabinet pemerintahan secara langsung. Mereka menduduki pos-pos strategis di pemerintahan Bush seperti sebuah *close recruitment*. Saking banyaknya pengusaha yang duduk dalam kabinet Bush, Partai Republik sampai disebut sebagai "*The Party of Money*". Bahkan, menurut Amy Goodman dan David Goodman, kabinet Bush adalah suatu bentuk "oligarki korporasi".¹⁰²

¹⁰² Lihat Amy Goodman dan David Goodman: *Berperang Demi Uang: Membongkar Ketamakan dan Keganasan elite Politik Amerika*, terj, Jakarta: Profetik, 2005.

Para pejabat yang termasuk ke dalam oligarki politik seperti yang dikatakan oleh Amy Goodman, antara lain sebagai berikut.¹⁰³

1. Richard Bruce Cheney (wakil Presiden Amerika Serikat). Dia adalah seorang mantan CEO Halliburton Energy Services periode 1995–2000.
2. Condoleeza Rice (Penasihat Kemanan Nasional dan Menteri Luar Negeri). Dia adalah mantan anggota direksi Chevron Corporation selama satu dasawarsa.
3. Donald Rumsfeld (mantan menteri pertahanan AS) adalah seorang mantan wakil pemimpin perusahaan Western Oil yang bergerak di bidang Migas. Selain itu, dirinya adalah partner George W. Bush di perusahaan Enron Energy yang menjadi perusahaan pertama Amerika yang ambruk ketika krisis keuangan tahun 2001.¹⁰⁴
4. Spencer Abraham (Menteri Energi). Dia adalah mantan penerima donasi kampanye terbesar dari industri otomotif ketika masih menjadi senator.
5. Donald L. Evans (Menteri Perdagangan). Dia adalah mantan CEO dan direktur Tom Brown Inc yang bergerak dalam bidang migas.
6. Gale Norton (menteri Dalam Negeri). Dia adalah mantan pengacara untuk Delta Petroleum.

Beberapa tokoh penting dalam pemerintahan Amerika Serikat yang berasal dari kelompok pebisnis adalah:

Sekretaris Pertahanan	: Pete Aldrige Aerospace Corporation
Sekretaris Angkatan Darat	: Thomas White Enron
Sekretaris Angkatan Laut	: Gordon England General Dynamics
Sekretaris Angkatan Udara	: James Roche Northrop Grumman

Tidak hanya konversi para elite pengusaha yang merambah dunia politik, hal sebaliknya juga terjadi di era pemerintahan George W. Bush.

¹⁰³ *Ibid*, hlm.39

¹⁰⁴ Rusydan, "Demokrasi AS dan Politik Uang", www.khilafah.com, 25 Maret 2008.

Beberapa mantan politisi dan pejabat publik beralih profesi sebagai pengusaha. Beberapa contoh di antara mereka adalah mantan Menteri Luar Negeri AS, George Schultz yang beralih menjadi salah seorang direksi Betchel. Kemudian, mantan Sekretaris Angkatan Bersenjata, Kenneth Oscar, yang beralih menjadi wakil presiden Fluor. Kenneth Oscar adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi anggaran pendapatan Pentagon ketika masih menjadi sekretaris angkatan bersenjata.

Jadi, dapat dikatakan dalam era George W. Bush terdapat dua fenomena besar konversi "*rulling elite*"¹⁰⁵ yang terdapat di Amerika Serikat. Fenomena pertama adalah konversi para pengusaha menjadi para politisi. Fenomena yang kedua adalah konversi para politisi menjadi pengusaha. Kedua konversi ini menempatkan mereka semua dalam posisi elite, baik dalam perusahaan ataupun struktur pemerintahan. Yang menjadi perhatian adalah kedua konversi ini terjadi dalam era yang bersamaan dan berjalan beriringan dalam masa pemerintahan George W. Bush.

Adalah sesuatu yang sangat sederhana dan mudah untuk memahami gaya kepemimpinan rezim Bush. Mereka adalah para pengusaha yang sedang memanfaatkan status mereka sebagai pimpinan dari sebuah negara paling kuat di dunia. Jika dibahas secara ideologis, mereka inilah pengusung neo-liberalisme di Amerika Serikat. Mereka ada di ujung tombak penegakan liberalisasi pasar. Sebuah ideologi yang menempatkan pasar sebagai satu-satunya pihak yang mengatur kegiatan ekonomi.

Apa pun sebutannya, Hawkish, Ekstremis, Neo-konservatif ataupun korporatis, tetaplah merujuk kepada sekelompok orang yang berniat menegakkan hegemoni Amerika Serikat di dunia yang telah bergabung sebelumnya dalam PNAC dan CLI. Mereka itulah cikal bakal

¹⁰⁵ Istilah ini saya kutip dari makalah Anis Baswedan yang dipresentasikan pada Pelatihan Kepemimpinan PKS yang diadakan di Puspitek Tangerang bulan Juni 2009.

para tokoh korporatisme dalam struktur pemerintahan AS. Mereka juga yang kemudian banyak melahirkan kebijakan yang sangat pro terhadap kepentingan bisnis.

Dalam konteks penelitian ini, kekuatan rezim yang berisikan orang-orang yang bernaluri bisnis adalah sesuatu yang sangat berperan dalam keberadaan tentara bayaran di Irak. Kabinet George W. Bush adalah kabinet yang dipenuhi oleh para politisi konservatif yang merangkap sebagai pengusaha bisnis terkemuka. Beberapa dari mereka memang sudah tidak aktif lagi menjabat sebagai eksekutif dalam perusahaan, tetapi cakar-cakar dan pengaruh mereka masih ada dan digunakan untuk menekan kebijakan pemerintah.

Jika dikaitkan dengan konsep teori pemerintahan korporatisme yang ditulis oleh Phillip Schmitter, maka fenomena yang terjadi dalam pemerintahan AS di bawah George W. Bush termasuk ke dalam bentuk korporatisme masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Schmitter, bahwa korporatisme masyarakat dicirikan dengan adanya suatu sistem perwakilan dan asosiasi kepentingan yang otonom dalam pemerintahan. Selain itu, korporatisme ini juga menenkankan diri pada aspek loyalitas dukungan terhadap legitimasi politik negara.¹⁰⁶

4.2.3 Motif Kepentingan Ekonomi dan Israel di balik Invasi

Pembahasan mengenai kedua motif ini memang sudah sangat sering dimunculkan dalam banyak penelitian ataupun jurnal. Sudah banyak peneliti yang menulis tentang kuatnya motif ekonomi di balik invasi AS ke Irak. Di sisi lain, tidak kalah banyak juga peneliti yang membahas motif kepentingan Israel di Timur Tengah atas invasi AS ke

¹⁰⁶ Lihat halaman 27 – 28

Irak. Sub-bab ini akan membedah kedua motif tersebut sekaligus sebagai sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

4.2.3.1 Motif Ekonomi

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi invasi AS atas Irak pada 2003. Dari faktor-faktor tersebut, ada yang diungkapkan secara resmi kepada dunia internasional dan ada juga yang tidak diungkapkan. Secara resmi, pemerintah Amerika Serikat membuat beberapa alasan utama yang melandasi serangannya atas Irak. Hal ini dinyatakan dalam keterangan resmi yang dibuat pemerintah termasuk pidato kepresidenan yang disiarkan.

Dari keterangan resmi yang dibuat Pemerintah Amerika Serikat, terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi serangannya atas Irak. Pertama, keinginan AS untuk menghentikan proyek pengembangan senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction*) di Irak. Kedua, menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang dianggap memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan mengancam stabilitas regional. Dari kedua alasan utama tersebut, pemerintah AS menjabarkannya dalam beberapa misi untuk Irak. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat menganggapnya sebagai tugas mulia. Beberapa misi invasi yang dianggap sebagai tugas mulia oleh AS antara lain:

1. mengakhiri rezim Saddam Hussein;
2. mengidentifikasi, mengisolasi dan mengeliminasi senjata pemusnah massal;
3. mencari, menangkap, dan membawa keluar para teroris dari negara Irak;
4. mengumpulkan data intelijen terkait yang bisa digunakan dalam jaringan pemberantasan terorisme internasional;
5. mengumpulkan data intelijen yang terkait dengan jaringan global di pasar gelap perdagangan senjata pemusnah massal;

6. mengakhiri sanksi dan secepat mungkin mengirim bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Irak;
7. mengamankan sumber-sumber ladang minyak yang menjadi milik rakyat Irak;
8. AS akan menjadi penolong rakyat Irak menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah pemerintahan yang representatif.¹⁰⁷

Semua alasan yang dikeluarkan oleh AS menjadi sebuah kebohongan yang diketahui secara luas oleh dunia internasional. Irak terbukti tidak mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang selama ini dituduhkan. Selain itu, Saddam Hussein tidak memiliki hubungan dengan Osama bin Laden beserta jaringan al-Qaeda.¹⁰⁸ Dari semua analisis terhadap motif invasi AS yang sesungguhnya, terdapat persepsi umum bahwa ekonomilah yang menjadi faktor dominan. Beberapa perhitungan yang terkait dengan motif ekonomi dan bisnis dari serangan AS atas Irak antara lain sebagai berikut.

1. Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak yang merupakan negara pemilik cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Centre for Global Energy Studies (CGES) London, Irak diperkirakan memiliki 112 miliar barrel cadangan minyak. Berdasarkan data tersebut, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia. Selain itu, menurut US Energy Information Administration, Irak memiliki 73 ladang minyak mentah dan hanya 15 ladang yang telah dikembangkan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Majalah *Angkasa* Edisi Koleksi, "Tentara Bayaran", April 2006, hlm. 8

¹⁰⁸ Pada 2005, AS berhasil menembak mati Abu Musa az-Zarqawi yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin al-Qaeda cabang Irak. Osama bin Laden dalam siaran televisi menyatakan tidak mengakui organisasi al-Qaeda pimpinan Abu Musa az-Zarqawi sebagai jaringannya. www.aljazeera.com, diakses pada 4 Juli 2006.

¹⁰⁹ Mohammad Safari dan Almuzamil Yusuf, *Perang Irak-AS: Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*, Jakarta: Centre for Middle East Studies, 2003, hlm. 13

2. Ingin menciptakan tatanan dunia baru yang "lebih aman" dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik.¹¹⁰ Hal ini merupakan strategi geopolitik AS di kawasan Timur Tengah. Bagi AS, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutu terdekatnya, Israel, di kawasan ini.

3. Proyek rekonstruksi pascaperang yang akan menguntungkan AS.¹¹¹ Kehancuran infrastruktur akibat perang akan melahirkan proyek-proyek rekonstruksi dengan dana yang besar. Sebagai pemeran utama invasi, AS akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk meraup keuntungan besar pascaperang.

4.2.3.2 Kepentingan Israel

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Israel adalah sekutu terdekat AS di wilayah Timur Tengah. Negara yang menjadi sumber permasalahan terbesar di wilayah ini adalah negara yang memiliki koneksi yang sangat kuat dengan pemerintahan AS. Berdirinya Israel sebagai negara Yahudi di Palestina sejak tahun 1948 masih menjadi awal rentetan konflik di wilayah ini. Jika dikaitkan dengan skenario AS untuk menyerang Irak, Israel memiliki kepentingan yang sangat besar.

Saddam Hussein, yang merupakan tipikal pemimpin diktator, sangat pintar dalam memainkan isu luar negeri demi diplomasi internasionalnya. Sekalipun Saddam adalah seorang pemimpin yang banyak menuai kontroversi di negaranya, dia selalu membela perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan mengusir Israel dari wilayah mereka.

¹¹⁰ Hal ini terdapat pada dokumen yang dikeluarkan oleh gedung putih pada tanggal 30 September 2002. Dokumen setebal 30 halaman itu berjudul *The National Security Strategy of The United States*. Inti dari dokumen tersebut adalah merumuskan strategi kebijakan AS yang merefleksikan kesatuan antara nilai-nilai dan kepentingan nasional mereka. Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-Negara Muslim*, Jakarta: Mizan, 2007, hlm. 55 – 56

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 57

Saddam tidak segan-segan mengirimkan bantuan dan persenjataan bagi faksi-faksi yang berjuang di Palestina, termasuk Hamas. Dukungan Saddam yang begitu kuat ini memperkuat posisi tawarnya di antara negara Islam dan negara Arab. Isu Palestina adalah isu yang paling mendapatkan perhatian di dunia Islam. Namun, di sisi lain, tidak ada ketegasan dan keberanian dari tiap negara di dunia Islam untuk membela Palestina. Paling jauh, dukungan itu diberikan lewat bantuan kemanusiaan dan seminar-seminar yang damai.

Dalam situasi seperti itulah, Saddam Hussein tampil di tengah-tengah dunia Islam sebagai seorang mujahid yang akan membebaskan Palestina. Bahkan, di dalam negeri, Saddam sering mengidentikkan dirinya dengan Solahudin al-Ayubi yang pernah membebaskan Jerussalem dari kekuasaan Romawi pada perang salib dulu. Konsistensi Saddam Hussein dalam mendukung kemerdekaan Palestina memiliki makna yang sangat strategis bagi politik luar negerinya sendiri. Sosok Saddam adalah sosok yang dimusuhi di dunia Arab karena berambisi untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Di liga Arab, Saddam Hussein dianggap sebagai bahaya laten yang dapat sewaktu-waktu bertindak nekat menguasai negara-negara tetangganya. Hal itu dibuktikan dengan aneksasi Irak atas Kuwait yang dimulai dengan klaim sepihak atas sebuah wilayah sengketa.

Saddam jelas memusuhi Israel yang dianggapnya sebagai pengacau di Timur Tengah. Walaupun Irak di bawah Saddam tidak pernah sekalipun melakukan perang terbuka dengan Israel, tetap saja sikap Saddam menjadi ancaman bagi Israel. Israel menggunakan Amerika sebagai *proxy* kepentingannya di Timur Tengah. Kemudian, Amerika-lah yang melaksanakan perang dengan Irak sampai tuntas.

Israel sadar benar, bahwa negara mereka adalah negara yang tidak direstui berada di tengah-tengah masyarakat Arab. Usaha Israel untuk berdiri tegak dan membentuk negara Israel raya adalah sebuah ide yang

dianggap gila. Di antara negara Arab, yang paling memusuhi Israel adalah Irak, Syiria, dan Iran. Ketiga negara tersebut telah menjadi inti perlawanan yang paling dominan bagi politik Israel di Timur Tengah.

Kepentingan Israel terhadap penguasaan wilayah Timur Tengah sangat beralasan, sesuai dengan cita-cita nasional mereka. Bahkan, hal itu dapat dilihat dari filosofi desain bendera mereka. Apabila kita memperhatikan bendera Israel, kita akan menjumpai dua buah garis biru yang menjepit bintang david di bagian atas dan di bawah. Yang dimaksud dengan kedua garis tersebut adalah cita-cita batas negara Israel raya yang membentang antara Sungai Eufrat (Irak) hingga sungai Nil (Mesir). Itulah cita-cita negara Israel raya yang bahkan ditampilkan dalam bendera negara mereka.



Menurut James Petras, seorang profesor Emeritus Binghamton University, ada beberapa hal yang menjadi penghalang utama manuver politik Israel di Timur Tengah. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.¹¹²

1. Semakin bertambahnya populasi warga Palestina yang menolak diusir dari tanah kelahiran mereka. Hal ini dianggap sebagai penghambat untuk menciptakan sebuah negara Yahudi yang eksklusif. (Israel mengumpulkan etnis Yahudi di seluruh dunia dengan iming-iming sebuah wilayah yang diatur dengan dogma dan hukum Yahudi)

¹¹² James Petras, *The Power of Israel in USA: Zionis Mencengkeram Amerika dan Dunia*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2008.

2. Hizbullah, yaitu sebuah organisasi yang didirikan dengan alasan dan demi tujuan mengusir Israel dari wilayah Lebanon, sekaligus membalas serbuan Israel ke Lebanon. Pada 2006 lalu, organisasi ini bahkan berhasil mengalahkan Israel secara teknis dan politis. Sejak awal, organisasi ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Israel kaena gaya perjuangannya yang serupa dengan Hamas di Palestina.
3. Irak, Iran, dan Syria, yaitu tiga serangkai yang paling memberikan dampak bagi Israel. Sebelumnya, Mesir juga menjadi negara yang memerangi Israel, tetapi setelah era Anwar Sadat yang melakukan perjanjian damai dengan Israel, sikap Mesir jauh melunak. Dalam konteks minyak dunia, ketiga serangkai itu telah mengembangkan jaringan perdagangan minyaknya ke seluruh dunia. Ketiga negara itu membuat kontrak kerja dengan negara-negara seperti Jepang, Cina serta Eropa Barat. Kondisi seperti itu membuat ambisi Israel dan Amerika untuk mendominasi perdagangan minyak menjadi tidak jelas.
4. Rezim Irak yang secara perlahan, tetapi pasti mulai pulih pasca-embargo. Dengan berakhirnya embargo, Irak kemudian mengalihkan investasi ladang minyaknya ke negara-negara "selain" AS. Kecenderungan Irak untuk melakukan kerja sama eksplorasi minyak dengan negara lain bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan mereka terhadap AS. Hal itu benar-benar disadari oleh para pemimpin AS dan koneksi Yahudi mereka di Israel.
5. Krisis internal yang semakin menggerogoti Israel di dalam negeri. Isu keamanan menjadi hal yang paling sentral bagi masyarakat Israel. Kebijakan-kebijakan pemerintah Israel yang memperluas wilayah pemukiman Yahudi mendapatkan perlawanan keras dari pejuang-pejuang Palestina. Para pejuang Hamas ataupun Hizbullah, bahkan sudah menganggap warga sipil Israel sebagai bagian dari musuh yang harus mereka tumpas. Roket-roket dan bom bunuh diri pun semakin gencar

dilakukan di daerah pemukiman Yahudi. Akibat dari fenomena ini, arus migrasi ke luar Israel justru lebih banyak dibanding arus yang masuk. Rencana untuk mendemokratisasi Timur Tengah yang diusulkan oleh para Yahudi AS dalam pemerintahan sebenarnya bertujuan untuk menggabungkan kendali Timur Tengah melalui serangkaian perang.¹¹³

Lalu, bagaimana Israel mampu memengaruhi negara sekelas Amerika Serikat untuk melancarkan serangkaian perang demi kepentingan Israel? Jawaban yang paling tepat adalah menentukan posisi dalam pemerintahan Amerika. Memainkan peran-peran para pejabat yang pro-zionis dengan maksimal di setiap kebijakan yang paling penting. Para pejabat AS tersebut memiliki sejarah yang panjang dalam ikatan ideologi dan politik dengan negara Israel, termasuk kebijakan-kebijakan politik penasihat. Dalam sebagian besar kehidupan politik, mereka telah mengabdikan hidup mereka demi kepentingan Israel.

Menurut James Petras, rancangan dan kebijakan invasi atas Irak berada di tangan orang-orang militer sipil di Pentagon. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berhasil jika ada dukungan kuat yang diberikan oleh para pembantu pejabat pro-zionis dalam organisasi-organisasi Yahudi di AS. Organisasi itu seperti seperti AIPAC (American-Israel Public Affair Committee). Mereka inilah yang menjadi *think tank* (tanki pemikir) kebijakan Amerika dalam menginvasi Irak.

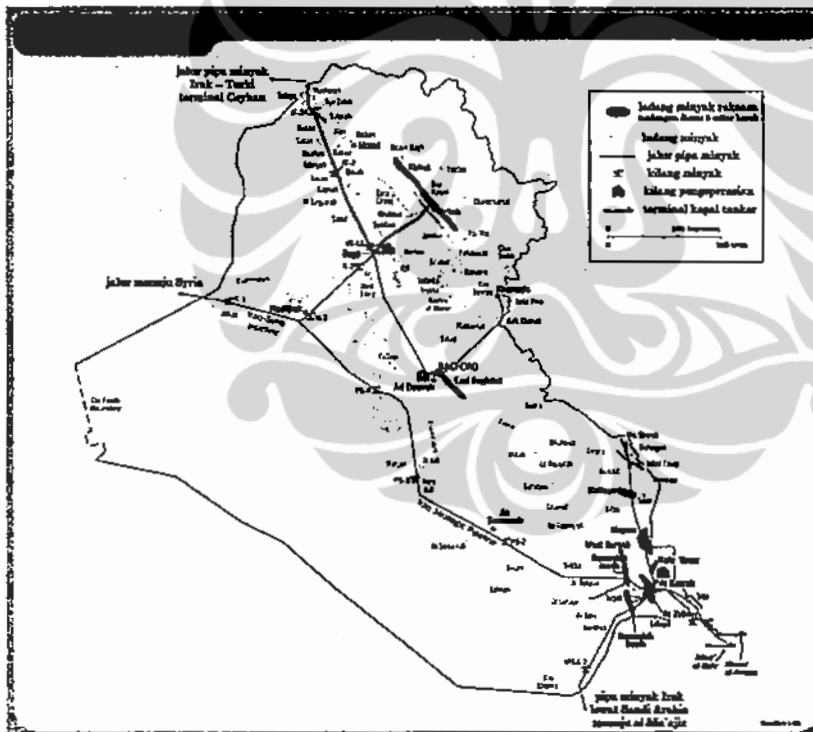
Kekalutan Israel yang utama adalah terhambatnya pasokan minyak yang mereka butuhkan untuk keperluan di dalam negeri. Sejak Irak dan negara-negara tetangganya menjauhkan diri dari AS dalam proyek minyak, Israel secara langsung dilanda kesulitan. Mengingat minyak bumi masih merupakan energi yang vital bagi negara Israel. Israel sendiri mengalami kesulitan untuk membeli minyak dari negara-negara tetangganya itu karena

¹¹³ Richard Perle, dkk "A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm", Institute of Advance Strategic and Political Studies, 1996. dalam James Petras, hlm. 47

sikap arogannya terhadap Palestina. Dengan kata lain, Israel mengalami boikot minyak yang cukup mengkhawatirkan di wilayahnya sendiri. Akibat boikot tersebut, Israel hanya bisa mengandalkan impor minyak dari Rusia yang jaraknya sangat jauh dan mahal.

Melihat kondisi ini, Amerika Serikat sebagai sekutu yang paling menyayangi Israel membuat sebuah memorandum kesepakatan dengan Israel. Isi memorandum itu adalah jaminan bagi Israel untuk mendapatkan akses minyak dari wilayah Irak. Invasi terhadap Irak adalah salah satu wujud implementasi dari kesepakatan tersebut. Israel, menginginkan adanya jalur pipa minyak yang menghubungkan kilang minyak-minyak di daerah Kirkuk (Irak) ke kota Haifa (Israel).

Gambar Jalur Pipa Minyak di Irak



Menurut John Paritzky, Menteri Infrastruktur Nasional Israel, jalur pipa minyak yang akan dibangun antara Irak dengan Israel akan memotong anggaran energi Israel secara drastis. Menurutnya, pembangunan jalur tersebut akan memotong anggaran hingga 25 persen. Pembangunan pipa minyak tersebut, akan melepaskan ketergantungan Israel pada impor minyak dari Rusia yang memang sangat mahal.¹¹⁴



4.3 Proyek Tentara Bayaran AS di Irak

4.3.1 Proyek Rekonstruksi Irak

Perang Irak yang telah dilaksanakan tanpa memedulikan kecaman dan kutukan masyarakat internasional memberikan keuntungan besar bagi rezim korporasi di AS. Perang itu memang mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Hampir sekitar dua miliar dolar dikeluarkan pemerintah AS selama melaksanakan invasi. Jumlah dana sebesar itu ternyata sebuah investasi bisnis jangka panjang bagi kepentingan ekonomi AS di dunia. Pemerintah AS menganggap anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat segera dikembalikan pascaperang secara bertahap. Salah satu usaha pengembalian modal itu adalah proyek rekonstruksi pascaperang. Uang yang dihasilkan dari bisnis rekonstruksi Irak ini akan disalurkan juga ke

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 48

kas Negara AS sebagai bentuk kompensasi dan relasi yang kuat antara pihak korporasi dengan pemerintah.

Sekali lagi, ini semua dapat dengan mudah dimengerti oleh kita yang awam terhadap sebuah kebijakan ekonomi. Semua ini hanya bentuk transaksi ekonomi yang klasik, saat kedua belah pihak (pemerintah dan korporasi) memberikan peran yang mereka miliki kepada masing-masing pihak. Dimulai dari dukungan sejak kampanye, pihak korporasi kemudian menempatkan tokoh-tokohnya duduk dalam kabinet. Hal itu adalah kompensasi pertama yang didapatkan pihak korporasi dari pemerintahan Partai Republik. Kemudian, setelah rezim Bush melahirkan sebuah kebijakan perang yang memiliki berbagai irisan motif antara pemerintah dan korporasi, keduanya melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam proyek rekonstruksi Irak.

Irak yang hancur-lebur setelah invasi AS membutuhkan sebuah program pembangunan kembali yang cepat di segala bidang. Beberapa bidang infrastruktur merupakan aset ekonomi yang sangat berharga bagi AS. Aset ekonomi seperti kilang minyak dan jalur pipanya adalah yang menjadi motif dominan serangan AS atas Irak.

Tabel berikut ini adalah daftar korporasi-korporasi asal AS yang mendapatkan proyek rekonstruksi di Irak pascainvasi. Semua korporasi yang ada dalam daftar ini juga merupakan korporasi yang memberi dukungan finansial kepada Partai Republik sejak masa kampanye Bush.¹¹⁵

¹¹⁵ Center for Public Integrity, "Campaign Contributions of Post-War Contractors", diakses dari website www.publicintegrity.org/wow/resource.aspx?act=contrib

Kontraktor
General Electric Company
Vinnell Corporation (Northrop Grumman)
Bearing Point
Science Applications International Corp.
Fluor Corp.
Bechtel Group Inc.
Kellog, Brown & Root (Halliburton)
American President Lines Ltd.
Dell Marketing
Parsons Corp.
DynCorp.
TECO Ocean Shipping Co.
Washington Group International
United Defense Industries, L.P.
Unisys Corporation
Readiness Management Support LC
Tetra Tech Inc.
Louis Berger Group
Liberty Shipping Group Ltd.
Perini Corporation
Ocean Bulkships Inc.
Kroll Inc.
Raytheon Aerospace LLC
MZM Inc.
Sealift Inc.

Sodexo Inc.
Chemonics International Inc.
Landstar Express America Inc.
Stevedoring Serviss of America
Abt Associates Inc.
Anteon International Coporation
Creative Associates International Inc.
Camp Dresser & Mc Kee Inc.
Mediterranean Shipping Company
EGL Eagle Global Logistics
World Fuel Serviss Corp.
DHS Logistics Company
Developtment Alternatifs Inc.

Sumber: Federal Electoral Commision 1990-mid year 2003

Khusus mengenai Halliburton, perusahaan ini adalah yang mendapatkan keuntungan paling besar dari proyek rekonstruksi di Irak. Halliburton juga sebuah perusahaan yang memiliki divisi khusus jasa pengamanan, yang dalam buku ini disebut sebagai tentara bayaran. Oleh karena divisi khusus itulah, Halliburton dikategorikan sebagai Perusahaan Penyedia Tentara Bayaran atau *Private Military Company* (PMC). Total anggaran yang diperoleh Halliburton dalam proyek rekonstruksi Irak mencapai 8 miliar US\$. Anggaran itu adalah yang paling besar jika dibandingkan dengan PMC-PMC lain yang ikut beroperasi di Irak.

Di bawah kontrak yang bernama *Logistic Civil Augmentation Program* (LOGCAP) dan disetujui pada Desember 2001, Halliburton menjadi satu-satunya korporasi yang mendominasi proyek rekonstruksi Irak. Halliburton menggunakan anak perusahaannya, yaitu Kellog Brown

& Root untuk melaksanakan kontrak tersebut. Jumlah total pekerja KBR di Irak adalah sekitar 24.000 personel, atau 3/4 dari total pekerja asing yang dipekerjakan di sana. Pekerja Halliburton melakukan berbagai macam pekerjaan mulai dari menggali jamban, mengantarkan logistik, mencukur rambut, menyiapkan makanan, hingga melayani jasa pengiriman surat untuk tentara AS.

Pada akhir tahun 2003, kongres AS telah mengalokasikan dana untuk Irak sebesar 18 miliar US\$. Dana tersebut digunakan untuk proyek "*Iraq Relief and Reconstruction Fund*" dan dibagi ke dalam sebelas kontrak yang melingkupi transportasi, komunikasi, distribusi air, dan suplai listrik. Halliburton mendapatkan salah satu kontrak tersebut, yakni dengan total 1,2 miliar US\$ untuk memperbaiki jasa minyak (*restore oil servis*) di kawasan Irak selatan.¹¹⁶

Lalu, pada 2005 dan 2006, Halliburton berturut-turut mendapatkan pembayaran dari pemerintah AS sebesar 7 miliar dan 4 miliar US\$. Istilah pembayaran merujuk kepada sistem kontrak yang dijalankan oleh Halliburton dan pemerintah AS, yaitu sistem "*cost plus*". Sistem ini menyerupai sistem *reimburse* saat salah satu pihak menggunakan uangnya terlebih dahulu, kemudian mendapatkan ganti sesuai dengan jumlah pemakaian. Halliburton menggunakan sistem "*cost plus*" ini untuk menggelembungkan uang tagihan kepada pemerintah. Sebagai contoh, KBR menagih pembayaran lebih dari 1.500 peti minuman ringan per bulan kepada pemerintah AS dengan harga US\$ 45 tiap satu peti.

Tanggal	Peristiwa
11 November 2002	Pemerintahan Bush meminta Halliburton (saat itu beroperasi

¹¹⁶ Griff Witte, "Iraq: Army to End Expansive, Exclusive Halliburton Deal", dalam *Washington Post*, 12 Juli 2006 diakses dari www.warprofiteers.com

	berdasarkan kontrak logistik angkatan Darat) untuk mengembangkan rencana cadangan bagi infrastruktur minyak Irak.
8 Maret 2003	Kontrak rahasia infrastruktur minyak diberikan kepada anak perusahaan Halliburton, KBR tanpa melalui tender.
24 Maret 2003	Kontrak pemadaman kebakaran sumur minyak dan penaksiran kerusakan fasilitas minyak diumumkan secara terbuka.
8 April 2003	Pemerintahan Bush mengatakan kontrak Halliburton bernilai US\$ 7 miliar, tetapi setumpuk sub-kontrak akan dibuka melalui tender dengan segera.
14 April 2003	Korps Teknik Angkatan Darat menyatakan nilai kontrak tidak akan sampai US\$ 650 juta. Mereka memperkirakan pengadaan tender baru pada akhir April, dan penyerahan kontrak baru akan terjadi pada Juni.
2 Mei 2003	Angkatan Darat mengumumkan kontrak juga mencakup operasi fasilitas minyak. Penyerahan kontrak baru ditunda hingga Agustus.
11 Juni 2003	Angkatan Darat menunda penyerahan kontrak hingga Oktober.
29 Oktober 2003	Angkatan Darat menunda penyerahan kontrak sampai Desember.
1 Desember 2003	Angkatan Darat menunda penyerahan kontrak sampai Januari 2004.
31 Desember 2003	Pentagon memutuskan kontrak Halliburton berkaitan dengan munculnya dugaan <i>mark-up</i> harga dua kali lebih tinggi dari yang seharusnya dalam impor bensin dari Kuwait untuk memenuhi kebutuhan di Irak.

Sumber; "Investigasi Kiminal Halliburton", *Koran Tempo*, edisi Rabu 25 Februari 2004

Kontrak Halliburton (KBR) dalam program rekonstruksi infrastruktur minyak Irak secara kumulatif

Tanggal	Nilai Kontrak*
6 Mei 2003	US\$ 77
17 Juli 2003	US\$ 461
21 Agustus 2003	US\$ 704
17 Oktober 2003	US\$ 1.590
18 November 2003	US\$ 1.715
11 Desember 2003	US\$ 2.261

* dalam juta dolar

Balada para pengusaha memperebutkan kontrak di Irak sudah dimulai sejak perang masih direncanakan. Haliburton sendiri memang mengincar kontrak-kontrak pada proyek rekonstruksi. Sementara itu, perusahaan lainnya ada yang sudah mendapatkan kontrak ketika perang masih berlangsung.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, koneksi yang kuat antara pihak korporasi dengan pemerintah melahirkan sebuah aktivitas bisnis yang besar. Dalam kasus Halliburton, ujung tombak koneksi itu adalah sosok Dick Cheney. Keterlibatan Dick Cheney secara langsung dalam pembagian tender rekonstruksi tersebut diakui oleh wakil presiden direktur Halliburton, Bob Peebler. Menurut Bob dalam *The Chicago Tribune* tahun 2000; "*Clearly Dick gave Halliburton some advantages. Doors would open.*"

Di dalam kesempatan lainnya, Dick Cheney justru menyangkal keterlibatan dirinya dengan kontrak rekonstruksi di Irak. Seperti pernyataan Dick dalam sebuah acara televisi yang disiarkan oleh NBC

pada September tahun 2003. Dalam acara itu, sang pembawa acara menanyakan apakah Dick terlibat dalam penentuan kontrak rekonstruksi Irak yang diberikan pemerintah. Menjawab pertanyaan tersebut, Dick mengatakan;

*"Of course not, as a vice president, I have absolutely no influence of, involvement of, knowledge of in anyway, shape of form contracts led by the Corps of Engineers or anybody else in the federal government."*¹¹⁷

4.3.2 Perusahaan Penyedia Tentara Bayaran

Satu dari lima tentara AS di Irak adalah tentara bayaran. Kalimat ini bukanlah sebuah omong kosong jika kita mengacu pada berbagai laporan dan sumber yang dapat dipercaya mengenai perang di Irak. Kebanyakan para tentara bayaran itu berasal dari PMC-PMC asal Amerika Serikat. Artinya, tidak semua tentara bayaran berasal dari PMC asal AS. Karena penelitian ini membicarakan tentara bayaran Amerika Serikat, maka kita akan membahas beberapa PMC yang menjadi ujung tombak AS menegakkan hegemoni ekonominya di Irak.

PMC-PMC ini datang ke Irak dengan bekal surat kontrak antara mereka dengan pihak pemerintah AS, khususnya Departemen Pertahanan. Koneksi yang sudah terbangun dan terjalin antara para pengusaha dengan politisi yang duduk dalam pemerintahan membuat keberadaan mereka semakin aman. Ada hubungan timbal balik yang jelas antara pemerintah AS dengan para PMC ini di Irak. Di satu sisi, AS menginginkan kondisi yang stabil dalam mengeksplorasi kekayaan minyak Irak. Sementara itu, di sisi lain, PMC-PMC ini juga membutuhkan proyek demi kelangsungan bisnis mereka. Sinergi dari dua kepentingan ini terwujudkan dalam praktik bisnis tentara bayaran.

¹¹⁷ Program televisi itu berjudul "Meet the Press" dengan pembawa acara Tim Russert. Program itu disiarkan oleh stasiun NBC.

Ide awal penggunaan tenaga militer swasta di lingkungan pemerintah AS berasal dari Donald Rumsfeld ketika dia menjabat sebagai sekretaris pertahanan di bawah Pemerintahan George W. Bush tahun 2001. Pada 10 September 2001, tepat sehari sebelum peristiwa pengeboman WTC, Rumsfeld berpidato di gedung Pentagon mengenai perlunya menggunakan jasa keamanan swasta. Saat itu, dia menyebutkan beberapa perusahaan yang dilirik oleh pemerintah seperti Halliburton, DynCorp dan Betchels.

Pada 2002, Donald Rumsfeld menerbitkan artikel yang membahas kembali pentingnya penggunaan jasa kontraktor militer swasta dalam konteks transformasi militer. Artikel tersebut kemudian dikenal sebagai "Rumsfeld Doctrine". Dalam doktrin tersebut, Rumsfeld mendukung kebijakan baru Pentagon untuk memperkuat militer dengan cara penggunaan teknologi canggih serta kontraktor swasta.

Yang dimaksud dengan kontraktor swasta dalam konteks doktrin Rumsfeld memang ditekankan kepada perusahaan-perusahaan yang dapat dijadikan rekanan pihak militer untuk mengembangkan teknologi persenjataan. Hal tersebut juga bukan sesuatu yang baru dalam hubungan militer-sipil di Amerika Serikat. Sudah sejak lama perusahaan seperti Boeing, Northrop Grumman menjadi rekanan militer dalam mengembangkan teknologi persenjataan. Yang menjadi ciri khususnya adalah, Rumsfeld memulai sebuah peluang kerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa keamanan. Perusahaan-perusahaan ini di kemudian hari disebut dengan Private Military Company/Contractor (PMC).

Survei tahun 2006 yang dilakukan oleh Pusat Komando Departemen Pertahanan AS menunjukkan bahwa Amerika Serikat memperkerjakan lebih dari 100.000 tenaga kontrak swasta di Irak. Jumlah ini meningkat sebesar 10 kali lipat jika dibandingkan dengan Perang Teluk

1991. Invasi ke Irak membuka peluang baru bagi perusahaan-perusahaan jasa keamanan militer. Departemen Luar Negeri saja telah menghabiskan lebih dari 4 miliar dolar untuk para tentara bayaran ini pada 2007. Blackwater mendapat kontrak awal pada 2003 tanpa tawar-menawar sebesar 27 juta dolar. Biaya tersebut digunakan untuk menjaga Paul Bremer yang menjadi penanggung jawab sementara pihak koalisi di Irak. (Administrator Coalition Provisional Authority).¹¹⁸

Pada 2007, para tentara yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan seperti Black Water dan DynCorp memperoleh penghasilan mencapai 1200 Dolar per hari. Di sisi lain, seorang sersan militer angkatan darat hanya berpenghasilan 140—190 dolar per hari, itu semua mencakup gaji dan tunjangan. Perbedaan perbandingan penghasilan yang mencolok tersebut melahirkan fenomena kecemburuan di kalangan tentara pada dalam institusi militer. Banyak dari para tentara tersebut yang bergabung ke dalam perusahaan penyewa jasa keamanan swasta setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka di militer. Tawaran gaji dan tunjangan gaji yang sangat besar menjadi alasan utama mereka untuk bergabung ke dalam perusahaan keamanan swasta tersebut.¹¹⁹

Akhirnya, pihak militer menaikkan tunjangan dan gaji yang lebih tinggi bagi para tentara yang bersedia ditugaskan kembali. Hal itu untuk mengantisipasi fenomena kecemburuan sosial yang ada di kalangan militer terhadap para tentara bayaran di perusahaan swasta. Meskipun langkah ini sudah dijalankan oleh pihak militer, mereka tetap kehilangan sebagian personel tentara yang sangat berpengalaman yang lebih memilih perusahaan swasta yang mau menggaji mereka jauh lebih besar.¹²⁰

¹¹⁸ Joseph Stiglitz, *Perang Tiga Triliun Dolar: Bencana Ekonomi di Balik Invasi Amerika ke Irak* (terj: M.Rudi Atmoko), Bandung: Mizan, 2009, hlm. 41

¹¹⁹ *Ibid*, hlm.41

¹²⁰ *Ibid*, hlm.41

Menurut Joseph Stiglitz, pemanfaatan para tenaga kontrak tersebut merupakan privatisasi parsial angkatan bersenjata. Stiglitz berpendapat bahwa privatisasi di sektor nonmiliter seperti pabrik baja, listrik, dan gas merupakan suatu hal yang masuk akal selama negara sanggup menjamin bahwa tidak ada monopoli yang merugikan masyarakat. Privatisasi di sektor sumber daya alam akan melahirkan kompetisi pasar yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi para konsumen karena dapat memilih produk yang lebih berkualitas.¹²¹ Sekali lagi, penekanannya ada pada kontrol pemerintah untuk menjamin tidak adanya praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Hal ini berbeda jauh dengan privatisasi sektor militer, yang tidak memiliki basis pasar terbuka. Militer adalah alat negara yang sangat vital untuk menjaga stabilitas nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang berperan sebagai konsumen adalah pemerintah yang sekaligus menjadi pasar tunggal bagi perusahaan-perusahaan swasta tersebut.

4.3.2.1 Halliburton

Nama Halliburton berasal seorang pengusaha asal Oklahoma yang bernama Erle P. Halliburton. Pria ini mendirikan perusahaan pertamanya yang bernama New Method Oil Well Cementing Company tahun 1919 di Oklahoma. Setelah satu tahun, perusahaan nama perusahaan ini diganti menjadi Halliburton Oil Well Cementing Company. Halliburton adalah nama sebuah perusahaan besar yang berbasis keluarga di AS. Saat Erle P. Halliburton wafat pada tahun 1957, dia meninggalkan 201 kantor perwakilan di 22 negara bagian AS dan 20 negara asing.

Pada 1962, Halliburton menggabungkan diri dengan Brown & Root, sebuah perusahaan kontraktor umum yang didirikan oleh Herman

¹²¹ *Ibid*, hlm.42

Brown, George Brown serta Dan Root. Pada 1998, Halliburton melakukan merger atau penggabungan dengan Dresser Industries, sebuah perusahaan jasa pelayanan energi yang didirikan oleh Solomon R. Dresser. Dari hasil penggabungan itulah, Halliburton mendapatkan perusahaan M.W. Kellogg yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak dan pembuatan pipa minyak. Perusahaan M.W. Kellogg didirikan oleh Morris W. Kellogg pada 1900. Perkembangan terakhir dari perusahaan ini terjadi pada 2002 saat secara resmi Halliburton mengumumkan diversifikasi usaha mereka ke dalam dua sektor bisnis, yaitu Halliburton Energy Service Group dan Kellogg Brown & Root (KBR).

Perusahaan ini lebih dikenal dengan aktivitasnya dalam bidang energi dan konstruksi. Dalam *website* resminya, disebutkan jumlah karyawan perusahaan ini mencapai lebih dari 100.000 orang yang bekerja di lebih dari 120 negara. Disebutkan pula bahwa mereka memiliki empat kelompok usaha yang super maju yaitu; *drilling and formation evaluation, fluid sistem, production optimization, serta digital and consulting solutions*.¹²² Dari informasi yang terdapat dalam *website* resminya, tidak tampak aktivitas bisnis penyewaan tentara bayaran yang mereka lakukan. Padahal, Halliburton adalah perusahaan yang mendapatkan kontrak rekonstruksi Irak dengan anggaran paling besar. Jumlah anggaran yang mereka dapatkan sekitar US\$ 8 miliar. Sebagai gambaran umum, nilai kontrak yang diberikan pada PMC biasanya hanya berkisar puluhan juta dolar.

Halliburton memiliki kedekatan hubungan dengan pemerintahan George W. Bush saat ini. Wakil Presiden Dick Cheney adalah mantan CEO perusahaan ini. Dick Cheney menjabat sebagai CEO sejak 1995 sampai tahun 2000. Di bawah kepemimpinannya, Halliburton menjadi perusahaan

¹²² www.halliburton.com, diakses pada tanggal 10 Desember 2007

yang maju. Keberhasilan Dick Cheney di Halliburton dianggap sebagai salah satu faktor yang mengantarnya menjadi wakil presiden AS.¹²³ Jadi, tidaklah mengherankan apabila perusahaan ini mudah mendapatkan kontrak dalam bisnis-bisnis miter pascaperang yang diberikan pemerintah AS.

Berbicara mengenai sepak terjang Halliburton pada masa Bush sama sekali tidak bisa dilepaskan dari peran besar seorang Dick Cheney. Keduanya (Dick Cheney dan Halliburton) seperti sudah melekat satu sama lain, saling memengaruhi dan saling menguatkan. Dick Cheney menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dalam pemerintahan AS adalah berkat kontribusi dana Halliburton pada kampanye Partai Republik. Sebaliknya, Halliburton berhasil menjadi perusahaan yang besar adalah berkat perantara Cheney yang menghubungkan perusahaan ini dengan pemerintah.

Dick Cheney sudah menjalin kekerabatan dengan tokoh pemerintahan George W. Bush sejak lama. Sebagai contoh, Dick adalah teman lama Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dalam pemerintahan Amerika Serikat.¹²⁴ Pada saat terjadi perang Teluk tahun 1991, dia menjabat sebagai sekretaris Pertahanan Amerika Serikat sekaligus sebagai salah seorang pemimpin di perusahaan kontraktor swasta Halliburton.

Dick Cheney mulai bergabung dengan Halliburton sejak 1995. Pada masa sebelumnya, dia lebih dikenal sebagai seorang menteri pertahanan AS di zaman presiden Bush senior. Dia bergabung dengan Halliburton tepatnya pada 10 Agustus 1995 dan membawa serta temannya yang bernama Davis Gribbin. Davis Gribbin sendiri adalah mantan deputi Cheney ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS.

Sejak Bill Clinton terpilih sebagai Presiden, dia terus mengembangkan bisnis Halliburton sampai akhirnya dia berhasil menjadi

¹²³ *loc.cit*, Majalah *Angkasa*, Tentara Bayaran, hlm. 40

¹²⁴ Dan Briody, *The Halliburton Agenda: The Politics. Oil dan Money*, New Jersey: John Wiley & Sons, inc, 2004, hal. viii

CEO perusahaan tersebut pada 1995. Selama masa itu, dia juga menjadi salah satu *think-tank* pada American Enterprises Institute. Lembaga ini memfokuskan diri pada percepatan privatisasi militer dan pemerintah. Dick Cheney dan Donald Rumsfeld adalah tokoh kunci pada organisasi PNAC. Organisasi ini didirikan oleh seorang neokonservatif yang bernama William Kristol.

Pada masa pemerintahan Bill Clinton, Halliburton mendapatkan kontrak kerja di bidang militer pada konflik Balkan tahun 1990 serta perang Kosovo pada tahun 1999. Pemerintahan Bill Clinton menyetujui penggunaan jasa tentara bayaran untuk melatih tentara Kroasia dalam menghadapi tentara Serbia yang didukung Yugoslavia. Sejak saat itulah, Halliburton mengembangkan sektor bisnis mereka yang baru, yaitu tentara bayaran. Dengan sektor bisnis mereka tersebut, Halliburton resmi menjadi salah satu perusahaan penyedia tentara bayaran (Private Military Company).¹²⁵

Setelah Cheney bergabung dengan Halliburton, kontrak bisnis perusahaan ini mengalami peningkatan dari 1.2 miliar US\$ menjadi 2,3 miliar US\$. Kebanyakan kontrak bisnis ini didapatkan dari Departemen Pertahanan AS, tempat Cheney sebelumnya berkarier. Kemudian, pendapatan Halliburton dari kontrak operasi luar negeri pun bertambah menjadi 68% dari sebelumnya yang hanya 51%. Kontrak-kontrak tersebut kebanyakan berasal dari US Army Corps of Engineers. Berdasarkan laporan The Center for Public Integrity, Halliburton juga mendapatkan kemudahan pinjaman dana dari Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dan US Export Import Bank (ExIm) sebesar 1,5 miliar US\$. Jadi, jelaslah sudah bahwa bergabungnya Dick Cheney dengan Halliburton adalah suatu hal yang menguntungkan bagi keduanya.

¹²⁵ Jeremy Scahill, *Blackwater: The Rise of The World's Most Powerful Mercenary Army*, New York: Nations Book, 2007, hlm.

Setelah cukup memberikan keuntungan pada Halliburton dari dalam, Dick Cheney melirik sebuah posisi yang amat strategis untuk terus meraup keuntungan bagi perusahaan ini. Posisi itu adalah wakil presiden AS. Hal ini tampak sudah direncanakan sejak masa kampanye Presiden Bush bersama Partai Republik. Cheney sendiri adalah mantan orang kepercayaan Presiden Bush Senior, ayah George W. Bush. Selama 10 tahun sebelumnya, Cheney adalah seorang anggota Partai Republik untuk wilayah Wyoming. Jabatan wakil presiden, akan membuat dirinya lebih mudah mendapatkan kontrak kerja untuk Halliburton ketimbang posisinya sebelumnya yang hanya mengandalkan koneksi dan kedekatan hubungannya dengan beberapa pejabat pemerintah. Rencana besar Cheney ini dimudahkan dengan skenario perang Irak yang ada dalam agenda pemerintahan Bush.

Akhirnya, tahun 2000, Halliburton ditinggalkan oleh Dick Cheney yang berhasil menemani George W. Bush menjadi wakil presiden AS. Setelah itu, hubungan Halliburton dan pemerintah tidak serta merta jadi putus. Seperti rencana sebelumnya, Cheney menjadi ujung tombak Halliburton untuk mendapatkan kontrak kerja yang besar dari pemerintah AS. Sebagai kompensasinya, Halliburton tetap memberikan sejumlah uang kepada Dick Cheney dan sebaliknya, Dick Cheney terus berperan dalam perolehan kontrak bisnis Halliburton. Di antara keduanya terjalin hubungan simbiosis mutualisme.

Pada 2005, majalah *Fortune* mengeluarkan laporan bahwa Halliburton berada pada peringkat 103 dari 500 korporasi terbesar di AS versi majalah tersebut. Pencapaian Halliburton pada 2005 itu dapat dikatakan menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 101. Selama tahun 2005, Halliburton berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 20,994 juta US\$ atau meningkat 2,6%

dari tahun sebelumnya dan profit yang berhasil didapatkan adalah 2,358 juta US\$.¹²⁶

Halliburton sudah berdiri sejak 1919, tetapi hanya bergerak di bidang energi dan konstruksi. Keberadaan Halliburton sebagai perusahaan penyedia tentara bayaran mulai terlihat pascainvasi pertama AS ke Irak tahun 1992.¹²⁷ Halliburton juga menjadi prioritas pertama pemerintah AS ketika memangkas setengah dari jumlah tentaranya pascaperang dingin. Perusahaan ini menjadi semacam wadah bagi para tentara yang diberhentikan dari dinas resminya. Masalah ini dianggap penting bagi pemerintah AS karena membiarkan mantan tentara yang menyenangi perang sama saja dengan bencana.¹²⁸

Membicarakan adanya sebuah intervensi politik dalam penetapan kontrak rekonstruksi Irak kepada Halliburton adalah suatu hal yang sangat sulit. Dan, Briody bahkan mengatakan usaha untuk mengetahui lobi politik dalam kontak kerja Halliburton di Irak sama halnya dengan membongkar sebuah kasus pembunuhan tanpa menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh. Hal yang sudah tentu lebih sulit lagi adalah membongkar aktivitas bisnis tentara bayaran mereka di Irak dalam proyek rekonstruksi.¹²⁹

Dalam artikel yang ditulis oleh Lenora Forstel, Halliburton menghabiskan dana sebesar 1,6 miliar dolar untuk membiayai para tentara bayaran mereka.¹³⁰ jumlah ini termasuk sangat besar jika dibandingkan dengan nilai kontrak mereka di awal proyek rekonstruksi yang sebesar 8 miliar dolar. Sebagai catatan, dana sebanyak 1,6 miliar dolar tadi hanya

¹²⁶ "Fortune 500 Largest U.S Corporations," *Fortune* No.7 (8 Mei 2006), hlm. F-5.

¹²⁷ Sekitar tahun 1992, pemerintah AS mengontrak perusahaan ini untuk menyiapkan program dukungan bagi militer AS di luar negeri. Meski hanya dalam bentuk studi, mereka sudah diberi dana sebesar 9 juta dollar AS. *Ibid*, hlm. 60

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 60

¹²⁹ Dan Briody, *Op.Cit*, hlm. 224

¹³⁰ Lenora Forstel, "The Cost of The United States Colonial War Against Iraq", www.globalresearch.ca, 28 Agustus 2004

untuk operasional divisi jasa kemanan mereka (tentara bayaran), sedangkan nilai kontrak keseluruhan ditujukan untuk proyek rekonstruksi infrastruktur minyak.

Halliburton memakai anak perusahaannya, yaitu Kellogg Brown & Root, untuk menjalankan bisnis tentara bayaran di Irak. Jadi, jika kita membicarakan PMC asal AS di Irak, kita tidak akan menemukan Halliburton sebagai salah satu PMC tersebut. Kontrak di bidang tentara bayaran atau dalam istilah lain disebut pengamanan dijalankan oleh KBR sebagai anak perusahaan Halliburton. Sementara itu, Halliburton sendiri tampil sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi, terutama minyak bumi.

Tentara Bayaran Halliburton berada dalam perusahaan Kellogg Brown & Root (KBR) yang merupakan anak perusahaan Halliburton. KBR adalah pelaksana kontrak kerja yang didapatkan oleh Halliburton dalam rekonstruksi Irak pasca-perang. Kontrak kerja itu berada di dalam program LOGCAP (*Logistic Civilian Augmentation Program*) yang diberikan oleh pemerintah AS. Nilai kontrak awal yang diterima oleh KBR dalam program ini sebesar 8 miliar dolar. Berdasarkan kontrak tersebut, KBR (Halliburton) bertanggung jawab terhadap pengiriman segala macam kebutuhan logistik tentara AS di Irak selain senjata. KBR membangun fasilitas militer sementara serta mengurus segala macam kebutuhan tentara reguler dari memasak, mencuci hingga surat menyurat.¹³¹

Selain kontrak kerja dalam LOGCAP, KBR juga memperoleh kontrak kerja yang bernama RIO (*Restore Iraqi Oil*). Kontrak kerja ini juga diberikan oleh pemerintah AS untuk membangun kembali infrastruktur minyak Irak yang hancur atau rusak karena perang. Nilai kontrak awal yang didapatkan KBR sebesar 1,2 miliar dolar. Wilayah kerja KBR dalam

¹³¹ www.halliburtonwatch.com, diakses pada tanggal 2 Juli 2009

kontrak ini berada di daerah selatan Irak yang kaya minyak seperti kota Basrah.¹³²

Berdasarkan data di atas, salah satu aktivitas tentara bayaran KBR (Halliburton) difokuskan ke dalam misi pengamanan infrastruktur minyak Irak. Infrastruktur minyak adalah hal yang sangat penting dalam proyek pembangunan kembali Irak pascainvasi. Bahkan, minyak adalah motif utama kedatangan pasukan AS ke Irak. Sisa-sisa kelompok perlawanan Irak yang kontra terhadap kehadiran pasukan AS sering melakukan tindakan yang mengacau keamanan di setiap situs infrastruktur minyak. Pemerintah AS mengantisipasi usaha sabotase dari kelompok perlawanan ini dengan cara menyewa tentara bayaran dari perusahaan penyediannya. PMC yang ditunjuk sebagai pelaksana misi pengamanan infrastruktur minyak adalah Kellogg Brown & Root (Halliburton).¹³³

4.3.2.2 Blackwater

Nama Blackwater mungkin sempat ramai diberitakan pada 2004 lalu. Saat itu, mereka sedang menjalankan tugas pengiriman logistik melewati kota Fallujah. Tiba-tiba, konvoi pasukan mereka disergap oleh pasukan perlawanan Irak dan empat orang anggota Blackwater tewas mengenaskan. Mayat mereka digantung terbalik di atas sungai Euphrat.¹³⁴ Kejadian ini diberitakan secara luas oleh pers internasional dan sekaligus membuat nama Blackwater semakin dikenal.

Dari sekian banyak PMC yang saat ini beroperasi di seluruh dunia, Blackwater Security Consulting adalah model PMC yang paling modern. Dalam artikel Murray Horton yang berjudul "The Privatization of War" dikatakan bahwa Blackwater adalah satu-satunya PMC yang memiliki

¹³² LOGCAP Military Contract, www.halliburton.com, diakses pada tanggal 2 Juli 2009

¹³³ Dan Briody, *op.cit*, hlm.223 – 224

¹³⁴ *Harian Republika*, 32 Maret 2004

fasilitas paling luas, modern serta lengkap. Sedemikian lengkapnya, sampai-sampai militer AS sendiri kerap berlatih di fasilitas mereka.¹³⁵

Oleh karena sangat modern, Blackwater sering mendapatkan kontrak yang memiliki risiko tidak biasa. Mereka kerap diberikan misi seperti halnya militer sungguhan. Blackwater sering terlibat dalam sebuah pertempuran terbuka layaknya militer resmi. Berbeda dengan PMC yang lain, para personel Blackwater memang umumnya adalah para veteran perang dan mantan anggota pasukan khusus. Dengan latar belakang semacam itu, pantas jika mereka memiliki naluri berperang yang jauh lebih tinggi daripada personel PMC yang lain.

Jika kita mengunjungi *website* resmi Blackwater di internet, kita akan mendapatkan sebuah profil perusahaan jasa kontraktor. Profil tentang tentara bayaran tidak seketika tampak dalam tampilan *website* mereka walaupun mereka menggunakan nama Blackwater Security Consulting.

Blackwater Security Consulting merupakan cabang usaha dari Blackwater USA.¹³⁶ Secara formal, PMC ini menawarkan tiga jasa utama yaitu; analisis risiko, pengamanan bergerak, dan solusi proteksi. Ketiga jasa tersebut dipersiapkan untuk kepentingan pribadi, pemerintah maupun pihak tertentu dari dan untuk sebuah wilayah berisiko tinggi.

Blackwater dibangun oleh seorang yang bernama Erik Prince yang merupakan pendiri sekaligus pemilik perusahaan Blackwater. Dia dilahirkan di Holland, Michigan Amerika Serikat pada 6 Juni 1969. Sejak kecil dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sejahtera. Ayahnya yang bernama Edgar D. Prince adalah seorang pemilik perusahaan Prince Corporation yang bergerak di bidang penjualan suku cadang kendaraan.

¹³⁵ *loc.cit*, Majalah *Angkasa*, hlm. 26

¹³⁶ Empat cabang usaha lainnya adalah; Blackwater Training Centre, Blackwater Target System, Blackwater Canine, dan Raven Development Group. www.blackwaterusa.com/securityconsulting, diakses pada 10 Desember 2007.

Erik menempuh pendidikan menengah di Holland Christian High School, setelah itu dia melanjutkan pendidikannya di Akademi Pelayaran Amerika Serikat. Namun, kuliahnya hanya sampai semester ketiga. Setelah itu dia melanjutkan kuliahnya di Hillsdale College pada tahun 1992.¹³⁷

Setelah menamatkan pendidikannya di Hillsdale College, Erik Prince bergabung dengan Angkatan Laut dan berhasil menjadi perwira di kesatuan khusus Navy SEAL. Selama menjadi perwira di angkatan laut, Erik sempat ditugaskan ke wilayah Timur Tengah, dan Bosnia. Pada tahun 1995, Erik keluar dari Angkatan Laut setelah ayahnya wafat. Keputusan Erik ini dilandasi keinginannya untuk meneruskan bisnis keluarga yang ditinggalkan ayahnya setelah wafat.

Setelah kematian ayah Prince, ibunda Prince menjual perusahaan Prince.Corp milik mereka kepada Johnson.Inc sebesar 1,3 juta dollar. Setelah itu mereka pindah rumah ke daerah Virginia. Di daerah inilah kemudian Erik Prince mendirikan perusahaan baru yang bernama Blackwater Worldwide. Perusahaan itu didirikan dengan dana sisa pribadi milik Prince ditambah dengan sisa hasil penjualan perusahaan ayahnya. Erik kemudian membeli areal seluas 24 Km² di daerah Carolina Utara untuk membangun sebuah sekolah khusus yang diberi nama Blackwater Special Operations. Sekolah inilah cikal bakal tempat lahirnya para tentara bayaran profesional yang disewakan oleh perusahaan yang bernama Blackwater USA.¹³⁸

Sejak 1998, Erik Prince sudah menyumbangkan dana kepada Partai Republik sebesar lebih dari 200.000 US Dollar.¹³⁹ Dia menyumbangkan dana tersebut melalui yayasan Bolthouse yang memiliki ikatan keluarga

¹³⁷ "The Man Behind Blackwater: Dutiful and intense, son of a self-made billionaire, Erik Prince is an adventure-seeker and conservative true-believer". Wawancara Eksklusif Evan Thomas dan Mark Hosenball, Newsweek, Oct. 22, 2007

¹³⁸ "The Man Behind Blackwater." Newsweek, October 23, 2007, hal. 36-39

¹³⁹ Andrew Malcolm, "Grilled Blackwater chairman a major GOP donor", *The Baltimore Sun*, 4 Oktober, 2007

dengan dirinya. Yayasan Bolthouse ini merupakan organisasi Kristen yang konservatif. Dari yayasan ini, dana-dana tadi kemudian disalurkan ke Alliance Defense Fund untuk diteruskan ke Partai Republik.¹⁴⁰ Dukungan dana yang diberikan Erik Prince kepada Partai Republik membuat dirinya secara otomatis dekat dengan George W. Bush. Mantan kandidat presiden dari partai Demokrat, John Edwards pernah menyebut Erik Prince sebagai salah satu kroni terpenting George W. Bush.¹⁴¹

Para personel Blackwater adalah para mantan tentara elite yang memiliki kualifikasi tempur di atas rata-rata tentara reguler. Para mantan tentara elite ini tidak hanya direkrut dari AS saja, tetapi juga dari luar AS seperti Afrika dan Cili.¹⁴² PMC ini berbeda dengan PMC lain yang lebih banyak didominasi para profesional di bidang teknik dan logistik. Blackwater Security Consulting benar-benar dipersiapkan sebagai perusahaan jasa tentara bayaran yang siap diterjunkan dalam misi tempur seekstrem apa pun.

Hal yang menjadi keunikan Blackwater adalah tidak semua personel mereka adalah orang Amerika Serikat. Ada di antara mereka yang merupakan mantan pasukan elite Inggris seperti SAS. Bahkan, ada yang berasal dari pasukan Apartheid di Afrika Selatan. Dengan kualifikasi seperti itu, PMC ini paling pantas menyandang status tentara bayaran. Hal ini merupakan sesuatu yang berbeda dari PMC lainnya yang cenderung didominasi oleh para profesional di bidang teknik dan logistik. Para personel Blackwater adalah tentara yang betul-betul dipersenjatai secara profesional layaknya militer sungguhan.

¹⁴⁰ Sarah Posner. "The Legal Muscle Leading the Fight to End the Separation of Church and State" *Washington Spectator Online*, 1 April 2007

¹⁴¹ Philip Elliott, "Edwards: Limit Private Security Firms", *the Associated Press*, 2 Oktober 2007

¹⁴² Murray Horton, "The Privatisation of War", *Military Technology*, Juli 2004

Dalam proyek rekonstruksi Irak, Blackwater menjadi PMC yang paling dominan dalam hal pengamanan jalur dan pengiriman logistik dari dan menuju aset pemerintah AS. Berbeda dengan Halliburton, para tentara bayaran Blackwater benar-benar dipersiapkan untuk misi yang sifatnya *full-combat* (perang sungguhan). Mereka dilatih untuk berbagai misi seperti pertempuran kota, evakuasi militer, pengamanan tokoh, dan pertempuran besar. Untuk menjalankan misi-misi tersebut, tiap personel Blackwater digaji sebesar 1000–1500 dolar per hari.¹⁴³ Dalam kegiatan sehari-hari mereka di Irak, mereka sulit dibedakan dengan tentara reguler lainnya dikarenakan mereka menggunakan seragam dan atribut yang sama dengan tentara reguler.

Murray Horton menulis bahwa kemiripan mereka dengan militer sungguhan membuat mereka terlibat masalah di Irak. Penduduk setempat yang melihat mereka mengira mereka anggota pasukan elite atau paling tidak anggota CIA. Suatu predikat yang sangat berbahaya di wilayah seperti Irak. Satu gaya yang memang sangat mirip dengan para pasukan khusus adalah kebiasaan mereka menggunakan kacamata Oakley.¹⁴⁴ Kebiasaan inilah yang sering membuat mereka dianggap sombong karena bergaya layaknya pasukan elite.

Dengan profil seperti itu, tidak heran jika mereka kerap dijadikan sasaran oleh para gerilyawan Irak ketika bertugas. Salah satu serangan yang paling sensasional adalah yang terjadi di Fallujah seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Gaya mereka yang sangat mirip dengan pasukan reguler AS membuat mereka jadi sasaran utama serangan. Ditambah lagi kebencian para gerilyawan terhadap kehadiran pasukan AS di Irak. Keempat anggota Blackwater yang terbunuh menjadi sebuah catatan hitam yang

¹⁴³ Murray Horton, *loc. cit*

¹⁴⁴ Oakley adalah salah satu merek dagang industri kacamata yang paling terkemuka di dunia. Merek dagang ini sangat identik dengan industri mode.

diekspose besar-besaran ke seluruh dunia. Salah satu inspirasi penulisan tesis ini juga berasal dari peristiwa itu. Sebelum peristiwa itu diberitakan, masalah tentara bayaran di Irak tidak pernah dibahas sekalipun di dalam kolom artikel media dan surat kabar terkenal di Indonesia. Namun, setelah kejadian tersebut, mulai ada yang mengangkat masalah ini ke permukaan walaupun sifatnya masih dangkal dan asuntif.

Oleh karena berisikan para mantan pasukan elite, maka para personel Blackwater sering kali menggunakan persenjataan yang juga tidak biasa. Sebagai sebuah perusahaan swasta, Blackwater sering mengubah dan memodifikasi persenjataan mereka sesuai kebutuhan dan permintaan para personel. Salah satu pemberitaan yang kontroversial terkait masalah ini adalah penggunaan peluru yang disebut APLPs (Armor Piercing Limited Penetrations). Peluru ini adalah produk militer yang belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah AS dan sama sekali belum pernah digunakan oleh pasukan militer. Peluru ini dibuat oleh sebuah perusahaan swasta bernama Le Mas yang berada di kota Arkansas, AS. Yang menjadi kelebihan peluru ini adalah daya hantamnya yang dapat menghancurkan lapisan baja dengan ketebalan beberapa inci. Peluru ini tidak menembus lapisan baja tersebut melainkan menghancurkannya seperti sebuah bom tanam. Karena keampuhannya, peluru ini sampai disebut sebagai pelumat logam.¹⁴⁵ Bisa dibayangkan bagaimana jika peluru ini digunakan untuk target manusia.

Pada pertengahan September tahun 2003, salah satu personel Blackwater menggunakan senjata ini untuk membunuh milisi Irak yang menyergap mereka di sebelah utara Baghdad. Salah satu personel yang menembakkan senjata itu menceritakan bahwa ia hanya mengenai bagian dubur lawannya. Namun, seketika itu juga bagian bawah perut si penyergap

¹⁴⁵ Jeremy Scahill, *Blackwater: The Rise of The World's Most Powerful Mercenary Army*, New York: Nations Book, 2007, hlm.63

hancur berantakan dan seketika itu pula dia tewas.¹⁴⁶ Dubur memang bukan titik yang mematikan untuk sebuah peluru senapan. Namun, dengan peluru yang satu ini, bagian apa pun dari tubuh manusia bisa menjadi target serangan yang mematikan. Sampai saat ini, peluru tersebut masih menjadi perdebatan di dalam kongres AS. Di samping itu sangat kecil harapan peluru itu dapat diterima oleh PBB sebagai senjata organik militer. Di lain pihak, tanpa mengindahkan berbagai regulasi mengenai penggunaan senjata, Blackwater membekali para personelnnya dengan peluru ini.

Aset-aset penting berupa kilang dan ladang minyak banyak terdapat di wilayah utara dan selatan Irak. Markas komando terbesar AS terdapat di Umm Qassar di sebelah selatan Irak dan juga di Baghdad. Wilayah selatan adalah wilayah yang didominasi golongan Syiah. Sementara itu, wilayah utara didominasi suku Kurdi yang tidak berbahaya. Daerah yang paling berbahaya di Irak pascainvasi adalah wilayah Segitiga Sunni Irak¹⁴⁷ yang menghubungkan ketiga kota besar yaitu Baghdad, Ramadi dan Tikrit. Wilayah ini terdapat di tengah-tengah negara Irak dan merupakan jalur distribusi yang menghubungkan wilayah selatan dan utara Irak. AS harus melewati jalur ini setiap kali mengirim dan menjemput logistik mereka. Untuk alasan keamanan jalur inilah, Blackwater disewa pemerintah AS.

Jika dalam menjalankan misi, para personel Blackwater terlibat baku tembak dengan kelompok pemberontak, maka mereka dapat memberikan serangan balik sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka memang tidak diharuskan menyerang, namun mereka kerap dijadikan umpan bagi para gerilyawan agar keluar dari sarang mereka. Sambil terus meladeni kelompok gerilyawan, para personel Blackwater berusaha

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm.64

¹⁴⁷ Trias Kuncahyono, *Bulan Sabit di Atas Baghdad*, Jakarta: Penerbit Buku Gramedia, 2005, hlm. 135

menghubungi pasukan koalisi untuk meminta bantuan. Jika mereka beruntung, bantuan tersebut akan tiba tepat waktunya. Namun jika mereka sedang sial, maka bantuan itu akan datang setelah para personel ini terbunuh atau tertangkap.

Irak pascainvasi memang berubah menjadi lebih menyeramkan dibanding saat invasi. Peledakan bom terjadi di mana-mana hampir setiap hari. Wilayah yang paling sering mendapatkan serangan adalah kota-kota Irak bagian tengah. Kota-kota ini pada masa kekuasaan Saddam Hussein merupakan sentral kekuatan militer Irak. Kota-kota seperti Baghdad, Fallujah, Ramadi, dan Tikrit merupakan kota yang paling sering mendapatkan serangan. Kota-kota tersebut juga merupakan kota yang menjadi basis populasi golongan Sunni Arab yang ada di Irak. Pada masa kekuasaan Saddam, golongan Sunni adalah golongan yang paling dekat dengan kekuasaan sekaligus memegang kekuatan militer negara ini. Wilayah ini adalah yang menjadi pusat kekuasaan politik serta militer Saddam Hussein.

Di wilayah yang sering disebut sebagai segitiga Sunni Irak, sisa-sisa kekuatan militer Saddam bangkit memberikan perlawanan. Mereka yang pada masa sebelumnya adalah tentara yang sejahtera menginginkan keadaan kembali seperti sebelumnya. Keberadaan pasukan AS di Irak yang menjaga proses demokratisasi Irak menjadi hal yang paling dibenci militer Irak. Mereka sadar sepenuhnya, apabila Irak mengadopsi sistem demokrasi maka akses mereka terhadap kekuasaan akan sangat kecil mengingat mereka bukan berasal dari golongan yang minoritas. Meskipun terus-menerus dikejar oleh pasukan koalisi, para mantan tentara Saddam Hussein ini masih memberikan perlawanan yang berarti. Ditambah lagi, mereka mulai menghidupkan taktik perlawanan gerilya dengan membaaur di tengah masyarakat sipil sebelum melakukan serangan. Sampai saat ini, mereka

masih menganggap Irak belum jatuh ke tangan AS. Model perlawanan seperti inilah yang paling merepotkan pasukan koalisi dan tentara bayaran.

Proyek rekonstruksi Irak memang dipusatkan di wilayah segitiga Sunni. Berbagai proyek rekonstruksi di bidang kemanusiaan dan sosial terus dilaksanakan di wilayah ini. Blackwater adalah satu-satunya PMC yang dikontrak pemerintah AS untuk mengamankan wilayah ini. Keberadaan mereka bukan untuk misi kemanusiaan ataupun misi sosial. Keberadaan mereka adalah untuk mengamankan jalur pipa minyak yang melewati wilayah ini. Jalur pipa minyak itu berasal dari wilayah selatan dan utara Irak yang memang kaya akan minyak. Salah satu kota yang dilewati oleh pipa minyak adalah Fallujah yang sering disebut kota kematian bagi pasukan AS. Di kota ini pula insiden berdarah terhadap 4 personel Blackwater terjadi. Di luar wilayah Segitiga Sunni Irak, Blackwater juga kerap menghadapi perlawanan. Markas mereka di kota Najaf, Irak Selatan pernah digempur ratusan milisi bersenjata Irak. Insiden itu menewaskan beberapa personel Blackwater dan sejumlah pasukan koalisi.

Personel Blackwater adalah yang paling sering menjadi sasaran para gerilyawan ataupun pasukan pemberontak di Irak. Kemiripan mereka dengan tentara reguler menjadi salah satu faktor utamanya. Personel PMC ini sering tewas di dalam tugas akibat salah perhitungan yang disebabkan kurangnya data intelijen dalam misi mereka. Salah satu hal yang membedakan PMC dengan satuan militer reguler adalah akses mereka terhadap data intelijen. Sebagai perusahaan swasta, mereka sering kesulitan atau bahkan tidak mendapatkan data intelijen terkait misi yang akan mereka jalankan.

Namun, terlepas dari segala kelemahan yang ada, PMC ini memang tampil dengan wajah yang garang. Mereka terkenal memiliki nyali baja di wilayah tugas. Selain itu mereka juga kerap menciptakan aturan hukum sendiri tanpa memedulikan akses bagi pihak yang menyewa jasa

mereka. Input personel yang kebanyakan adalah mantan tentara, bahkan pasukan khusus membuat mereka memiliki gaya arogan yang justru sering berbalik merugikan mereka. *"we are not simply a private military company"*, begitu perkataan sang manajer dalam mempromosikan perusahaan ini. Bahkan, mereka berani mengatakan kalau mereka adalah militer profesional yang dapat menjadi solusi bagi operasi-operasi keamanan di dunia.

4.3.2.3 DynCorp

Perusahaan penyedia tentara bayaran lainnya yang mendapatkan kontrak di Irak pascainvasi adalah DynCorp. Berbeda dengan Halliburton yang memperkenalkan dirinya sebagai perusahaan kontraktor dan energi, DynCorp secara terang-terangan menunjukkan dirinya sebagai perusahaan jasa keamanan (*security*) seperti halnya Blackwater.

DynCorp didirikan pada 1946 pasca-perang dunia kedua. Pada awalnya, pendirian perusahaan ini merupakan solusi atas melimpahnya jumlah veteran perang pascaperang dunia kedua. Selain banyaknya jumlah veteran perang, jumlah persenjataan yang dimiliki juga masih sangat banyak. Atas dasar itulah, DynCorp didirikan yang kemudian berhasil mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Pendirian DynCorp saat itu didukung penuh oleh Presiden AS Henry S Truman.¹⁴⁸

DynCorp adalah perusahaan penyedia tentara bayaran yang memiliki kantor pusat di Virginia, AS. Para pendiri perusahaan ini adalah para mantan pilot perang dunia kedua. Semenjak berakhirnya perang, mereka juga semakin kehilangan pekerjaan. Untuk menyalahi hal ini, mereka mendirikan perusahaan pengangkut (kargo) yang bernama California Eastern Airways. Perusahaan ini menggunakan koneksi yang mereka miliki

¹⁴⁸ www.dyncorp.com, diakses pada 10 Desember 2007.

dengan pihak militer untuk mendapatkan proyek-proyek pengangkutan kargo bagi keperluan militer. Dengan koneksi yang mereka miliki, mereka sering mendapatkan proyek besar ketika sebuah perang berlangsung. Salah satunya perang yang melibatkan mereka secara aktif adalah Perang Korea tahun 1950-an.¹⁴⁹

Setelah memiliki cukup modal sekaligus reputasi yang baik dalam bisnis, mereka pun merambah ke bidang lain seperti pengawalan pribadi, pelatihan militer dan lain-lain. Bidang-bidang bisnis yang mereka kembangkan tidak pernah jauh dari dunia militer, oleh karena akses pelanggan dan klien mereka yang paling besar adalah militer itu sendiri. Satu hal yang menjadi ciri khusus dari DynCorp adalah komitmen mereka untuk menghindari keterlibatan secara langsung dalam situasi perang terbuka layaknya militer resmi. Dengan kata lain, mereka adalah tentara bayaran yang *low profile* dan berada di belakang layar.

Dalam tender rekonstruksi pascaperang di Irak, DynCorp ikut ambil bagian sebagai PMC yang aktif. Seperti halnya Halliburton yang menjadikan Dick Cheney sebagai perantara kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, DynCorp juga menjadikan Paul Lombardi sebagai penghubung berbagai irisan kepentingan tersebut. Keduanya (Cheney dan Lombardi) menggunakan akses koneksi mereka dengan pemerintahan pusat. Koneksi yang dimiliki oleh Lombardi berasal dari jejak kariernya di lingkungan militer AS. Walaupun tidak sebagai personel militer resmi, jasanya selalu dipakai oleh militer. Sebelum menjadi pimpinan DynCorp dia pernah merintis karier pada sejumlah organisasi swasta rekanan militer AS. Di antara organisasi tersebut antara lain; Army Aviation Association of America, American Defense Preparedness Association, American Society of Naval Engineers, Armed Forces Communications and Electronics

¹⁴⁹ www.wikipedia.org

Association (AFCEA), Navy League, Air Force Association, serta Association of the US Army. Pengalaman panjangnya bersama militer AS itulah yang membuatnya memiliki koneksi dengan pemerintahan AS saat tender rekonstruksi.

Dalam proyek rekonstruksi Irak, Dyn Corp merupakan salah satu PMC yang mendapatkan kontrak kerja. Berbeda dengan Halliburton dan Blackwater, DynCorp lebih memilih untuk menjalankan tugas di belakang medan tempur. Mereka tidak mau terlibat langsung dalam sebuah kontak senjata. DynCorp lebih sering ditugaskan untuk memasok senjata dengan teknologi canggih sekaligus melatih tentara reguler untuk mengoperasikannya. Dalam *website* resminya, DynCorp memang tidak menunjukkan kegemarannya terhadap perang, tetapi lebih kepada menawarkan tenaga profesional yang didukung teknologi canggih.¹⁵⁰

Kondisi di Irak pascainvasi sangat tidak stabil. Pengeboman dan penyeragaman terhadap tentara asing (AS) sering sekali terjadi tanpa diduga-duga. Untuk mengamankan jalur pengiriman logistik dari dan menuju aset-aset AS, dibutuhkan seperangkat sistem radar yang canggih. Peralatan-peralatan tersebut nantinya akan digunakan oleh tentara bayaran ataupun tentara reguler lainnya di lapangan. Perusahaan yang memasok dan mengembangkan peralatan canggih tersebut salah satunya adalah DynCorp.

Sejak perusahaan ini dipimpin oleh Paul V. Lombardi, DynCorp menjadi perusahaan jasa keamanan yang besar. Keberhasilan Lombardi dalam mengelola perusahaan ini mengorbitkannya sebagai wakil presiden perusahaan pada tahun 1994. Dengan jabatannya yang baru sebagai wakil presiden perusahaan, DynCorp berhasil meraup keuntungan yang semakin besar. Keuntungan yang dihasilkan DynCorp pada masa Lombardi mencapai 1 miliar dolar per tahun. Para pengamat ekonomi banyak yang

¹⁵⁰ *Ibid*

berpendapat bahwa apa yang dicapai oleh DynCorp 80 persennya adalah hasil kerja keras Lombardi.¹⁵¹

Keberhasilan DynCorp yang menggabungkan kekuatan jaringan dengan kreativitas bisnis memang tertuju pada sosok Lombardi. Selama periode kepemimpinannya (1997–2003) perusahaan ini telah mempunyai kontrak bisnis dengan 30 lembaga pemerintah di AS. Beberapa lembaga itu antara lain; Departemen Pertahanan, FBI, DEA, Sekretariat Negara, serta Lembaga Pemasyarakatan.

Pelanggan utama DynCorp adalah pemerintah AS. DynCorp dijadikan rekanan bisnis yang sangat penting karena bagi pemerintah AS terutama di bidang asistensi militer. DynCorp juga sanggup menyediakan jasa intelejijen bagi pemerintah AS, baik untuk Pentagon ataupun CIA.¹⁵² Tidak hanya itu, berbagai macam jasa keamanan pejabat negara sukses dikerjakannya. Perusahaan ini semakin maju ketika bergabung dengan CSC (Computer Sciences Corporation), sebuah perusahaan teknologi computer dari California.¹⁵³ Penggabungan itu membuat Dyn Corp dapat semakin melebarkan sayapnya dalam bisnis teknologi militer yang berbasis komputer.

Amerika Serikat menjadikan perang Irak sebagai uji coba berbagai teknologi persenjataan mereka yang terbaru. Teknologi persenjataan yang dikembangkan bersama perusahaan semacam DynCorp. Kebanyakan dari kerja sama ini ada pada bidang komputerisasi persenjataan. Hampir seluruh persenjataan Amerika Serikat yang tercanggih saat ini berbasis komputer. Hampir tidak ada lagi senjata-senjata konvensional yang dianggap berisiko untuk digunakan. Sebelum senjata-senjata canggih tersebut digunakan

¹⁵¹ Majalah *Angkasa* Edisi Koleksi, "Tentara Bayaran", April 2006

¹⁵² Lenora Forstel, "The Cost of The United States Colonial War Against Iraq", www.globalresearch.ca, 28 Agustus 2004, hlm. 2

¹⁵³ www.globalsecurity.org, diakses pada 5 Desember 2007

secara total oleh militer, diperlukan masa uji coba yang melibatkan pihak calon pengguna dan pemasok. Di sinilah peran DynCorp dimainkan. Mereka mendapatkan kontrak untuk melatih tentara yang menggunakan berbagai instrument komputer dalam persenjataan mereka. Selain itu, DynCorp juga mengirim teknisi untuk memperbaiki peralatan militer AS yang digunakan di Irak.

Setelah invasi berakhir, DynCorp masih mendapatkan pekerjaan sebagai pendukung program rekonstruksi pasca-perang. Total personel yang dikirimkan ke Irak setelah invasi justru jauh lebih besar dibandingkan pada masa invasi. DynCorp dikontrak oleh pemerintah AS untuk menangani masalah keamanan, teknologi komputer sampai penasihat militer Irak. DynCorp juga mendapatkan proyek untuk melatih para anggota polisi di Irak. Kemampuan yang satu ini merupakan salah satu spesialisasi DynCorp dibandingkan dengan PMC yang lain.¹⁵⁴ Total bayaran yang didapatkan DynCorp di Irak pasca-invasi mencapai 226,865 miliar dolar setahun. Pendapatan sebesar inilah yang membuat mereka tetap bertahan di Irak meskipun kondisi keamanan di negara tersebut jauh dari kata stabil.

4.4 Prospek dan Tantangan Bisnis Tentara Bayaran AS di Masa Depan

Amerika Serikat baru saja membuat sejarah baru dengan memilih Barack Obama sebagai Presiden negara itu. Barack Obama adalah presiden kulit hitam AS yang pertama yang merupakan keturunan asli ras Afrika. Naiknya Obama sebagai presiden AS mendapatkan legitimasi yang luar biasa dari seluruh dunia. Acara inagurasi dirinya disaksikan oleh ratusan ribu orang secara langsung. Tidak hanya di dalam negeri Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia, semua orang menyaksikan malam yang bersejarah tersebut.

¹⁵⁴ Lenora Forstel, *loc.cit*, hlm.2

Bagi Amerika Serikat sendiri, setidaknya ada tiga hal utama yang harus segera mereka benahi pasca-pemerintahan Bush. Yang pertama adalah penyelesaian krisis finansial di AS, kedua adalah pengembalian citra AS di mata internasional dan yang ketiga adalah isu lingkungan hidup. Ketiga hal tersebut akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Obama yang baru terbentuk. Prospek hubungan Amerika dengan wilayah Timur Tengah masuk dalam prioritas kedua, yaitu terekai dengan citra Amerika yang jatuh pasca-kebijakan-kebijakanperang presiden Bush.

Sebagian besar masyarakat dunia yang menyaksikan acara inagurasi Obama penasaran dengan apa yang akan disampaikan dalam pidato pertamanya pasca-pelantikan. Spekulasi mengenai apa yang akan disampaikan Obama banyak ditikberatkan pada harapan-harapan masyarakat dunia dari presiden Amerika yang baru terpilih ini. Terlebih lagi, saat itu bertepatan dengan konflik Gaza antara Israel dengan Hamas di Palestina. Saat itu adalah momen yang tepat bagi pemerintahan Amerika Serikat untuk mengembalikan kepercayaan dunia, dimulai dengan pidato pelantikan presiden mereka.

Hal yang tidak diduga sama sekali adalah tidak adanya satu kalimat pun yang memberikan harapan bagi penyelesaian konflik Gaza. Padahal, saat itu, jumlah korban di Gaza sudah mencapai angka 1000 orang meninggal. Sedikitpun Obama tidak menyampaikan sikapnya terhadap penderitaan warga Gaza. Ketidakpedulian Obama pada Gaza menunjukkan juga ketidakpeduliannya dengan isu-isu Timur Tengah.

Amerika di bawah kepemimpinan Barrack Obama akan menghadapi zaman baru. Zaman saat seluruh dunia melihat, apakah negara ini sanggup dijadikan pemimpin dunia? Apakah negara ini sanggup untuk menyelesaikan begitu banyak konflik yang ada? Zaman baru adalah zaman saat semua masyarakat dunia sangat siap untuk meninggalkan Amerika. Terkait dengan dinamika konflik dengan wilayah Timur Tengah, khususnya bisnis tentara bayaran, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi tantangan AS ke depan.

Afghan⁷⁹ untuk mengusir Uni Soviet dari wilayah Afghanistan. Amerika Serikat memberikan asistensi yang sangat vital bagi perjuangan tentara Mujahidin dengan cara melatih dan mempersenjatai mereka. Selain faktor musuh bersama (Uni Soviet), AS juga memiliki sejarah kerja sama ekonomi dengan Taliban. Ketika rezim Taliban berkuasa, perusahaan minyak asal Amerika Serikat, UNOCAL pernah menandatangani kesepakatan dengan Taliban untuk membangun saluran gas senilai 2 miliar dolar. Selain itu, kedua belah pihak juga pernah menandatangani kontrak untuk pembangunan saluran minyak senilai 2,5 miliar dolar yang digunakan sebagai transportasi minyak dan gas dari Turkmenistan ke Pakistan melalui Afghanistan.⁸⁰

Pasca-peledakan dua menara kembar WTC di New York, hubungan AS dan Afghanistan berubah secara drastis. Pemerintahan AS akhirnya menyerang Afghanistan setelah terjadi tekanan yang luar biasa dari kalangan feminis di dalam negeri, serta dukungan yang diberikan Taliban kepada Osama bin Laden.⁸¹ Tanpa menunggu konfirmasi dari pihak pemerintah Afghanistan untuk mengekstradisi para tersangka teror yang diburu, AS segera mengerahkan armada perangnya untuk menginvasi.

Invasi AS terhadap Afghanistan merupakan sebuah langkah persiapan bagi militer AS terhadap invasi besar berikutnya (invasi atas Irak). Hal itu ditunjukkan oleh kesamaan jenis senjata yang digunakan

⁷⁹ Tentara Mujahidin Afghan adalah gabungan dari para pejuang muslim yang berasal dari dalam dan luar Afghanistan. Mereka bergabung dalam rangka berjihad mengusir Uni Soviet dari wilayah Afghanistan. Taliban adalah salah satu faksi muslim yang berasal dari Afghanistan dan sekaligus faksi yang terbesar.

⁸⁰ Noreena Hertz, *Membunuh Atas Nama Kebebasan: Kapitalisme Global dan Kematian Demokrasi* (Terj: Dindin Solahudin), Bandung: Nuansa, 2004, hlm. 61

⁸¹ Ahmed Rashid, *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*, New Haven: Yale University Press, 2001, hlm.50

militer AS di Afghanistan dengan di Irak. Beberapa senjata canggih, seperti bom berpenuntun laser dan satelit, digunakan untuk sekaligus diujicobakan di Afghanistan. Dibandingkan Irak, kekuatan militer Afghanistan jauh lebih lemah. Oleh karena itu, AS membuat perhitungan yang lebih akurat untuk menginvasi Irak lewat perang Afghanistan.

Alasan militer AS menjadikan invasi terhadap Afghanistan sebagai perang persiapan cukup masuk akal. *Pertama*, kondisi medan tempur yang akan dihadapi AS di Irak kurang lebih memiliki kesamaan dengan kondisi medan di Afghanistan. Kedua negara memiliki iklim sub-tropis yang didominasi dengan dataran gurun pasir yang luas. Amplitudo cuaca (perbedaan suhu) antara siang dan malam harinya juga sama-sama besar. Bentuk medan tempur dan iklim tersebut mengakibatkan perlunya penyesuaian jenis peralatan tempur yang akan digunakan pihak penyerang.

Kedua, jenis senjata yang digunakan untuk kondisi medan tempur di Afghanistan sama dengan yang digunakan di Irak. Kesamaan jenis senjata ini menjadi kesempatan tersendiri bagi militer AS untuk mengujicoba senjata muktahir mereka sebelum menyerang Irak. Dengan cara tersebut, militer AS bisa menentukan peralatan dan persenjataan yang tepat untuk menyerang Irak. Hal ini tentu saja meminimalkan risiko kerugian yang akan dihadapi di Irak.

Ketiga, karakter pasukan perlawanan yang dihadapi oleh AS di Afghanistan memiliki banyak persamaan dengan yang akan dihadapi di Irak. Di Afghanistan, pasukan taliban yang berbentuk milisi, banyak yang berbaaur dengan masyarakat sipil. Begitu juga di Irak, pasukan inti garda republik terdiri dari orang-orang yang direkrut langsung dari kampung halaman Saddam Hussein. Selain itu, di Afghanistan juga terdapat milisi Mujahidin yang pernah mengusir Uni Soviet pada 1989. Milisi Mujahidin adalah pasukan Islam yang tidak takut mati untuk mengusir penjajah di

tanah mereka. Karakter Mujahidin yang tidak takut mati ini sama dengan pasukan *Fedayeen*⁸² Saddam Hussein di Irak.

Invasi terhadap Afghanistan dimulai pada 8 Oktober 2001.⁸³ Invasi tersebut menggunakan sandi operasi *Enduring Freedom* (Kemerdekaan Abadi). AS menggunakan bermacam jenis persenjataan paling muktahir untuk melumpuhkan kekuatan Taliban. Senjata yang digunakan AS di Afghanistan merupakan senjata dengan jenis yang sama seperti yang digunakan pada invasi Irak.

Afghanistan adalah sebuah negara miskin dengan iklim yang tidak subur. Negara ini selalu dilanda perang saudara dan perpecahan yang tiada hentinya. Kedatangan Uni Soviet sedikit banyak mempersatukan golongan-golongan tersebut untuk mengusir Uni Soviet dari Afghanistan. Melihat kondisi ini, sangat berlebihan jika AS menggunakan kekuatan militernya yang terancang hanya untuk melumpuhkan Taliban demi alasan efektivitas. Selain itu AS juga dibantu oleh militer Inggris dan Rusia yang sama-sama mendukung invasi.⁸⁴

Salah satu jenis bom yang dipakai sekaligus diuji kemampuannya di Afghanistan adalah GBU-28. Bom ini menggunakan laser sebagai penuntunnya dan dapat menghancurkan *bunker*.⁸⁵ Penggunaan bom jenis ini tentu saja merupakan persiapan sebelum menyerang Irak. Di Irak,

⁸² Kata *Fedayeen* berasal dari bahasa Arab yang artinya pasukan berani mati. Pasukan *Fedayeen* Saddam Hussein adalah pasukan elite yang direkrut secara langsung oleh Saddam Hussein, yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi dalam menjaga keselamatan Saddam Hussein.

⁸³ Serangan udara sudah dilakukan secara massif sejak satu hari sebelumnya, tanggal 7 Oktober 2001. Pemerintahan George W. Bush baru menyatakan secara resmi serangannya pada tanggal 8 Oktober 2001. *op.cit*, Z.A. Maulani, hlm. 125

⁸⁴ Dukungan Inggris kepada Amerika Serikat lebih disebabkan faktor kedekatan politik kedua negara. Sementara itu, dukungan Rusia dilandasi keinginan Rusia untuk membendung arus pergerakan militansi muslim dari Asia Tengah ke wilayah negara bekas Uni Soviet yang masih "di bawah pengaruh" Rusia.

⁸⁵ Bunker adalah tempat persembunyian yang dibuat di bawah tanah untuk menghindari serangan udara dan bom.

banyak terdapat *bunker* yang menjadi tempat persembunyian milisi atau pasukan perlawanan yang berbaur dengan masyarakat sipil.

Sebelum bom GBU-28 ini dijatuhkan, sasarannya harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk itu, AS menggunakan berbagai macam pesawat pengintai tak berawak⁸⁶ untuk mendapatkan koordinat titik pengeboman yang tepat. Pesawat seperti itu merupakan teknologi paling muktahir dalam dunia militer yang meminimalkan jatuhnya korban dalam misi pengintaian.

Dengan segala kemampuan militer yang dikerahkan dalam operasi *enduring freedom*, kekuasaan Taliban berhasil dijatuhkan. AS kemudian membentuk pemerintahan boneka yang dipimpin oleh Presiden Hamid Karzai. Setelah itu, Afghanistan menjadi sekutu AS di Asia Tengah sekaligus pangkalan militer.

4.2 Dominasi Korporasi pada Kebijakan Perang George W. Bush

4.2.1 Dukungan Sejak Kampanye

Di era demokrasi modern seperti sekarang ini, partai politik harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak untuk meraih tujuan politiknya. Jumlah uang yang sangat besar itu akan sangat membantu di masa kampanye untuk merebut hati pemilih dan konstituen mereka. Hal ini menyebabkan para politisi dewasa ini terkotak-kotak menurut bisnis besar dan akses mereka terhadap modal. Tidak hanya itu, partai-partai politik mengikuti strategi dan taktik korporasi untuk memasarkan dan menjual produk mereka.⁸⁷

⁸⁶ Dalam dunia militer, pesawat ini disebut UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*). Jenis dari UAV ini cukup banyak, beberapa diantaranya memiliki kemampuan menyerang. *Aviation Week & Space Technology*, 26 Maret 2003

⁸⁷ Margaret Scammell, "Political Marketing: Lessons for Political Sciences", *Political Studies*, XLVII, hlm.720

Jika kita coba membandingkan, pada era sebelumnya, partai politik menjalankan strategi kampanye dengan murah meriah serta padat karya. Kita biasa mengenal istilah ini dengan "*direct selling*", penyebaran brosur atau leaflet dari rumah ke rumah. Selain itu, sering juga diadakan pertemuan-pertemuan di tingkat lokal yang hanya perlu menyediakan makanan dan minuman untuk masyarakat yang hadir. Kedua cara ini adalah cara yang kuno (meskipun tidak ditinggalkan) serta membutuhkan sedikit biaya, tetapi efektivitasnya mulai lemah.

Strategi kampanye partai politik di era informasi digital saat ini adalah dengan menguasai media. Strategi ini bertumpu pada kemampuan komunikasi massa melalui media periklanan. Berbagai macam jenis iklan dan jenis media seperti koran, surat kabar, televisi serta internet adalah ujung tombak operasional strategi kampanye mereka. Model kampanye seperti ini mengeluarkan ongkos yang sangat mahal, tetapi memiliki efektivitas yang sangat kuat.

Di Amerika Serikat, perkembangan teknologi informasi dan digital sangat mendukung model kampanye melalui media periklanan. Dua partai besar di negara itu, Partai Republik dan Partai Demokrat, sama-sama menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk sebuah pemasaran iklan politik di berbagai media. Pada 1992, kedua partai besar itu menghimpun dana sebesar 86 juta dolar dalam bentuk sumbangan lunak. Pada 1996, dana itu melonjak tajam menjadi 260 juta dolar, sedangkan para pengamat memperkirakan dana yang dihabiskan untuk Pemilu tahun 2000 mencapai 393 juta dolar.⁸⁸

Sejak tahun 1987 sampai dengan 1996, Partai Republik mendapatkan kurang lebih 260 juta dolar sumbangan dari korporasi swasta untuk kampanye mereka. Pendanaan seperti itu berasal dari suatu

⁸⁸ Michael Ellison dan Martin Kettle, "Back-door Donations Sharer All Spending Records", *Guardian*, 7 November 2000.

lingkaran elite kecil dalam struktur masyarakat AS. Mereka adalah elite-elite korporasi yang memiliki kepentingan terhadap politik. Sebagai contoh, ada seperempat dari 1% penduduk AS yang memberikan dua ratus dolar atau lebih kepada para kandidat anggota kongres atau partai-partai politik pada lingkaran pemilihan 1995–1996. Selebihnya, sekitar 96% rakyat AS tidak memberikan apa-apa kepada para politisi atau partai politik.⁸⁹

Dengan kondisi semacam ini, akses terhadap jabatan politis di Amerika Serikat nyaris merupakan peluang eksklusif yang hanya terbuka bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kaya. Dalam masa empat bulan pertama kampanyenya untuk pemilihan presiden tahun 2000, George W. Bush mengumpulkan dana 37 juta dolar. Jumlah ini lebih besar dari himpunan dana Bill Clinton atau Bob Dole dalam keseluruhan kampanyenya pada 1996.⁹⁰

Ada banyak mantan elite korporasi yang menduduki jabatan politis dengan uang pribadinya di masa pemerintahan George W. Bush. Sebagai contoh, Jon Corzine, mantan pemimpin perusahaan Goldman Sachs, menghabiskan dana sebesar 36 juta dolar untuk mendapatkan satu kursi senat AS. Contoh lainnya adalah Michael Bloomberg yang menghabiskan 50 juta dolar untuk jadi walikota New York. Kemudian, ada pula Michael Hufthington yang gagal menjadi anggota Senat di California meskipun sudah mengeluarkan dana sebesar 30 juta dolar.⁹¹

Para elite korporasi, baik atas nama pribadi atau korporasinya tentu saja tidak serta merta memberikan sumbangan finansial ketika kampanye. Sumbangan-sumbangan tersebut tentu saja digunakan untuk membeli aksi dan pengaruh dari para politisi atau penentu kebijakan yang mereka

⁸⁹ Charles Lewis, "Capital Gains on Capital Hill", dari situs www.publicintegrity.org

⁹⁰ Julian Borger, "For Sale: The Race for the White House", *Guardian*, 7 Januari 2000.

⁹¹ *Guardian*, 7 Januari 2000, *loc.cit*

dukung. Dalam konteks perang Irak, sumbangan finansial korporasi-korporasi besar di AS memiliki kepentingan terhadap akses bisnis pada proyek rekonstruksi pasca-perang.

George W. Bush adalah orang yang terikat secara moral dan finansial dengan para elite korporasi di AS akibat dukungan mereka sejak masa kampanye. Pada masa awal jabatannya, Bush langsung menunjuk Dick Cheney sebagai wakil Presiden yang berasal dari perusahaan Halliburton. Selain itu, dia menunjuk pula Karl Rove sebagai ahli strategi politik utamanya yang dulunya adalah ahli strategi utama Phillip Morris. Bush juga menunjuk Mitch Daniels, seorang mantan wakil presiden Eli Lilly sebagai kepala Kantor Gedung Putih urusan Manajemen dan Anggaran serta Paul O'Neill yang berasal dari pabrik aluminium Alcoa sebagai sekretaris keuangan.⁹²

Berbeda dengan konteks demokrasi presidensial multi partai yang dianut oleh negara Indonesia, sistem demokrasi yang ada di AS hanya didominasi oleh dua Partai Besar, yaitu Republik dan Demokrat. Pemenang dari pemilu akan mengatur secara total jalannya pemerintahan empat tahun ke depan. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, kepentingan-kepentingan politik dinegosiasikan dalam kerangka kontrak politik koalisi antarpol. Kepentingan para pengusaha lesap di dalam kerangka koalisi tersebut. Dalam kasus Amerika Serikat, kontrak politik yang terjadi justru ada di antara para politisi dengan para korporasi. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan sistem perekonomian yang sangat pro terhadap pasar. Realisasi kesepakatan politik di antara keduanya terlihat dari ditempatkannya banyak mantan elite korporasi dalam struktur pemerintahan. Setelah itu, secara bersama-sama, mereka menelurkan berbagai kebijakan yang mengasosiasikan kepentingan korporasi.

⁹² Noreena Hertz, *op.cit*, hlm.140

Salah satu kebijakan pemerintahan George W. Bush yang dianggap pro terhadap kepentingan para pengusaha adalah menarik diri dari protokol Kyoto.⁹³ Kebijakan ini tentu saja sangat bertentangan dengan semangat bangsa-bangsa di dunia untuk mengurangi dampak pemanasan global. Keputusan ini memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan minyak AS yang sebagian besar adalah penyumbang partai Republik.

George W. Bush bersama dengan partai Republik menempatkan sejumlah orang yang mendapat dukungan dari perusahaan Enron untuk duduk sebagai anggota komisi energi di dalam dewan perwakilan rakyat mereka.⁹⁴ Komisi ini berkaitan langsung dengan kepentingan perusahaan-perusahaan energi raksasa di AS yang telah berkontribusi dalam kampanye partai Republik selama masa kampanye. Kalkulasi angka sumbangan mereka mencapai nilai 25,4 juta dolar.⁹⁵

Kebijakan demi kebijakan kontroversial yang dilahirkan oleh rezim Bush mengundang kecurigaan kita terhadap adanya konspirasi antara pihak korporasi besar dengan partai Republik. George W. Bush adalah seorang presiden yang berasal dari Partai Republik. Entah secara kebetulan atau tidak, para pengusaha yang memiliki kontribusi besar dalam kemenangan George W. Bush, tergabung dalam organisasi lobi Yahudi yang sudah memulai gerakan lobi mereka sejak masa kampanye pemilu presiden. Alasan para korporat ini memilih untuk mendukung Bush adalah obsesinya untuk menyerang Irak.

Setidaknya, ada beberapa alasan utama kenapa golongan Yahudi di AS sangat mendukung kampanye Bush dalam pemilu presiden.

⁹³ Protocol Kyoto adalah kesepakatan bersama di antara negara-negara di dunia di bawah naungan PBB untuk mengurangi emisi gas karbon dalam rangka mengurangi efek pemanasan global. protocol ini pertama kali diliris di Jepang pada 11 Desember 1997. Saat ini, sudah ada sekitar 184 negara di dunia yang telah meratifikasi protocol ini, termasuk 37 negara industri utama. www.unfccc.int/kyoto_protocol

⁹⁴ Julian Borger, "Power Firm Vetted Bush's Energy Regulations, *Guardian*, 26 Mei 2001.

⁹⁵ Julian Borger, "All the President's Bussinessmen", *Guardian*, 27 April 2001,

1. George W. Bush adalah anak dari presiden George Bush (Bush Senior). Pada 1991, Bush senior sudah pernah memerangi Saddam Hussein di Teluk. Saat itu, Irak di bawah Saddam Hussein menganeksasi Kuwait yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya. AS dan banyak negara sekutu mendapatkan mandat PBB untuk membantu Kuwait mengusir Irak dari wilayah mereka. Pertempuran besar itu pun terjadi. Saat itu, sebenarnya target AS tidak hanya sebatas mengusir Irak dari wilayah Kuwait, melainkan juga berusaha menurunkan Saddam Hussein dari kekuasaannya. Oleh karena terbentur mandat PBB yang membatasi serangan sekutu sampai tahap mengusir, AS gagal menjatuhkan Saddam Hussein. Padahal, di antara presiden Saddam Hussein dan Bush Senior sudah terjadi permusuhan yang sangat kental. Keduanya sudah saling menghina satu sama lain di depan forum-forum nasional dan internasional. Kegagalan ini menjadi warisan yang harus dievaluasi oleh Bush Junior satu dekade kemudian. Keinginan Bush Junior untuk menyerang Irak adalah sebuah harapan besar ayahnya yang belum dapat terpenuhi.
2. Bush adalah seorang pengusaha dari bidang perminyakan. Bidang usaha ini adalah bidang usaha yang memiliki kaitan sangat erat dengan konstelasi konflik di Timur Tengah. Bahkan, keluarga Presiden Bush memiliki hubungan khusus dengan keluarga kerajaan Arab Saudi. Hubungan khusus mereka digambarkan sebagai hubungan dua dinasti terkuat di dunia saat itu. Michael Moore, dalam film dokumenternya yang berjudul Fahrenheit 9/11 menayangkan dengan jelas kemesraan antara dua keluarga itu. Terkait dengan serangan ke Irak, Bush menganggap rezim Saddam Hussein adalah ancaman bagi kelangsungan investasi minyak mereka di Timur Tengah. Hal itu juga didukung oleh keluarga kerajaan Arab Saudi yang menganggap Saddam Hussein sebagai seorang Arab yang ambisius dan haus kekuasaan. Kesamaan pandangan dan visi kedua keluarga ini semakin membulatkan tekad Bush untuk menyerang Irak.

4.4.1 Reorientasi War On Terror

Rangkaian tragedi kemanusiaan yang dikawal oleh rezim Bush menghancurkan citra Amerika sebagai negara pengusung Hak Asasi Manusia. Ditambah lagi dengan adanya konspirasi di balik perang yang dilakukan di Timur Tengah. Kondisi ini membuat Amerika semakin dijauhi dalam pergaulan internasional. Amerika tidak memiliki wibawa sebagai sebuah negara besar yang terhormat. Negara ini justru menjadi simbol kejahatan dunia yang menindas layaknya Goliath. Konflik yang ada di Timur Tengah banyak bergantung dari sikap politik negara ini ke depan.

AS merupakan salah satu faktor dominan konflik yang ada di Timur Tengah saat ini. Hampir tidak ada satu konflik pun yang tidak melibatkan AS, baik secara langsung maupun tidak langsung di Timur Tengah. Negara yang disebut oleh Khomeini sebagai "Setan Besar" ini, baru saja melaksanakan pesta demokrasi mereka. Pemilu AS, yang merupakan pesta demokrasi dalam dinamika politik dalam negeri AS, akan memiliki implikasi luas ke seluruh dunia, dalam konteks penelitian ini, Timur Tengah.

Istilah *war on terror* dapat dikaitkan dengan perang terhadap Islam. Hal itu disebabkan karena pencitraan yang dilakukan oleh media Barat. Terorisme yang dimaksud oleh pemeritahan Bush adalah terorisme yang identik dengan perlawanan yang dilakukan golongan Islam garis keras. Jadi, istilah perang terhadap terorisme bukan berarti memerangi terorisme dalam definisi sesungguhnya, melainkan terorisme yang didekatkan dengan aktivitas perlawanan gerakan Islam garis keras. Hal ini di kemudian hari mengakibatkan citra teroris itu melekat ke dunia Islam. Dengan kata lain, apabila kita memprediksi bagaimana Obama akan berdialektika dengan terorisme (*war on terror*) maka sama saja kita memprediksi bagaimana Obama dengan dunia Islam.

Barack Obama yang dianggap sebagai tokoh revolusioner yang mendobrak tradisi WASP (*White Anglo-Saxon Protestan*) karena negronya, memiliki visi yang tidak lebih baik dari George W Bush. Media internasional yang begitu gencar menyoroti Obama seakan mengalihkan isu yang paling sentral bagi kita, yaitu visi Obama terhadap dunia Islam. Penokohan Obama sudah tidak dapat diragukan lagi karena hampir setiap surat kabar nasional/internasional membuat artikel khusus mengenai calon presiden yang satu ini. Artinya, masyarakat internasional, termasuk kita sudah mengenal Obama dengan baik dari sisi biografi dan fisik.

Visi Obama terhadap dunia Islam dapat kita lacak dari rekam jejaknya semenjak kampanye dilakukan. Pada masa itulah, Obama sering melontarkan pernyataan-pernyataannya terkait dengan isu terorisme.

Majalah *The Economist* pernah membuat laporan khusus mengenai Pemilu AS lengkap dengan penjabaran program-program strategis yang akan dijalankan dari kedua pasang calon presiden di AS. Terkait dengan isu Timur Tengah di masa kampanye. Menurut laporan tersebut, hal pertama adalah rencana Obama melakukan penarikan pasukan AS sepenuhnya dari wilayah Irak paling lambat 18 bulan setelah dia menjabat. Namun, kita perlu menelaah lebih jauh apa sebenarnya yang dimaksud dengan penarikan pasukan.

Jauh sebelum Obama mencalonkan diri sebagai Presiden AS, dirinya sudah menentang keras rencana pengiriman pasukan militer ke Irak. Penolakan keras Obama itu terlihat berbeda dengan para senator dan pejabat pemerintahan yang umumnya mendukung serangan ke Irak. Menurut Obama, rencana invasi ke Irak adalah sesuatu yang tidak rasional dan hanya akan melahirkan perang yang tidak perlu. Secara tegas, dia

mengatakan; *"That's what Im opposed to. A dumb war. A rash war. A war based not on reason but on passion, not on principle but on politics."*¹⁵⁵

Memasuki masa kampanye calon presiden, Obama tetap konsisten pada sikap penolakannya terhadap invasi ke Irak. Sikap ini kemudian menjadi pembeda yang nyata antara dirinya dengan kandidat presiden dari kubu Partai Republik, John McCain. Jika Obama menjanjikan penarikan pasukan Amerika dari Irak secepatnya, McCain justru berencana menahan pasukan AS kalau perlu sampai seratus tahun lamanya.

Sejak invasi AS di Irak berakhir tahun 2003, sebenarnya secara bertahap AS sudah menarik pasukannya dari wilayah perang di Irak. AS terjegal dengan Konvensi Genewa yang melarang setiap negara menginvasi memiliki kepentingan jangka panjang di wilayah invasinya. Hal yang dimaksud dalam konvensi ini jelas, artinya AS tidak boleh menempatkan pasukan militer resmi di Irak. Seperti yang sudah kita bahas dalam bagian sebelumnya, AS tidak memedulikan isi konvensi apa pun yang berhubungan dengan kebijakan luar negerinya.

Dengan dalih instabilitas di Irak, AS mempertahankan pasukan mereka di Irak. Semakin banyaknya korban tewas di pihak tentara AS semakin memojokkan pemerintahan Bush untuk segera menarik pasukan dari Irak. Hal yang jadi masalah, anggaran perang yang mencapai hampir dua miliar US\$ harus dipertanggungjawabkan di depan kongres. Publik AS tentu dengan sangat wajar mempertanyakan apa hasil yang didapat dengan anggaran sebesar itu? Kita harus ingat, saat itu adalah periode pertama pemerintahan Bush yang akan menghadapi pemilu tahun 2004. Kita semua pasti sudah mengerti bahwa motif ekonomilah yang melatarbelakangi invasi AS ke Irak. Motif penghancuran WAMD (*Weapon of Mass Destruction*) dan keterlibatan Saddam Hussein dengan

¹⁵⁵ Hamdan Basyar, "Saatnya Melihat Kiprah Obama," *Republika* 20 Januari 2009

Osama bin Laden adalah omong kosong. Penguasaan terhadap minyak bumi lengkap dengan infrastrukturnya seperti kilang dan jalur pipa menjadi hal yang wajib bagi Bush untuk mengembalikan kepercayaan publik AS terhadap invasinya di Irak.

Setelah invasi berakhir, sesuai dengan ketentuan PBB yang terlebih dahulu sudah diinvasi oleh AS, harus dilaksanakan proyek rekonstruksi pasca-perang. Hampir seluruh tender rekonstruksi itu dimenangi oleh perusahaan asal AS macam Halliburton, Chevron, Blackwater, dan lain-lain. Seluruh proyek dari pembangunan dan pengelolaan minyak, sampai dengan proyek penyediaan air bersih didapatkan oleh perusahaan asal AS. Di satu sisi, kita melihat AS mematuhi aturan PBB dan Konvensi Genewa untuk tidak memiliki kepentingan jangka panjang di Irak dengan cara menempatkan pihak korporasi swasta. Namun, di sisi lain, kita juga dengan mudah melihat perusahaan-perusahaan asal AS itu sebagai '*proxy*' pemerintahan AS. Keuntungan besar yang didapat dari proyek rekonstruksi Irak akan masuk ke dalam kas negara sebagai tebusan anggaran yang terkuras selama invasi. Hasilnya jelas, Bush berhasil memenangi Pemilu untuk periode keduanya mengalahkan John Kerry yang cukup populer dan potensial.

Proyek rekonstruksi AS di Irak bahkan melibatkan tentara bayaran yang disewa dari PMC-PMC asal AS. Para tentara bayaran ini menggantikan tugas militer AS yang sudah selesai dan harus segera dipulangkan karena tuntutan masyarakat di dalam negeri. Bedanya, para tentara bayaran ini tidak mengenal aturan main dan tidak berhubungan langsung dengan pemerintah. Keberadaan mereka di wilayah konflik di atasnamakan sebagai kepentingan swasta yang murni menjalankan proyek rekonstruksi. Hal ini juga sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Kondisi ini membuat mereka tidak memberikan pengaruh buruk pada citra politik

Amerika Serikat. Intinya, mereka bukan tentara Amerika Serikat, mereka adalah orang-orang sewaan para kontraktor swasta di Irak.

Dengan kata lain, rencana penarikan pasukan dari Irak tidak memiliki implikasi positif bagi dunia Islam. Hal itu hanya formalitas di depan tuntutan dunia internasional karena pada hakikatnya, cakar-cakar kekuasaan AS sudah ada di Irak. Kondisi keamanan di Irak yang masih tidak stabil tidak akan memengaruhi rencana penarikan pasukan. Karena keamanan yang sejati bagi AS ada pada wilayah perusahaan-perusahaan minyak mereka berikut jalur distribusinya. Wilayah-wilayah tersebut berada jauh dari pusat konflik di Irak tengah seperti provinsi al-Anbar. Wilayah-wilayah tersebut justru berada di selatan dan utara Irak. Seharusnya, rencana Obama di Irak adalah penarikan pasukan dan pengembalian aset ekonomi.

Hal kedua yang perlu disoroti sesuai dengan laporan *The Economist* adalah rencana Obama untuk menggelar pasukan tempur yang lebih intensif di Afghanistan. Obama menganggap invasi AS ke Irak adalah sebuah kekeliruan dalam rangka perang terhadap terorisme (baca: al-Qaeda). Seharusnya, AS lebih memfokuskan diri terhadap pengejaran terhadap Osama Bin Laden yang berlindung di belakang kekuasaan Taliban di Afghanistan.

Sesungguhnya, apa yang akan dijalankan oleh Obama merupakan ancaman besar bagi dunia Islam dan dunia pada umumnya ke depan. Betapa tidak, Obama akan membuka *front* yang lebih masif di kawasan Asia Tengah yang saat ini kondisinya sedang rawan. Jika kita membagi dua kelompok besar Islam di dunia, yaitu Syiah dan Sunni, maka Taliban adalah representasi faksi bersenjata terbesar di kalangan Islam Sunni. Taliban yang memang menganut faham wahabisme ala Arab Saudi

menjadi satu-satunya simbol perlawanan golongan Sunni yang memiliki visi pan-Islamisme.¹⁵⁶

Isu perjuangan Taliban bersifat global karena didukung oleh banyak faksi Sunni di dunia. Hal ini yang membedakannya dengan kelompok pejuang Islam Sunni yang lain, seperti Hamas di Palestina ataupun Ikhwanul Muslimin di Mesir. Banyak organisasi-organisasi pergerakan Islam yang perjuangannya bersifat lokal dan tidak permanen. Di kalangan Islam pergerakan, Afghanistan terkenal dengan sebutan "sekolahnya para Mujahid".¹⁵⁷ Hal ini bukan sebuah omong kosong, banyak relawan yang sengaja datang ke Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan Jihad yang benar. Setelah mereka pulang ke negaranya itu cerita lain. Tidak ada jaminan mereka akan berperilaku baik dan menyesuaikan diri dengan konteks perjuangan di negaranya. Bahkan, banyak dari mereka yang berubah menjadi radikal dan bertindak gegabah dalam mengaplikasikan konsep Jihad. Kita bisa lihat kasus peledakan bom yang dilakukan Amrozi dan teman-temannya. Salah satu tokoh peledakan bom tersebut adalah mantan pejuang Afghan yang sudah kembali ke tanah air setelah Uni Soviet berhasil diusir.

Afghanistan adalah negara yang sangat strategis untuk menjaga aset ekonomi AS di Timur Tengah. Setali tiga uang, penguasaan atas Afghanistan juga akan mengeliminasi kekuatan Iran di sebelah utara berikut Pakistan di Timur, dua negara muslim yang memiliki geliat pergerakan Islam yang sangat progresif. Khusus mengenai Pakistan, perlu diingat bahwa Pakistan adalah negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang memiliki nuklir. Karakter politik Pakistan di kawasan Asia Tengah akan sangat berdampak pada konstelasi politik dunia dalam konteks

¹⁵⁶ Ahmed Rashid, *Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia*, London: I.B.Tauris Publisher, 2000, hlm.82

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm.83

scenario Obama ke depan. Bagi AS, Pakistan adalah negara muslim yang sulit ditebak. Walaupun para pemimpinnya tidak beraliran Islam garis keras, tapi di dalam mayrkatnya tumbuh banyak sekali gerakan-gerakan yang anti Barat dan hal ini didiamkan saja oleh para pemimpin Pakistan. Selama ini AS selalu bisa menjaga hubungan baiknya dengan Pakistan dikarenakan para pemimpin Pakistan bersifat kooperatif dengan AS. Sikap kooperatif itu bukan berarti mereka adalah sekutu AS. Sikap Pakistan terhadap AS lebih disebabkan dinamika sengketa wilayah Kashmir, antara Pakistan dengan India.

Keinginan Pakistan untuk mendapatkan wilayah Kashmir dari India selalu terganjal oleh situasi politik internasional yang selalu tidak berpihak pada mereka. Pakistan sangat sadar bahwa kekuatan militer mereka kalah jauh dibandingkan dengan India. Jika memaksakan berseteru leat jalur negara ke negara, maka Pakistan akan terjebak ke dalam perang terbuka dengan India. Perang terbuka itu sendiri di satu sisi sangat diharapkan oleh India yang di atas kertas jauh lebih kuat dari Pakistan. Untuk menyasiasi keadaan ini, Pakistan mengandalkan perjuangan bawah tanah yang dilakukan militan-militan Kashmir yang berafiliasi dengan al-Qaeda di Afghanistan.¹⁵⁸ Perjuangan yang dilakukan tidak dengan nama pemerintah akan mengamankan posisi Pakistan di mata India.

¹⁵⁸ Mayoritas masyarakat Pakistan sangat pro terhadap Taliban dan Osama bin Laden. Sikap mereka ini didasari atas rasa kebersamaan sebagai sesama muslim. Menurut Dhurorudin Mashad, sekalipun rakyat Pakistan sering terlibat konflik antar etnis dan golongan, namun ketika dihadapkan pada isu Islam versus Barat, maka secara otomatis mereka akan bersatu berpihak kepada Islam. *op.cit*, Dhurorudin Mashad, hlm.55.

Alasan AS menyerang Afghanistan dianggap oleh rakyat Pakistan sebagai tindakan yang spekulatif dan tidak argumentative. Alasannya, selain AS belum memiliki bukti-bukti yang kuat keterlibatan Osama dalam tragedy WTC, masyarakat Pakistan sendiri umumnya menganggap Osama sebagai pahlawan. Osama bin Laden dijadikan symbol perlawanan dunia Islam atas hegemoni AS. Saking cintanya masyarakat Pakistan dengan Osama, banyak bayi-bayi yang dilahirkan pada masa itu diberikan nama Osama bin Laden. Segala pernak-pernik Osama, dari baju sampai kalender, laku keras di Pakistan. Dumyathi Ashori, *Osama Melawan Amerika*, Jakarta: Mizan, 2000, hlm.9

Situasinya kemudian menjadi semakin rumit ketika secara berturut-turut, Amerika Serikat mendapatkan atau mungkin menciptakan momentum untuk menghajar setiap gerakan Islam yang berafiliasi dengan al-Qaeda. Opini mengenai terorisme telah mengakar di seluruh dunia sejak tragedi 9/11. AS mengejar Osama bin Laden ke Afghanistan sekaligus memperingatkan semua golongan yang mendukung al-Qaeda. Melihat kondisi ini, India tidak membuang kesempatan emasnya untuk menyudutkan pemerintah Pakistan. Lewat sebuah konspirasi licik, India bersama dengan AS membuat Pakistan harus melenyapkan para pejuang Islam Kashmir yang berlindung di wilayahnya. Untuk lebih jelasnya, lihat lagi bagian kedua dari buku ini. Pakistan terpaksa mendukung usaha AS dalam memerangi terorisme (baca: para pejuang Islam) dengan menangkap dan menghukum para pejuang Kashmir yang sebelumnya mereka lindungi.

Keinginan Obama untuk mengejar Osama bin Laden di Afghanistan akan membuat kekacauan di wilayah Asia Tengah. Jika Obama melakukan pembasmian dengan cara yang represif dan tidak tepat sasaran, cerita permusuhan AS dengan dunia Islam akan semakin panjang. Namun, jika Obama benar-benar memanfaatkan jaringan intelijennya untuk menangkap dan membubarkan organisasi al-Qaeda di Afghanistan, maka masih ada kemungkinan versi lain dari hubungan AS dan dunia Islam.

Kecil kemungkinan Obama akan mengubah strategi *war on terror* yang salah kaprah selama ini. Jika Obama berani mengatakan bahwa serangan terhadap Irak adalah sebuah kesalahan, maka seharusnya dia juga berani mengatakan bahwa kebijakan "*war on terror*" pemerintah AS adalah sebuah kesalahan. Dalam konteks ini, Obama sama sekali tidak bisa diharapkan sebagai tokoh yang bersahabat dengan dunia Islam karena dia

justru akan melaksanakan kesalahan pemerintahan Bush yang paling fundamental (*war on terror*).

Kondisinya saat ini adalah Irak sudah berada dalam kekuasaan AS. Sekalipun AS menarik pasukannya dari Irak, negara ini sudah tidak bisa menjadi kekuatan penyeimbang Israel di Timur Tengah. Rezim boneka di Irak sudah terbentuk dan kepentingan-kepentingan ekonomi akan terus menjadi prioritas di atas pan-islamisme kawasan. Rencana Obama untuk melucuti Taliban dan al-Qaeda di Afghanistan artinya membuka front peperangan baru untuk menciptakan kawasan penyanggah kepentingan mereka.

Ekspektasi masyarakat internasional terhadap Obama yang akan mengembalikan citra politik luar negeri AS akan sangat bergantung dari pengolahan isu *war on terror* ini. Sejauh ini, Obama tidak menunjukkan sinyal positif terhadap perbaikan konsep *war on terror* yang pada dasarnya memang salah. Obama yang seharusnya dapat mengevaluasi kesalahan rezim sebelumnya, justru terlihat akan tampil lebih garang di kawasan Asia Tengah. Obama tampak akan membuka front peperangan serius dengan wilayah tersebut yang merupakan pusat pergerakan mujahidin dunia. Sekali lagi, masyarakat dunia harus mengetahui bahwa kesalahan terbesar Amerika Serikat di bawah rezim George W. Bush adalah konsep *war on terror* mereka. Kesalahan terdapat pada materi kebijakan tersebut, bukan implemetasinya.

Terkait dengan prospek bisnis tentara bayaran yang sudah dilakukan AS di Irak, aktivitas ini akan tetap berlangsung selama AS tetap membuka konflik di wilayah Timur Tengah. Bedanya, penggunaan jasa tentara bayaran yang akan digelar seandainya AS melaksanakan operasi militer di Afghanistan lebih bersifat profesional untuk efektivitas operasi. Keterlibatan pihak-pihak korporasi dalam penggunaan tentara bayaran lebih dapat dikontrol oleh pemerintah pusat karena Obama memang tampil

dengan visi pembenahan krisis ekonomi yang salah satu faktornya adalah kesalahan kalkulasi biaya perang. Salah satu faktor utama kesalahan kalkulasi biaya perang tersebut adalah biaya penggunaan jasa tentara bayaran.

Menurut Joseph Stiglitz, ada tiga faktor utama membengkaknya biaya perang Irak yang harus ditanggung oleh pemerintah AS. Pertama, kenaikan biaya personel militer, termasuk para personel militer. Ada sekitar 142.000 pasukan aktif yang ditempatkan di Irak selama kurun waktu Mei 2003 sampai Januari 2005. Dari keseluruhan pasukan tersebut ada banyak yang berasal dari wilayah konflik Afghanistan. Mereka inilah yang mendapatkan gaji dan tunjangan lebih besar disebabkan oleh penugasan kembali.¹⁵⁹

Pemerintah AS mencoba untuk meringankan beban para personel militer mereka dengan melibatkan para tenaga kontraktor swasta di lapangan. Pekerjaan yang mereka lakukan dimulai dari mencuci, memasak sampai melindungi diplomat AS. Semua itu dilakukan demi efektivitas performa pasukan militer pemerintah di Irak. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk perang Irak. Para pengamat militer di AS mengatakan bahwa hal ini merupakan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan militer mereka secara menyeluruh.

Selama ini, peningkatan kualitas militer hanya ditekankan kepada pengembangan alutsista (alat utama sistem persenjataan), padahal faktor pendukung lainnya seperti logistik dan teknisi persenjataan tersebut sangat vital dalam sebuah peperangan. Fungsi-fungsi inilah yang diserahkan kepada para kontraktor swasta. Dapat dikatakan, pemerintah sudah sangat bergantung kepada para kontraktor tersebut dalam peperangan yang

¹⁵⁹ Joseph Stiglitz, *op.cit*, hlm. 39—40

dilakukan. Jika, perhitungan yang dilakukan oleh Stiglitz menjadi perhatian bagi Obama, maka penggunaan jasa tentara bayaran akan semakin diperketat.

Kemenangan Barack Obama dalam Pemilu AS tidak melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti yang dilakukan George W. Bush sebelumnya. Lebih dari 2/3 dana kampanye Obama berasal dari sumbangan individu.¹⁶⁰ Tim kampanye Obama menjangkau komunitas-komunitas sipil di AS seperti mahasiswa, seniman sampai dengan aktivis pemuda gereja.¹⁶¹ Kepada seluruh komunitas tersebut, Obama menawarkan sebuah perubahan bagi masa depan AS.

Dengan minimnya dukungan dana yang diberikan oleh korporasi besar seperti yang dulu pernah terjadi pada masa kampanye George W. Bush, posisi Obama lebih independen dalam menentukan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Jika pemerintah AS benar-benar menggelar operasi militer kembali di wilayah Timur Tengah, maka penggunaan jasa tentara bayaran akan semakin diperketat. Di sisi lain, para tentara bayaran yang masih beroperasi di Irak akan segera dipulangkan seiring dengan gelombang penarikan kembali militer mereka secara penuh dari negara itu.

¹⁶⁰ Hal ini disebabkan kecilnya angka popularitas Barack Obama dibandingkan dengan calon dari partai demokrat yang lain. Para pengusaha-pengusaha kaya AS tidak menyangka Obama akan memenangi Pemilu. Martin Dupuis dan Keith Boeckelman, *Barack Obama: The New Face of American Politics*, Westport: Praeger Publisher, 2008, hlm. 51

¹⁶¹ "U.S. Senate Candidates Seek Younger Voters at Bars, Concerts," *Journal Gazette-Times Courier*, 21 April 2004

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Invasi Amerika Serikat pada 2003 melahirkan banyak sekali kajian dalam dunia politik dan hubungan internasional, khususnya politik AS di Timur Tengah. Sebagai sebuah negara besar, AS memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan warna dan arah konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Khusus mengenai Irak. AS sendiri memiliki banyak kepentingan terhadap negara ini. Perjalanan sejarah konflik antara kedua negara ini mencapai sebuah akhir yang antiklimaks saat AS berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein di satu sisi, tetapi di sisi lain mereka gagal menciptakan Irak yang stabil secara politis dan ekonomi.

Kegagalan AS dalam menciptakan Irak yang stabil pasca-invasi meninggalkan banyak permasalahan sesudahnya. Dari penelitian yang bertema sentral Dominasi Korporasi dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Beberapa hal yang menyebabkan pihak korporasi dapat melaksanakan bisnis tentara bayaran mereka pasca-invasi di Irak adalah sebagai berikut.
 - a. Terdapat hubungan kuat yang sudah dimulai sejak kampanye pemilu dilaksanakan antara pihak korporasi dengan para politisi dari Partai Republik. Dukungan yang diberikan tersebut berupa sokongan dana kampanye yang sangat besar untuk kemenangan George W. Bush pada

pemilu tahun 2000. Dukungan yang besar dari pihak korporasi tersebut menuntut adanya kompensasi dari kemenangan Partai Republik yang kemudian menjadikan George W. Bush sebagai presiden AS. Kompensasi tersebut berupa jabatan-jabatan strategis dalam struktur pemerintahan AS.

b. Ditematkannya golongan pengusaha ke dalam kabinet George W. Bush. Pada awal pemerintahan George W. Bush, dia menunjuk orang-orang di lingkaran elite pemerintahnya dari golongan pengusaha. Orang-orang seperti Dick Cheney, Donald Rumsfeld, dan Condoleeza Rice adalah para mantan elite korporasi besar yang mendanai kampanye Partai Republik. Banyak dari korporasi-korporasi besar ini merupakan korporasi yang bergerak di bidang energi. Setelah bergabung dalam pemerintahan, mereka secara bersama-sama membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan, seperti penarikan diri dari Protokol Kyoto. Rencana menyerang Irak berorientasi pada penguasaan sektor minyak yang ada pada negara tersebut. Hadirnya golongan korporasi dalam kabinet George W. Bush memuluskan cita-cita organisasi lobi Yahudi seperti PNAC dan CLI untuk menguasai Irak. Beberapa anggota dari organisasi ini adalah elite korporasi yang kemudian menjadi elite pemerintah di lingkaran George W. Bush. Mereka adalah Dick Cheney, Donald Rumsfeld, dan Paul Wolfowitz.

c. Pengangkatan isu terorisme sejak tahun 2001. Dimulai dengan momentum jatuhnya menara kembar WTC pada 2001, pemerintah AS langsung melakukan pengejaran kepada Osama Bin Laden sampai ke Afghanistan. Serangan ke Afghanistan berhasil menumbangkan Taliban dari kekuasaan, sekaligus menjadikan negara tersebut di bawah kontrol AS. Setelah itu, pemerintah AS menuduh Irak di bawah Saddam Hussein tengah mengembangkan senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*). Selain itu, AS juga mengaitkan rezim Saddam dengan organisasi al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Dengan bekal dua hal ini

mereka membulatkan tekad untuk menyerang Irak. di kemudian hari, terbukti dua tuduhan tersebut tidak benar.

d. Pelaksanaan proyek rekonstruksi Irak pasca-invasi. Setelah invasi dinyatakan berakhir, AS membuka tender proyek rekonstruksi bagi perusahaan yang ingin menggarap aset ekonomi serta membangun kembali Irak. Perusahaan-perusahaan di lingkaran pendukung utama Partai Republik mendapatkan proyek tersebut.

2. Bisnis tentara bayaran tentara AS di Irak dilakukan melalui pintu proyek rekonstruksi Irak pasca-invasi. Melalui tender proyek tersebut, beberapa PMC (perusahaan tentara bayaran) mendapatkan kesempatan untuk memberikan jasa mereka kepada pemerintah AS. Perusahaan-perusahaan tentara bayaran tersebut antara lain; Halliburton, Blackwater, dan DynCorp.

PMC-PMC asal AS ini mengerjakan berbagai misi yaitu; 1. pengamanan jalur serta infrastruktur minyak Irak yang sudah dikuasai AS; 2. evakuasi personel tempur serta pengiriman logistik bagi militer AS; 3. perawatan serta pengoperasian alutsista militer AS yang menggunakan teknologi canggih; 4. melatih para polisi lokal Irak; 5. pengamanan aset politik AS di Irak dari golongan pemberontak; 6. memberikan data intelijen di lapangan bagi pemerintah AS. Keseluruhan misi tersebut berada dalam kerangka penguasaan minyak Irak. PMC-PMC tersebut hadir atas nama swasta dan menjadi *proxy* kepentingan AS dalam penguasaan minyak Irak.

Pada proyek rekonstruksi Irak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asal AS, setiap PMC memiliki peran dan fungsi yang saling terkait satu sama lain dalam konteks kepentingan pemerintah AS. KBR (Halliburton) mendapatkan kontrak untuk mengurus segala kebutuhan militer reguler yang bertugas di lapangan, seperti memasak, mencuci baju hingga mengantarkan surat. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menjaga pembangunan kembali fasilitas infrastruktur minyak Irak di daerah Irak bagian selatan. Fungsi pengawalan aset politik AS di

Irak dilakukan oleh Blackwater Security Consulting (Blackwater). Mereka bisa terlibat langsung dalam sebuah pertempuran terbuka ketika menjalankan sebuah misi. PMC berikutnya adalah DynCorp yang mengurus kebutuhan militer dalam bidang alutsista. Mereka mendapatkan kontrak untuk merawat dan membantu tentara reguler dalam menggunakan persenjataan dengan teknologi canggih. Selain itu, DynCorp juga mendapatkan kontrak untuk melatih para petugas kepolisian Irak yang dibentuk pasca-invasi.

3. Prospek dan tantangan bisnis tentara bayaran AS di Irak sangat bergantung dari karakter rezim pemerintahan yang berkuasa. Barrack Obama yang menggantikan George W. Bush terjegal isu krisis ekonomi dan kepercayaan dunia internasional di awal pemerintahannya akibat kebijakan perang yang dijalankan rezim sebelumnya. Terkait permasalahan Irak, Obama berjanji akan menarik keluar seluruh pasukan militernya paling lambat 18 bulan sejak pelantikan dirinya. Dalam janji itu, tidak disebutkan bahwa AS akan mengembalikan pengelolaan aset ekonomi Irak kepada rakyat Irak. Artinya, para tentara bayaran yang disewa untuk mengamankan infrastruktur minyak akan cenderung dipertahankan. Di sisi lain, para tentara bayaran yang disewa untuk kepentingan asistensi militer akan ditarik seiring dengan penarikan pasukan dari wilayah tersebut. Minimnya dukungan korporasi besar yang pada masa sebelumnya membantu Partai Republik membuat posisi Obama lebih independen dalam menentukan kebijakan politik luar negeri mereka di masa depan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian di bidang ini pada masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut.

1. Perlunya dilakukan kuantifikasi data di lapangan agar diperoleh data yang memiliki tingkat keakuratan lebih tinggi.

2. Perlu dilakukan penelitian dengan data primer untuk mendapatkan hasil penelitian yang otentik dan akurat. Data primer dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak korporasi terkait kerjasama dalam proyek rekonstruksi Irak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alford, Robert R. dan Roger Friendland. *Power of Theory, Capitalism, The State, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. 1985.
- Andrian, Charles F. *Political Change in The Third World*. London: Unwin Hyman Press. 1988.
- Apter, David. *The Politics of Modernization*. Chicago: Chicago University Press. 1965.
- Ashori, Dumyathi. *Osama Melawan Amerika*. Jakarta: Mizan. 2000.
- Berger Peter L. *The Capitalist Revolution: Fifty Proporsitions About Prosperity, Equality And Liberty*. New York: 1986.
- Briody, Dan. *The Halliburton Agenda: The Politics, Oil dan Money*. New Jersey: John Wiley & Sons. inc. 2004
- Caporaso. James A. dan David P. Levine. *Teori-Teori Ekonomi Politik* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006.
- Derbyshire, Ian. *Politics in the United States: From Carter to Bush*. Edinburgh: W&R Chambers Ltd. 1990.
- Dupuis, Martin dan Keith Boeckelman. *Barrack Obama: The New Face of American Politics*. Westport: Praeger Publisher. 2008.
- Dye, Thomas R dan Harmon Zeigler. *American Politics in The Media Age*. Edisi ke-2. California: Brooks/Cole Publishing Company. 1986.
- Easton, David. *A Framework to Political Analysis*. Englewood Cliffs: N.J Prentice-Hall. 1965.
- Fontana, Andrea & James H. Frey. "Interviewing: The art of Science" dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications. 1994.
- Friedman, Milton. *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press. 1962.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: The Five Press. 1992.

- Goodman, Amy dan David Goodman. *Berperang Demi Uang: Membongkar Ketamakan dan Keganasan Elite Politik Amerika*. terj. Jakarta: Profetik. 2005.
- Ham, Christopher dan Michel Hill. *The Process in the Modern Capitalist State*. London: Harvester Press. 1995.
- Haripin, Muhammad. "Penetrasi Bisnis Dalam Politik Amerika Serikat: Studi Kasus Haliburton". Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Hayek, F.A. *The Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press. 1979.
- Heertz, Noreena. *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*. dalam *Neoliberalisme* (I Wibowo dan Francis Wahono, editor). Yogyakarta: Cenderelas Pustaka Rakyat Cerdas. 2003.
- Hertz, Noreena. *Membunuh Atas Nama Kebebasan: Kapitalisme Global dan Kematian Demokrasi* (Terj: Dindin Solahudin). Bandung: Nuansa. 2004
- Hisyam, Muhammad. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: LIPI Press. 1999
- Horton, Murray. "The Privatisation of War". *Military Technology*. Juli 2004
- Kenneth, Janda. et al. *The Challenge of Democracy: Government in America*. Edisi ke-2. Boston: Houghton Mifflin Company. 1989.
- Kenneth, M Dolbeare... Linda J.Medcalf. "The Rising Stars? Neoliberalism and Neoconservatism". *Political Issues in American Today*. Editor John Davies dan Fredric A. Waldstein. Manchester: Manchester University Press. 1987.
- Kuncahyono, Trias. *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2005.
- Kuncahyono, Trias. *Bulan Sabit di Atas Baghdad*. Jakarta: Penerbit Buku Gramedia. 2005.
- Malloy, James M. ed. *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*. University of Pittsburgh Press. 1979.
- Marger, Martin N. *Elites and Masses: An Introduction to political Sociology*. Wadsworth. 1987.
- Mashad, Dhuroruddin dkk. *Saddam Melawan Amerika*. Jakarta: Pensil-324. 2005.
- Maulani, Z.A. *Perang Afganistan: Perang Menegakkan Hegemoni Amerika di Asia Tengah*. Jakarta: PT Dalancang Seta. 2002.

- Miles, Matthew B. & Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992.
- Moleong, Lexi J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- O'Donnel, Guillermo A. "Corporation and The Question of The State" dalam James M. Malloy. ed. *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*. University of Pittsburgh Press. 1979.
- O'Donnel, Guillermo A. "Reflections on The Patern of Change in The Beureucratic Authoritarian State" dalam *Latin America Research*. vol 1. 1978.
- O'Donnel, Guilermo. "Tension in The Bureucratic-Authoritarian State and The Question of Democracy". dalam David Collier (ed).. *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton: University Press. 1979.
- Petras, James. *The Power of Israel in USA: Zionis Mencengkeram Amerika dan Dunia*. Jakarta: Zahra Publishing House. 2008.
- Pike, Frederick B dan Thomas Strich. ed. *The New Corporatism: Social Potical Structures in the Iberian World*. Notre Dome: University of Notre Dome Press. 1974.
- Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 1994
- Rashid, Ahmed. *Taliban: Militant Islam. Oil and Fundamentalism in Central Asia*. New Haven: Yale University Press. 2001
- _____. *Taliban: Islam. Oil and the New Great Game in Central Asia*. London: I.B.Tauris Publisher. 2000
- Safari, Mohammad dan Almuzzamil Yusuf. *Perang Irak-AS: Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*. Jakarta: Centre for Middle East Studies. 2003
- Saidi, Anas. *Metodologi Penelitia Sosial*. Jakarta: LIPI Press. 2001
- Salim, Agus.. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006
- Scahill, Jeremy. *Blackwater: The Rise of The World's Most Powerfull Mercenary Army*. New York: Nations Book. 2007

- Schmitter, Phillippe C. *Interst Conflict and Political Change in Brazil*. Stanford: Stanford University Press. 1971.
- Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Mizan. 2007.
- Soros, George. *The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power*. New York. Public Affair. 2004.
- Staniland, Martin. *What is Political Economy? Study of Social Theory and Underdevelopment*. New Haven: Yale University Press. 1985.
- Stiglitz, Joseph. *Perang Tiga Triliun Dolar: Bencana Ekonomi di Balik Invasi Amerika ke Irak* (terj: M.Rudi Atmoko). Bandung: Mizan. 2009.
- Subono, Nur Iman. *Taktik Negara Menguasai Rakyat: Sebuah Studi Teori Bentuk Pemerintahan Korporatisme*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. 2003.
- Suroso, Bambang. "Kepemimpinan Reagan. Reganomics. dan Mekanisme Pasar Amerika Serikat (1981–1988)". Tesis Master: Program pascasarjana Universitas Indonesia. 1995
- Tobing, Rosalina. *Neoliberalisme Dalam Kebijakan Ekonomi Politik Luar Negeri Amerika Serikat*. Tesis Master: Pusat Studi Kajian Wilayah Amerika UI. 2000
- Weiner, Myron. *Political Participation: Crisis of the Political Process*. dalam Leonard Binder. et.all. eds.. *Crises and Sequences in Political Development*. New York: Princeton University Press. 1971.
- Yin, Robert. K.. *Studi Kasus & Desain Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Surat Kabar dan Majalah

- Aviation Week & Space Technology*. 26 Maret 2004
- Flight International*. 26 November – 2 Desember 2002
- Guardian*. 7 Januari 2000.
- Guardian*. 26 Mei 2001.
- Guardian*. 27 April 2001
- New York Times Magazine*. 19 Februari. 2006

Majalah *Angkasa* Edisi Koleksi. "Tentara Bayaran". April 2006

"*Fortune* No.7 (8 Mei 2006).

Harian *Republika*. 20 Januari 2009

Newsweek. 22 Oktober. 2007

Newsweek. 23 Oktober. 2007

The Baltimore Sun. 4 Oktober. 2007

Internet

www.wikipedia.org

www.nobelprize.org

www.unfccc.int/kyoto_protocol

www.aljazeera.com

www.halliburton.com

www.blackwaterusa.com/securityconsulting

www.dyncorp.com

www.globalsecurity.org

Jurnal Online

Andrew Fiala. *The Just War Myth*. Rowman & Littlefield. 2008. hlm.133. dari
www.wikipedia.org

Center for Public Integrity. "Campaign Contributions of Post-War Contractors".
www.publicintegrity.org/wow/resource.aspx?act=contrb

Charles Lewis. "Capital Gains on Capital Hill". dari situs www.publicintegrity.org

Griff Witte. "Iraq: Army to End Expansive. Exclusive Halliburton Deal". dalam
Washington Post. 12 Juli 2006 diakses dari www.warprofiteers.com

Lenora Forstel. "The Cost of The United States Colonial War Against Iraq".
www.globalresearch.ca. 28 Agustus 2004

Margaret Scammell. "Political Marketing: Lessons for Political Sciences".
Political Studies. XLVII. hlm.720

Michael Ellison dan Martin Kettle. "Back-door Donations Sharer All Spending
Records". *Guardian*. 7 November 2000.

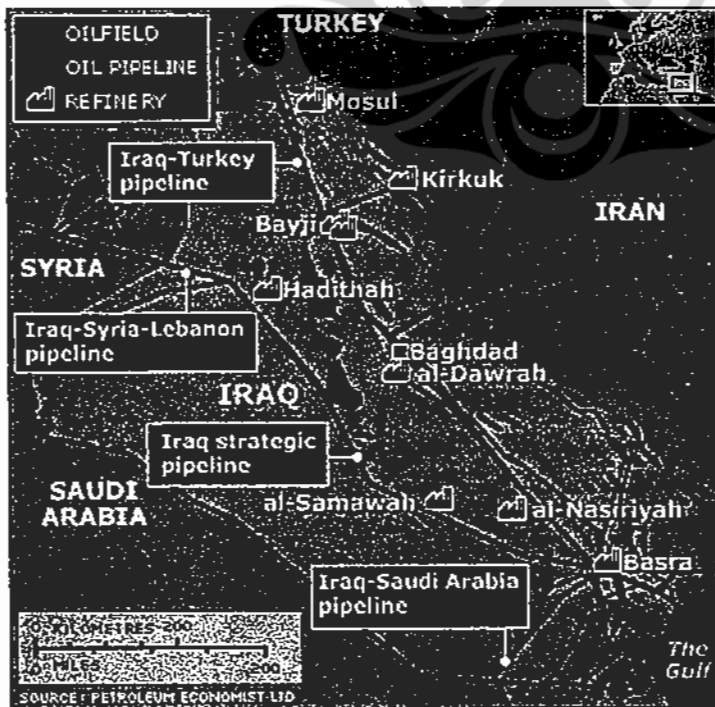
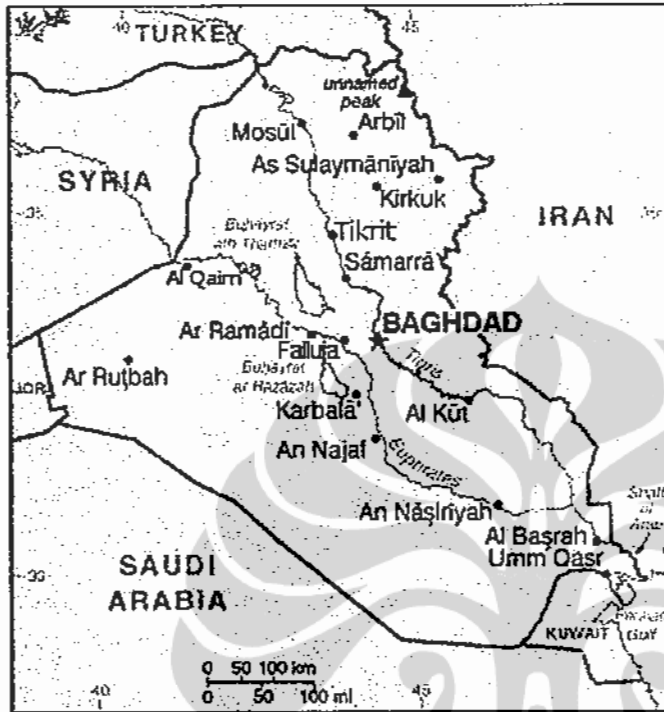
Paul Robinson. "Dictionary of International Security". Polity. 2008. hal.135. dari www.wikipedia.org. 14 Januari 2007

Rusydan. "Demokrasi AS dan Politik Uang". www.khilafah.com. 25 Maret 2008

Scot Rosenberg. "Conflict in Afghanistan". www.salon.com. diakses pada 5 Desember 2007.



PETA IRAK



Lampiran 2

Tokoh Pemerintahan AS Pendukung Bisnis Militer

Presiden AS George W. Bush



Wapres Dick Cheney



Paul Wolfowitz



Condoleezza Rice



Donald Rumsfeld



Lampiran 3

**Protokol Tambahan dari Konvensi Genewa pada 12 Agustus 1949
Terkait Dengan *Protection of Victims of International Armed Conflicts*
(Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional), Protokol I,
Tertanda 8 Juni 1977**

Isi Pasal 47

Act 47

Mercenaries

Mercenary is someone who:

1. *is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict*
2. *does, in fact, take a direct part in the hostilities*
3. *is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in fact, is promised, by or on behalf of a Party to the conflict, material compensation substantially in excess of that promised or paid to combatants of similar ranks and functions in the armed forces of that Party*
4. *is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of territory controlled by a Party to the conflict*
5. *is not a member of the armed forces of a Party to the conflict; and*
6. *has not been sent by State which is not Party to the conflict on official duty as a members of this armed forces.*

Pasal 47

Tentara bayaran

Tentara bayaran adalah orang yang:

1. *direkrut secara khusus baik di dalam maupun luar negeri untuk bertarung dalam sebuah konflik bersenjata;*
2. *benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam konflik-konflik;*
3. *mengambil bagian dalam konflik-konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan dijanjikan, oleh salah seorang pihak dalam konflik tersebut, kompensasi materiil yang berjumlah besar, melebihi jumlah yang dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat di angkatan bersenjata pihak tersebut;*

4. bukan berkewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dalam konflik tersebut maupun penduduk suatu wilayah yang dikuasai salah satu pihak;
5. bukan anggota angkatan bersenjata salah satu pihak; dan
6. belum pernah dikirim oleh sebuah negara yang bukan salah satu pihak dalam konflik untuk melaksanakan sebuah tugas resmi sebagai bagian dari angkatan bersenjata ini.



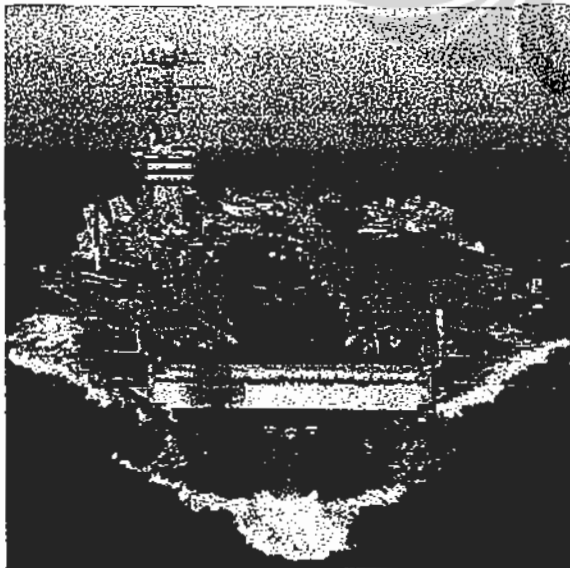
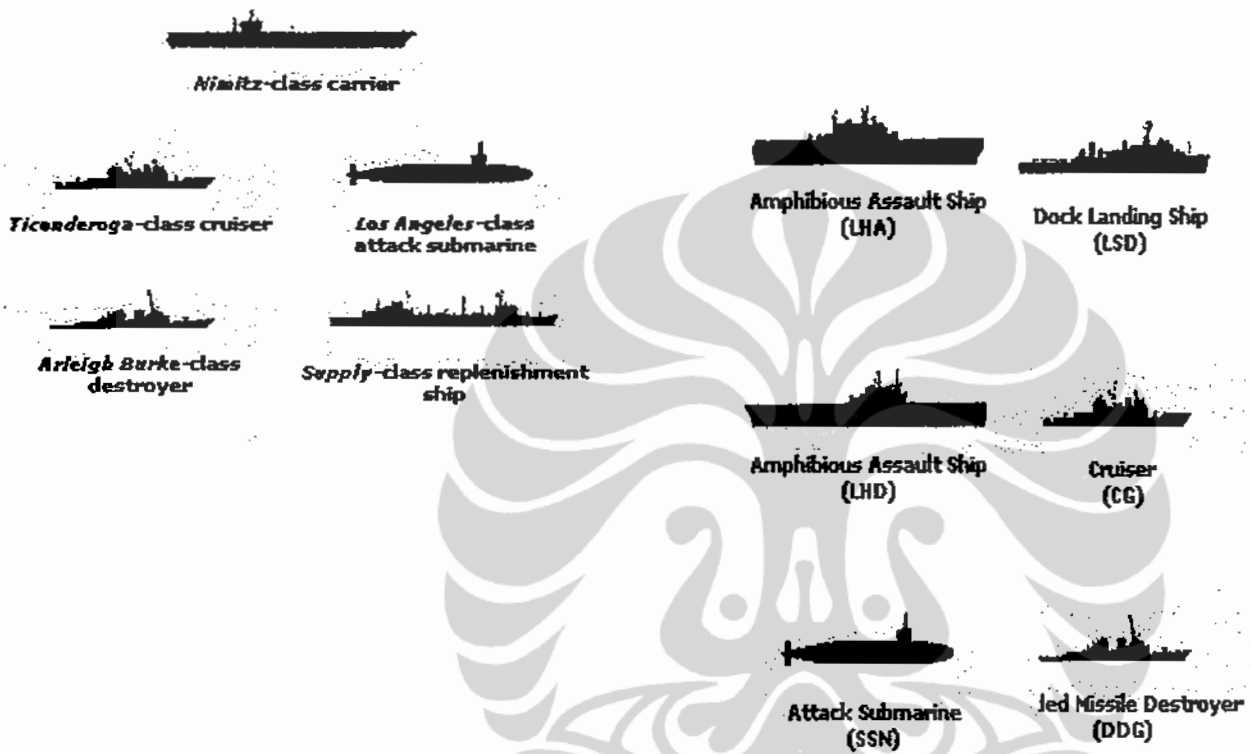
**PARA ANGGOTA PNAC
(PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY)**



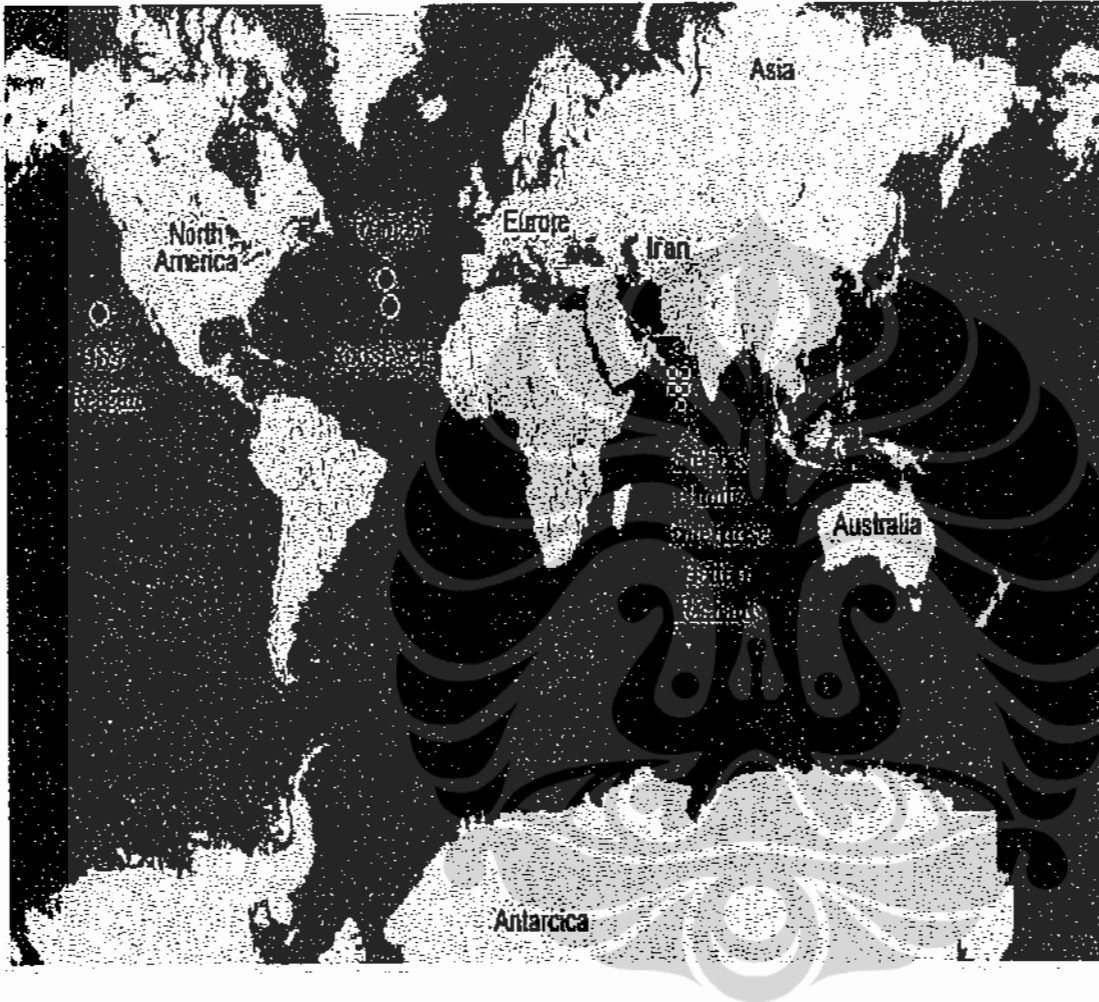
KABINET BUSH PERIODE PERTAMA



ARMADA MILITER AS UNTUK KAWASAN TIMUR TENGAH



PENEMPATAN ARMADA MILITER AS DI DUNIA



**PRODUK MILITER TERKINI YANG DIDEMONSTRASIKAN
DI IRAK**

Bom Cluster (Curah)



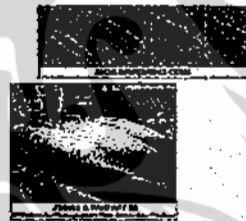
GBU 23 (penghancur bunker)



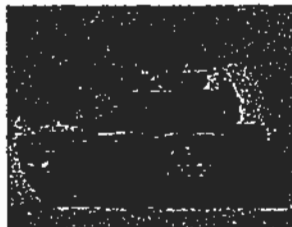
JDOM (bom perpenuntun satelit)



JSAW (bom berpenuntun satelit)



M1 Abrams (tank generasi terbaru AS)



UAV Predator (pesawat tanpa awak)



E-6B Prowler (Penghancur tank)



**Perusahaan Penyedia Tentara Bayaran AS
(Private Military Company)**

HALLIBURTON



DIREKSI HALLIBURTON SAAT INI

ROBERT L. CRANDALL, Chairman Emeritus, AMR Corporation/American Airlines, Inc. (engaged primarily in the air transportation business); President American Airlines, Inc. 1980-1995; Chairman, President and Chief Executive Officer, AMR Corporation/American Airlines 1985-1995; and Chairman and Chief Executive Officer, AMR Corporation/American Airlines 1985-1998, joined Halliburton Company Board in 1986; Chairman of the Compensation Committee and member of the Audit and the Management Oversight Committees; Director of Air Cell, Inc., Anixter International, Celestica Inc., i2 Technologies, Inc., and serves on the Advisory Board of American International Group, Inc. and on the Federal Aviation Administration Management Advisory Committee.

KENNETH T. DERR, Retired Chairman of the Board, Chevron Corporation (an international oil company); Chairman and Chief Executive Officer, Chevron Corporation, 1989-1999; joined Halliburton Company Board in 2001; member of the Audit, the Nominating and Corporate Governance and the Management Oversight Committees; Director of AT&T Corp., Citigroup Inc. and Calpine Corporation.

S. MALCOM GILLIS, University Professor, Rice University, since 2004; President,

Rice University, 1993-2004; Ervin Kenneth Zingler Professor of Economics, Rice University, 1996-2004; Professor of Economics, Rice University, 1993-2004; Director of Service Corporation International and Introgen Therapeutics, Inc.

W. R. HOWELL, Chairman Emeritus, J.C. Penney Company, Inc. (a major retailer); Chairman of the Board, J.C. Penney Company, Inc., 1983-1996; Chief Executive Officer, J.C. Penney Company, Inc., 1983-1995; joined Halliburton Company Board in 1991; Chairman of the Management Oversight Committee and member of the Audit and the Compensation Committees; Director of American Electric Power Company, Exxon-Mobil Corporation, Pfizer Inc. and the Williams Company. He is also a Director of Deutsche Bank Trust Corporation and Deutsche Bank Trust Company Americas, non-public wholly owned subsidiaries of Deutsche Bank AG, and Viseon, Inc. where he has informed us he will not stand for re-election to the Board in 2004.

RAY L. HUNT, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Hunt Oil Company (oil and gas exploration and development) and Chairman of the Board, Chief Executive Officer and President, Hunt Consolidated, Inc. for more than five years; joined Halliburton Company Board in 1998; Chairman of the Nominating and Corporate Governance Committee and member of the Audit and the Management Oversight Committees; Director of Electronic Data Systems Corporation, PepsiCo, Inc., King Ranch Company, and Chairman of the Board of Directors of the Federal Reserve Bank of Dallas and member of the Board of Managers of Verde Group, LLC.

DAVID J. LESAR, Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer of the Company, since 2000; President of the Company, 1997-2000; Executive Vice President and Chief Financial Officer, 1995-1997; joined Halliburton Company Board in 2000; Director of Lyondell Chemical Company and Mirant Corporation.

J. LANDIS MARTIN, Chairman and Chief Executive Officer, Titanium Metals Corporation (an integrated producer of titanium metals), since 1995; President, Titanium Metals Corporation, since 2000; President and Chief Executive Officer, NL Industries, Inc. (a manufacturer and marketer of titanium dioxide pigments), 1987-2003; Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Baroid Corporation (and

its predecessor), acquired by Dresser Industries, Inc. in 1994, 1990-1994; joined Halliburton Company Board in 1998; member of the Health, Safety and Environment and the Management Oversight Committees; Director of Titanium Metals Corporation, Apartment Investment and Management Corporation, Crown Castle International Corporation and Trico Marine Services, Inc.

JAY A. PRECOURT, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Scissor Tail Energy, LLC (a gatherer, transporter and processor of natural gas and natural gas liquids), since 2000; Chairman of the Board, Hermes Consolidated, Inc. (a gatherer, transporter and refiner of crude oil and refined products), since 1999; Vice Chairman and Chief Executive Officer, Tejas Gas Corporation, 1986-1999; President, Tejas Gas Corporation, 1996-1998; joined Halliburton Company Board in 1998; member of the Compensation, the Health, Safety and Environment and the Management Oversight Committees; Director of Founders Funds, Inc., The Timken Company.

DEBRA L. REED, President and Chief Financial Officer, Southern California Gas Company and San Diego Gas & Electric Company (regulated utility companies), since 2002; President of San Diego Gas & Electric Company, 2000-2001; President, Energy Distribution Services, Southern California Gas Company, 1998-2001; Senior Vice President, Southern California Gas Company, 1995-1998; joined Halliburton Company Board in 2001; member of the Health, Safety and Environment, the Nominating and Corporate Governance and the Management Oversight Committees.

PEMILIK SAHAM

EVELYN M. ANGELLE, Vice President of Investor Relations.

JERRY H. BLURTON, Senior Vice President & Chief Financial Officer for KBR; Vice President and Treasurer of Halliburton Company from July 1996 to 2004.

MARGARET E. CARRIERE, Senior Vice President & Corporate Secretary for Halliburton Company.

ALBERT O. CORNELISON, JR., Executive Vice President and General Counsel of Halliburton Company, since December 2002. Vice President and General Counsel of

Halliburton Company, May 2002 to December 2002. Vice President and Associate General Counsel of Halliburton Company, October 1998 to May 2002.

DONALD A. DELINE, Vice President of Government Affairs.

C. CHRISTOPHER GAUT, Executive Vice President and Chief Financial Officer of Halliburton, Company, since March 2003. Senior Vice President, Chief Financial Officer and Member - Office of the President and Chief Operating Officer of ENSCO International Incorporated, January 2002 to February 2003. Senior Vice President and Chief Financial Officer of ENSCO International Incorporated, December 1987 to December 2001.

PRESTON HOLSINGER, Vice President & Treasurer of Halliburton Company.

ANDREW LANE, Chief Operating Officer & Executive Vice President of Halliburton Company; formerly President and Chief Executive Officer of KBR.

DAVID LESAR, Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer of Halliburton Company since August 2000, Director of Halliburton Company since August 2000, President and Chief Operating Officer of Halliburton Company, May 1997 to August 2000, Executive Vice President and Chief Financial Officer of Halliburton Company, August 1995 to May 1997, Chairman of the Board of Kellogg Brown & Root, Inc., January 1999 to August 2000.

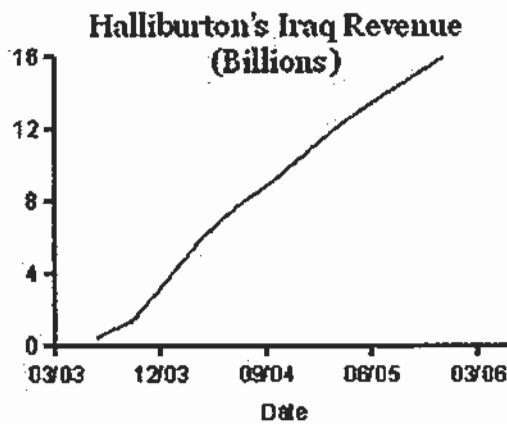
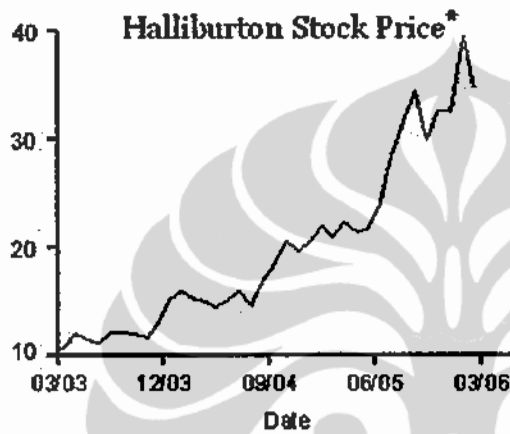
MARK A. MCCOLLUM, Senior Vice President and Chief Accounting Officer, since August 2003. Senior Vice President and Chief Financial Officer, Tenneco Automotive, Inc., November 1999 to August 2003. Vice President, Global Finance of Tenneco Automotive, September 1998 to November 1999.

WELDON J. MIRE, Vice President - Human Resources of Halliburton Company, since May 2002. Division Vice President of Halliburton Energy Services, January 2001 to May 2002 (Country Vice President Indonesia). Asia Pacific Sales Manager of Halliburton Energy Services, November 1999 to January 2001. Director of Business Development, September 1999 to November 1999. Global Director of Strategic

Business Development, January 1999 to November 1999. Senior Shared Service Manager Houston, November 1998 to January 1999.

DAVID R. SMITH, Vice President - Tax of Halliburton Company, since May 2002. Vice President - Tax of Halliburton Energy Services, Inc., September 1998 to May 2002.

Three Years in Iraq



*Split-adjusted stock price reflects 2 for 1 stock split of July 17, 2006
Source: HalliburtonWatch.org

BLACKWATER



Erik Prince
(Pendiri dan Pemimpin Blackwater)



DYN CORP



DynCorp International Selected For \$915 Million Aviation Task Order in Iraq

FALLS CHURCH, Va. – June 15, 2009 – The U.S. Department of State has awarded DynCorp International (NYSE:DCP) a task order to provide aviation and aviation support services in Iraq. This task order is under the Worldwide Personal Protective Services (WPPS) contract with the U.S. Department of State Bureau of Diplomatic Security to provide protective security for U.S. diplomatic personnel. The task order is awarded for a base year plus four one-year options, and has a total potential value of \$915 million if all options are exercised.

Under the task order, DynCorp International will provide personnel, ground and flight operations, basing and maintenance of rotary wing and fixed air assets. The award is effective June 15, 2009, with a transition period and then full in-country performance beginning September 4, 2009.

“This award is a tremendously important opportunity for DynCorp International to support the safety and security of U.S. diplomatic personnel serving in Iraq,” said DynCorp International CEO William L. Ballhaus. “It’s an honor to contribute to our government’s efforts to promote peace and stability in Iraq, for us as a company and for every person who serves with us.”

About DynCorp International

DynCorp International is a provider of specialized mission-critical services to civilian and military government agencies worldwide, and operates major programs in law enforcement training and support, security services, base operations, aviation services, contingency operations, and logistics support. DynCorp International is headquartered in Falls Church, Va. For more information, visit www.dyn-intl.com.

A Brief History of DynCorp International

DynCorp International LLC has its origins with two companies formed in 1946—Land-Air, Inc., and California Eastern Airways.

Land-Air, Inc., which became the predecessor to DynCorp International's Maintenance and Technical Support Services (MTSS) Division, reached a major milestone in 1951, when it was awarded the first Contract Field Teams (CFT) contract by the Air Force Logistics Command (AFLC). Contract field teams provide mission

support and depot-level repair to U.S. military aircraft and weapons systems worldwide. DynCorp International and its predecessors have provided services under the CFT program continuously since being awarded that first contract.

Also in 1951, Land-Air, Inc. was acquired by California Eastern Airways, Inc. (later California Eastern Aviation, Inc.). In 1962, California Eastern Aviation, Inc., changed its name to Dynalectron Corporation, and in 1987, Dynalectron changed its name to DynCorp.

In 1998, DynCorp established DynCorp Technical Services, Inc. (DTS), and transferred its existing aerospace and international-division business—including contracts later held by DynCorp International—to the new DTS subsidiary.

In December 2000, DynCorp formed DynCorp International LLC, and transferred to it all of its international business. DynCorp Technical Services LLC continued to perform DynCorp's domestic contracts.

In March 2003, DynCorp and its subsidiaries were acquired by Computer Sciences Corporation (CSC). DynCorp remained the parent of its existing subsidiaries, including DTS and DynCorp International LLC, and CSC became their ultimate parent.



In 2004, CSC made a strategic decision to divest itself of its non-core businesses, including security and aviation services. As part of that decision, CSC transferred its aviation services business segment into a separate CSC subsidiary, DTS Aviation Services. The U.S. Government approved the transfer of government prime contracts that were part of this business to DTS Aviation Services on September 30, 2004.

On December 12, 2004, DynCorp and CSC entered into an agreement to sell DynCorp International LLC, including its subsidiaries Dyn Marine Services LLC and DTS Aviation Services LLC, to DI Acquisition Corp, an affiliate of Veritas Capital Management. The sale closed on February 11, 2005, and the purchaser was renamed

DynCorp International Inc. DynCorp International Inc. is the corporate parent of DynCorp International LLC.

DynCorp International Core Values

We Serve – willingly in all locations and conditions.

We Care – for the safety, security, development, and well-being of our employees.

We Empower – our employees to succeed in a culture based on trust, respect, loyalty, and commitment.

We Perform – with a relentless commitment to exceeding expectations.

We Do the Right Thing – always, for our customers, employees, and those we serve.

DynCorp International is a corporate member of the following associations:

Afghan-American Chamber of Commerce (AACC)

The Afghan-American Chamber of Commerce is the leading organization facilitating U.S.-Afghan business, investment, and trade ties. AACC works to ensure that Afghanistan's economic development remains a priority for U.S. and Afghan policymakers and serves as a link between business and government to encourage progressive economic policies that will result in increased business and investment between the U.S. and Afghanistan.

Airlift/Tanker Association (ATA)

The Airlift/Tanker Association is dedicated to ensuring that American military forces continue to have the air mobility capability required to implement U.S. national security strategy.

Association of the US Army (AUSA)

Since 1950, the Association of the United States Army has worked to support all aspects of national security while advancing the interests of America's Army and the men and women who serve. AUSA is a private, non-profit educational organization that supports America's Army - Active, National Guard, Reserve, Civilians, Retirees and family members. AUSA provides numerous Professional Development Opportunities at a variety of events both local and national. AUSA represents every American Soldier by being the voice for all components of America's Army, fostering public support of the Army's role in national security and providing professional education and information programs.

Business Council for International Understanding (BCIU)

Since its inception in 1955 as a White House initiative under President Eisenhower, the Business Council for International Understanding (BCIU) has been a neutral,

results-oriented partner, facilitating dialogue and alliances between world businesses and political leaders. With members from more than 150 world-leading companies, BCIU provides an ongoing forum for senior business executives to interact with heads of state/government, cabinet ministers, and senior government officials.

Corporate Council on Africa (CCA)

The Corporate Council on Africa (CCA), established in 1993, is at the forefront of strengthening and facilitating the commercial relationship between the United States and the African continent. CCA works closely with governments, multilateral groups and business to improve the African continent's trade and investment climate, and to raise the profile of Africa in the US business community. CCA programs are designed to bring together potential business partners and raise Africa's investment profile in the US by developing critical contacts and business relationships and providing a forum for the exchange of information and ideas.

Council on Foreign Relations

The Council on Foreign Relations is an independent, nonpartisan membership organization, think tank, and publisher dedicated to being a resource for its members, government officials, business executives, journalists, educators and students, civic and religious leaders, and other interested citizens in order to help them better understand the world and the foreign policy choices facing the United States and other countries.

Fairfax County Chamber of Commerce

"The Voice of Business in Northern Virginia", since 1925, the Fairfax County Chamber's mission is to develop, encourage and promote the economic vitality, quality of life and political interests of its members and the businesses of Northern Virginia for the benefit of the broader community.

International Peace Operations Association (IPOA)

The International Peace Operations Association (IPOA) is a 501(c)(6) non-profit trade association. The mission of IPOA is to promote high operational and ethical standards of firms active in the peace and stability operations industry; to engage in a constructive dialogue and advocacy with policy-makers about the growing and positive contribution of these firms to the enhancement of international peace, development and human security; to provide unique networking and business development opportunities for its member companies; and to inform the concerned public about the activities and role of the industry. IPOA is committed to raising the standards of the peace and stability operations industry to ensure sound and ethical professionalism and transparency in the conduct of peacekeeping and post-conflict reconstruction activities.



Logistics Officers Association (LOA)

The purpose of the Logistics Officer Association is to enhance the military logistics profession. LOA provides an open forum to promote quality logistical support and logistics officer professional development.

Middle East Institute (MEI)

Since 1946 the Middle East Institute has been an important conduit of information between Middle Eastern nations and American policymakers, organizations and the public.

National Defense Industry Association (NDIA)

America's leading Defense Industry association promoting National Security.

National Defense Transportation Association (NDTA)

NDTA strives to be the world's leading professional association for individuals working in the global transportation / distribution system and related industries so we may maximize our contribution to the national security and economic growth of the United States.

National Guard Association of the US (NGAUS)

NGAUS is a nonpartisan organization representing nearly 45,000 current and former Army and Air National Guard officers. It was formed in 1878 with the goal of obtaining better equipment, standardized training and a more combat-ready force by petitioning Congress for resources. Its goal is to maintain the freedom and security of this nation by guaranteeing a strong national defense through the provision of a vital, dynamic National Guard as a part of the Total Force.

National U.S.-Arab Chamber of Commerce (NUSACC)

The National U.S.-Arab Chamber of Commerce (NUSACC), established 40 years ago, is America's longest serving organization dedicated to U.S.-Arab business. NUSACC is widely regarded as the voice of American business in the Arab world and the premier portal to the United States for Arab commercial enterprises.

Professional Services Council (PSC)

The Professional Services Council (PSC) is the national trade association of the government professional and technical services industry.

U.S.-UAE Business Council

The US-UAE Business Council is a collaboration of leading companies based in the United States and United Arab Emirates, which are committed to expanding bi-lateral commercial opportunities between the two countries.

DynCorp International is Veteran-Friendly

At DynCorp International we recognize the experience and dedication that veterans contribute to our business, as employees, business partners, and suppliers. As President and CEO William L. Ballhaus has said, "Veterans are a great asset to DynCorp International in our work, supporting the U.S. government in foreign policy and national security fields with critical support and training services."

Proof of our commitment comes from G.I. Jobs Magazine, the nation's premier career guide for military job-seekers. DynCorp International has been ranked in the top 20 most military-friendly employers for two years in a row, at 15th and 19th place, chosen from a pool of approximately 2,500 companies with a minimum of \$1 billion in annual revenues. Companies selected by G.I. Jobs Magazine are chosen for their level of dedication to military hiring, observance of Reserve/Guard policies, veteran training programs, and the percentage of new hires who are veterans.

DynCorp International was also honored in 2009, for the third year in a row, by *Ventrepreneur* magazine as one of the U.S. 10 best corporations for veteran-owned businesses. We arranged for 100 veteran-owned small businesses to attend the 10th and 11th Annual Government Procurement Conferences free of charge and also sponsored the Veteran-Owned Business Accountability Summit in June 2008. Finally, the Maintenance and Technical Services Support business division earned an Achievement Award last year from the Center for Veterans Enterprise for achieving their subcontracting goal for service-disabled veterans.

DynCorp International is continuing to develop a strong working relationship with the transition programs sponsored by the military services. Participation in the Army Career and Alumni Program (ACAP) and the Air Force Transition Assistance Program (TAP) job fairs and employer panels clearly demonstrates the value that we place on the training and experience our veterans bring to our company. We also sponsor the Service Academy Career Conference (SACC) four times a year for graduates from all the service academies.

In word and deed, DynCorp International affirms every day our corporate belief in the value of veteran suppliers and veteran employees. We offer extraordinary opportunities and challenging assignments to people who share our commitment to quality and service. Veterans make an important part of our team, the DynCorp team.

DynCorp International Veteran News

DynCorp International Recognized In G.I. Jobs Military-Friendly Employer List

DynCorp International has been ranked the 19th most military-friendly employer by G. I. Jobs Magazine, the nation's premier career guide for military job-seekers. Selected companies are those that have made the greatest effort and have had the greatest success in hiring military veterans. DynCorp International has made the list for two years in a row. [more >>>](#)

DynCorp International Committed To Veteran-Owned Businesses

DynCorp International (NYSE: DCP) has been recognized for the second year in a row by Vetpreneur magazine as one of the United States' 10 best corporations for veteran-owned businesses. Vetpreneur is the official magazine of the National Veteran-Owned Business Association. The listing recognizes both efforts and results by companies in doing business with veteran-owned suppliers and contractors. [more >>>](#)

Supporting the Government with Veteran Support

Founded by World War II veterans, DynCorp International (DI) provides services for governments and industry worldwide. It is a leader in aviation, logistics, contingency support and security. DynCorp has recognized the importance of veteran talent in their global success. [more >>>](#)

Top 50 Most Military-Friendly Employers

DynCorp International has been selected as one of the Top 50 Most Military-Friendly Employers® by *G.I. Jobs*. This distinction is given to the top 50 companies who have strong military recruitment efforts, a high percentage of hires with past military experience, and have company policies with respect to national guard and reserve service. DynCorp International was selected out of approximately 2,500 companies with annual revenues of \$1 billion or above.

Board of Directors

Robert B. McKeon

Chairman of the Board
Chairman, Veritas Capital

William L. Ballhaus

President and Chief Executive Officer
DynCorp International Inc.

Michael J. Bayer

President and Chief Executive Officer of
Dumbarton Strategies LLC

General Richard E. Hawley

U.S. Air Force Retired

Herbert J. Lanese
Former President and
Chief Executive Officer
DynCorp International Inc.

General Barry R. McCaffrey
U.S. Army Retired

Ramzi M. Musallam
Partner, Veritas Capital

Admiral Joseph W. Prueher
U.S. Navy Retired

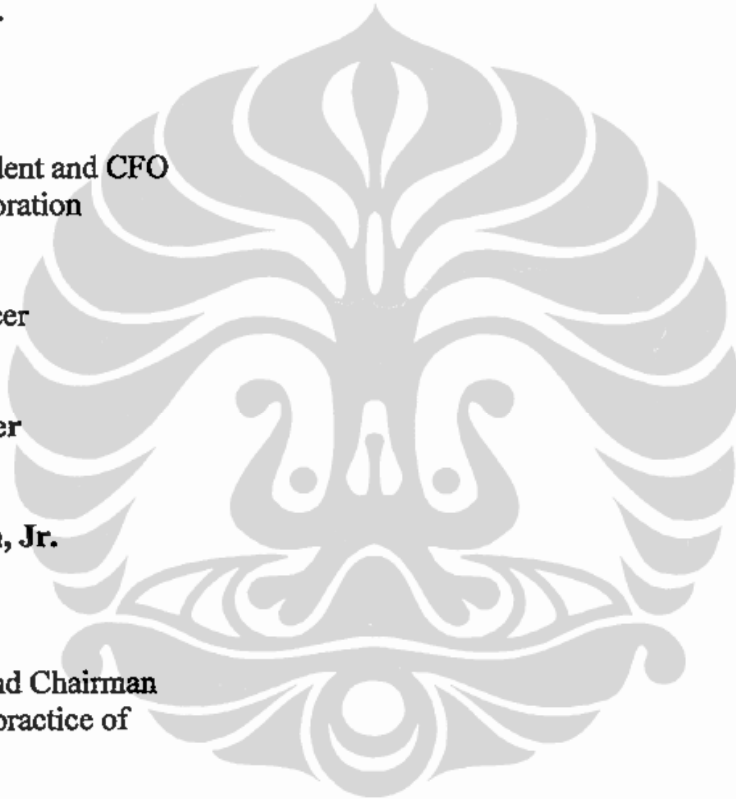
Charles S. Ream
Former Executive Vice President and CFO
of Anteon International Corporation

Mark H. Ronald
Former Chief Executive Officer
BAE Systems, Inc.

General Peter J. Schoomaker
U.S. Army Retired

Admiral Leighton W. Smith, Jr.
U.S. Navy Retired

William G. Tobin
Former Managing Director and Chairman
of the Defense & Aerospace practice of
Korn/Ferry International



Executive Leadership



Bill Ballhaus
President and CEO

William L. Ballhaus was named president and chief executive officer of DynCorp International in May 2008. He joined the company from BAE Systems, where he was president of the Network Systems division. He joined BAE Systems in 2003 and served as president of the National Security Solutions and Mission Solutions divisions. Earlier, he held senior executive positions at The Boeing Company's satellite systems business (previously Hughes Space and Communications), including senior vice president of system engineering and general manager of a stand-alone electronics subsidiary. Bill has a bachelor's degree in mechanical engineering from the University of California at Davis, and a master's and PhD in aeronautics and astronautics from Stanford University. He also holds a master's degree in business administration from UCLA's Anderson Graduate School of Management.



Craig Reed
Senior Vice President, Strategy and Corporate Development

Craig Reed joined DynCorp International in December 2008 to oversee market intelligence, strategic initiatives, and mergers and acquisitions. Before joining DI, he was vice president of strategy for Northrop Grumman's Corporate Cyber Campaign, and vice president of strategy and planning for the Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Systems division. Craig was a presidential appointee to the U.S. Department of Energy (DoE), where he served as senior policy advisor in the Office of the Secretary, chairman of the DoE's Counterterrorism/Homeland Security Council, and representative to the White House National Space Policy Coordinating Council. Craig earned a PhD in public policy with a concentration in national security studies from George Washington University. He holds a Master of International Affairs degree in international security policy and international business from Columbia University, and Bachelor of Arts degrees in political science and psychology from the State University of New York at Albany.



Bob Rosenkranz
Executive Vice President, Chief of Staff

Robert Rosenkranz was named executive vice president and chief of staff in December 2008, having served since 2005 as president of the International Security Services division and its predecessor, the Government Services division. He was previously vice president of business development for KEI Pearson, a global education and media company, and general manager of Beamhit, a marksmanship-simulation company that was acquired by L-3 Communications. From 1995 to 2001, he was senior vice president of range and logistics services for DynCorp Technical Services. Bob is a retired U.S. Army major general. He is a graduate of the United States Military Academy and has a master's degree from the University of Pennsylvania. He also completed graduate studies at the United States Army War College, the Massachusetts Institute of Technology, and the John F. Kennedy School of Public Administration at Harvard University.



Curtis Schehr
Senior Vice President, Chief Compliance Officer and General Counsel

Curtis Schehr was named senior vice president, chief compliance officer in June 2009. He serves also as general counsel and secretary of DynCorp International. Before joining DI in 2006, he worked for Anteon International Corporation. As senior vice president, general counsel, and secretary from 1996 to 2006, he was part of the team that spearheaded the company's growth and guided its initial public offering in 2002. Curtis was an associate general counsel for Vitro Corporation and corporate legal counsel for Information Systems and Networks Corporation. He also held several positions in the Legal and Contracts departments of Westinghouse Electric Corporation's defense group. He holds a JD, with honors, from the George Washington University Law School and a BA from Lehigh University, where he was elected to Phi Beta Kappa. Curtis is president-elect of the Washington Metropolitan Corporate Counsel Association. In 2005, the association named him Outstanding Chief Legal Officer of the Year.



Steve Schorer
President, Global Platform Support Solutions (GPSS)

Steven T. Schorer joined DynCorp International in April 2009 as president of the Global Platform Support Solutions division. From 2003 to 2008, he was president of the C4I segment at DRS Technologies. Earlier, he served as president and general manager of the Ocean Systems Division of L-3 Communications. He has also worked for Allied Signal Aerospace, Lockheed Missiles and Space, Raytheon, and Hughes Aircraft. Steve has a Bachelor of Science degree in electrical engineering from the University of Massachusetts. He completed executive management programs at the Anderson School of Executive Management, University of California, Los Angeles, and at the American Graduate School of International Management in Phoenix. Steve leads the GPSS division with annual revenue of approximately \$1.5 billion from six business areas: Field Service Operations, INL Air Wing, Aviation Life Cycle Support, Domestic Aviation Operations and Support, International Aviation Operations and Support, and Land Systems.



Tony Smeraglinolo
President, Global Stabilization and Development Solutions (GSDS)

Anthony Smeraglinolo joined DynCorp International in December 2008 as president of the International Security Services division which preceded the Global Stabilization and Development Solutions division. He joined DI from L-3 Corporation, where he served as president of the Intelligence Solutions Division from 2005 to 2008. He spent more than 25 years with Harris Corporation, holding leadership positions in finance, program management, business development and operations. He was also senior vice president of business operations at DRS Technologies. Tony has an MBA from Florida Institute of Technology and a BS in business management from Fairfield University in Connecticut. The GSDS division has annual revenue of \$1.4 billion from five business areas: CIVPOL, Infrastructure, LOGCAP IV, Operations, Security and Mentoring.



John Supina
Senior Vice President, Business Administration

John Supina was named senior vice president of business administration in October 2007. He oversees contract administration, information technology, contract and proposal pricing, purchasing, quality assurance and safety, and facilities management. John joined Dynalectron, DI's predecessor, in 1980. He has served in executive positions including vice president of contract administration, and senior vice president of Department of State operations, general manager of DIFZ in Dubai, United Arab Emirates, and vice president of contract administration for the Government Services division. His career includes five years in the U.S. Navy, and he holds a bachelor's degree in aviation maintenance management.



Mike Thorne
Senior Vice President and Chief Financial Officer

Michael Thorne is senior vice president of finance, chief financial officer, and treasurer of DynCorp International. He joined DI in 2001, and served as the company's director for joint ventures in the U.K., Saudi Arabia, and Puerto Rico. Before joining DI, he spent 22 years with Lockheed Martin Corporation in key financial positions in both the manufacturing and service divisions. Mike holds an MBA and a bachelor's degree from the University of Georgia.



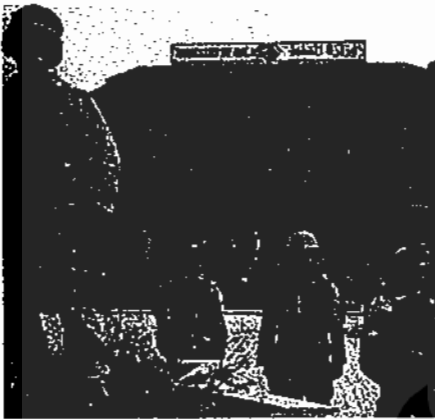
Dianne Walker
Senior Vice President, Human Resources

Barbara Dianne Walker was named senior vice president of human resources in March 2007. Before that, she was vice president of human resources for the Maintenance and Technical Support Services (MTSS) division. She served also as vice president of business administration for MTSS and its predecessor, Field Technical Services, responsible for all business administration for the operating unit. Dianne joined the company in 1979 and has served since then in roles of increasing responsibility.

ata

Lampiran 12

FOTO-FOTO AKSI PARA TENTARA BAYARAN DI IRAK





RIWAYAT HIDUP PENULIS



WIRAWAN SUKARWO lahir di Jakarta pada 25 April 1984. Dia anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Sukarwo dan Maryati ini telah menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Program Studi Arab pada tahun 2006. Ketertarikannya terhadap Timur Tengah membuatnya melanjutkan studi di Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Timur Tengah dan Islam. Ia telah menyelesaikan tesis dengan judul DOMINASI KEPENTINGAN KORPORASI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH: STUDI KASUS BISNIS TENTARA BAYARAN PASCA-PERANG IRAK TAHUN 2003 pada 2009.

Email : jalamengkara@yahoo.co.id

Blog : www.dindingkosong.blogspot.com

